

LAKIP



laporan kinerja
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Tahun 2017



9.087 suka

@kemdikbud.ri

1.877 kiriman

188k pengikut

182 diikuti

Instagram



Kata Pengantar

MENDIKBUD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

LAKIP Kemendikbud tahun 2017 merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemendikbud tahun 2017.

Pada perjanjian kinerja Kemendikbud tahun 2017 ditetapkan 16 sasaran strategis dan 45 indikator kinerja, yang dijabarkan dalam 8 program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Secara umum Kemendikbud berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Tantangan dan permasalahan saat ini yang masih harus diselesaikan di antaranya, penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu pendidikan vokasi, peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas sistem pembelajaran, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pemerataan dan pemenuhan guru, peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar, peningkatan keterlibatan publik dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pelestarian bahasa dan budaya Indonesia, serta peningkatan tata kelola (*good governance*). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Kemendikbud selama tahun 2017. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Kemendikbud tahun 2017.

Jakarta, 28 Februari 2018,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
------------------------	----------

BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENDIKBUD.....	3
--	----------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENDIKBUD.....	7
---	----------

A. CAPAIAN KINERJA KEMENDIKBUD..	7
----------------------------------	----------

B. REALISASI ANGGARAN.....	91
----------------------------	-----------

C. CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN.....	93
----------------------------------	-----------

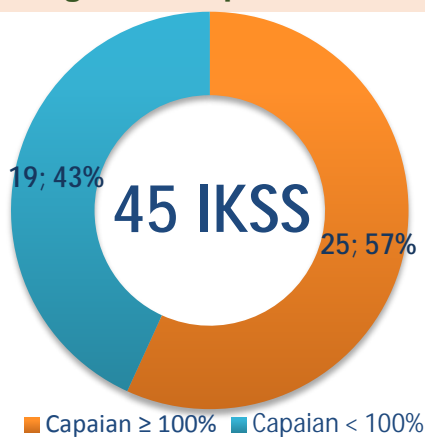
BAB IV PENUTUP.....	101
---------------------	------------

LAMPIRAN.....	102
---------------	------------

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Kemendikbud memberikan informasi tingkat pencapaian 16 sasaran strategis dengan 45 indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan capaian program unggulan Kemendikbud tahun 2017. Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai.

Ringkasan Capaian IKSS



Kinerja keuangan Kemendikbud 2017

97,10%

Permasalahan/Kendala

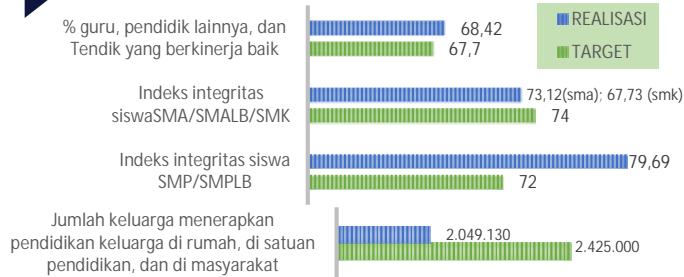
- 1) Beberapa ketercapaian indikator kinerja merupakan tanggungjawab dan kewenangan penuh pemda;
- 2) Keterbatasan lahan yang *tidak* sengketa untuk membangun unit sekolah baru;
- 3) rendahnya daya dukung infrastruktur untuk mendorong akses pendidikan;
- 4) kualitas layanan dan lulusan belum merata;
- 5) distribusi dan kualitas guru belum merata.

Upaya penyelesaian

- 1) Mendorong Pemda dan Sekolah untuk memenuhi SPM dan SNP pendidikan;
- 2) Membantu pemenuhan guru melalui GGD;
- 3) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan

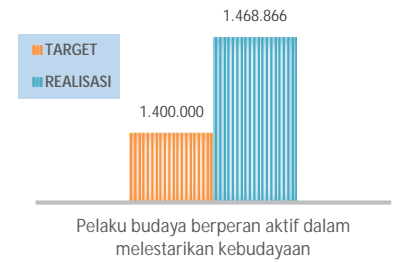
T1

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 1)



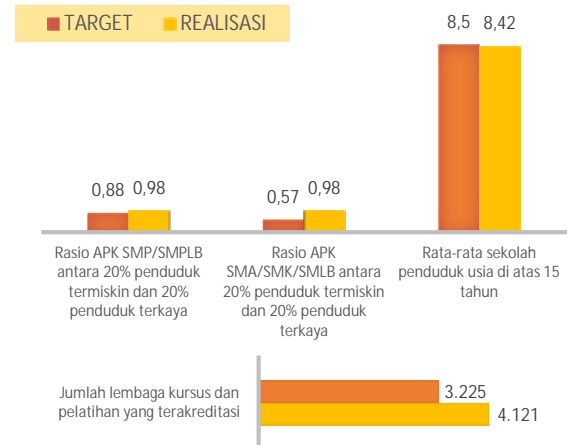
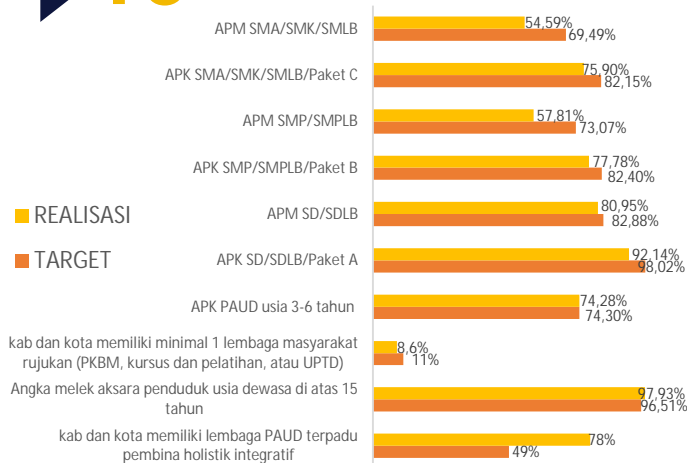
T2

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 2)



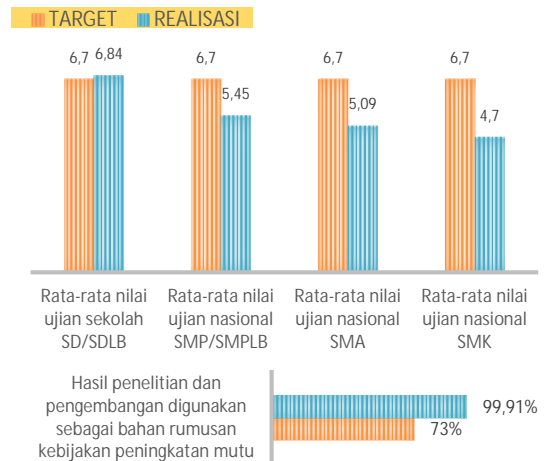
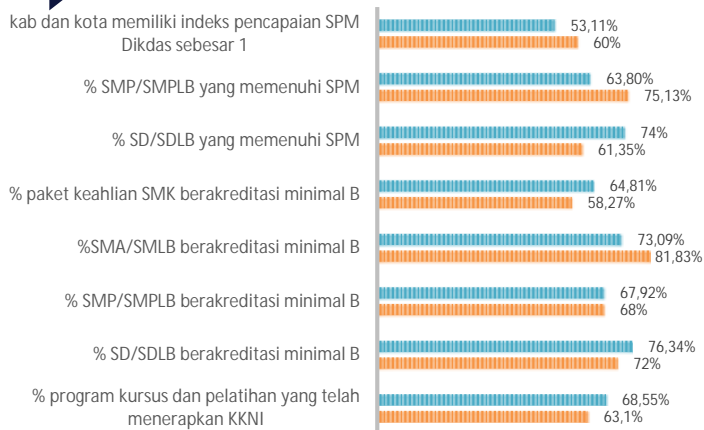
T3

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 3)



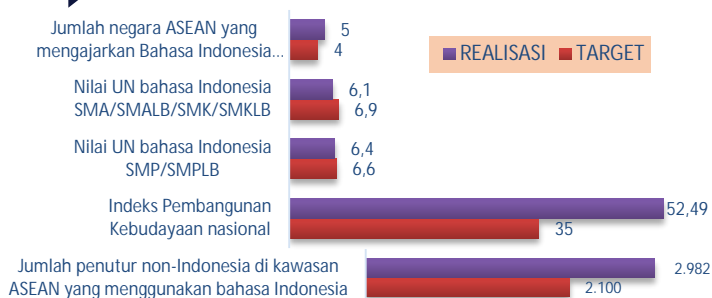
T4

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 4)



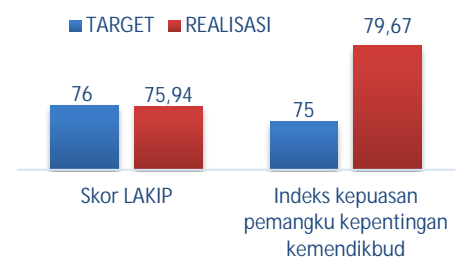
T5

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 5)



T6

(capaian IKSS #Tujuan Strategis 6)



Laporan Keuangan= WTP

BAB I

PENDAHULUAN

Kemendikbud dibentuk pertama kali pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sampai saat ini telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur.

Dasar pembentukan Perpres Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kemendikbud.

Mendikbud sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat Bapak Muhadjir Effendy menggantikan Anies Baswedan.



Tugas

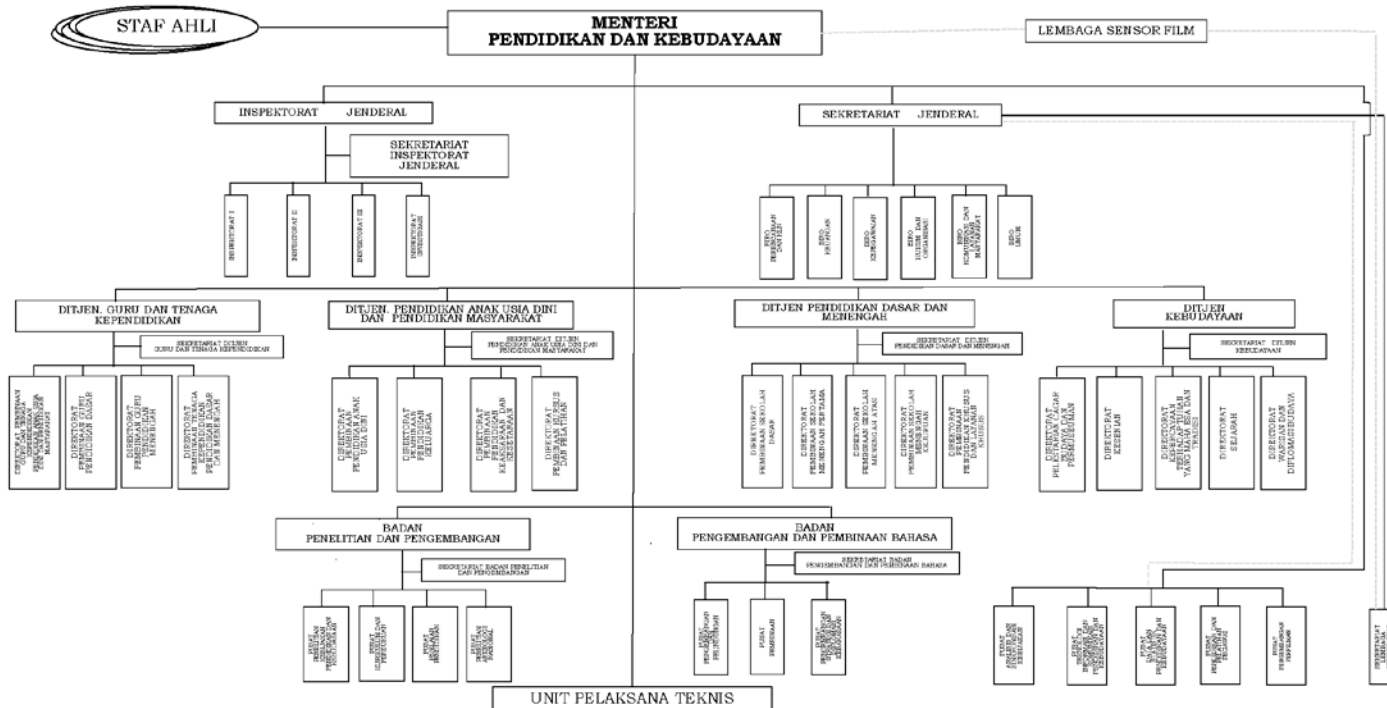
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan DIKMAS, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan DIKMAS serta pengelolaan kebudayaan;
- pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan DIKMAS serta pengelolaan kebudayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta TENDIK;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbud;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemendikbud;
- pelaksanaan BIMTEK dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemendikbud di daerah;
- pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- pelaksanaan LITBANG di bidang PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan DIKMAS, serta kebudayaan; dan
- pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbud.



STRUKTUR ORGANISASI



PERMASALAHAN

1. Peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal
2. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan;
3. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas;
4. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal;
5. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal;
6. Distribusi dan kualitas guru belum merata di semua daerah;
7. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal;
8. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan;
9. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah;
10. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa;
11. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
12. Pelestarian warisan budaya belum efektif;
13. Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya;
14. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal;
15. Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien;
16. Belum optimalnya pendidikan vokasi yang ada;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENDIKBUD



Visi Kemendikbud tahun 2015-2019:

"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"



MISI KEMENDIKBUD

M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.



Pagu Anggaran 2017

Rp39.823.127.018.000,00 (awal)

Untuk membiayai pencapaian sasaran strategis

Rp37.965.097.991.000,00 (revisi)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	72 dan 74
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	2.425.000
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	67,70%
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.400.000
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	74,30%
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	49%
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	4.121
		4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,51%
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	11%
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	98,02%
		2. APM SD/SDLB	82,88%
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	82,40%
		4. APM SMP/SMPLB	73,07%
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	82,15%
		6. APM SMA/SMK/SMLB	69,49%
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,88
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,57
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,5 tahun
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	37.851
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	63,10%
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	72%
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	68%
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	81,83%
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	58,27%
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,35%
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,13%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	60%
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,7
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,7
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,7
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	73%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional 2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar 3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	55,70% 68,24% 70,50%
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	54.000
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional	35
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA 2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	* 6,6 dan 6,9
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya 2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	4 2.100
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	76
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	75

*Skor PISA diukur setiap tiga tahun sekali oleh OECD

Nama Program	Unit Kerja Pelaksana	Pagu Awal	Pagu Revisi
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal	Rp1.868.729.615.000,00	Rp1.709.012.724.000,00
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal	Rp194.197.187.000,00	Rp182.237.861.000,00
3. Pendidikan Dasar dan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp22.478.361.054.000,00	Rp22.037.843.859.000,00
4. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Rp1.853.571.781.000,00	Rp1.699.224.304.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan pengembangan	Rp1.099.443.458.000,00	Rp1.019.126.101.000,00
6. Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp403.437.274.000,00	Rp368.009.475.000,00
7. Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp9.998.328.836.000,00	Rp9.337.735.642.000,00
8. Pelestarian Budaya	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Rp1.927.057.813.000,00	Rp1.711.432.430.000,00



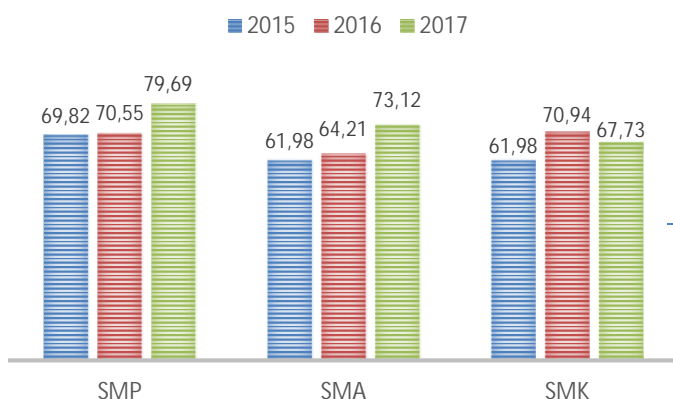
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENDIKBUD

A CAPAIAN KINERJA KEMENDIKBUD

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017, Kemendikbud menetapkan 16 sasaran strategis dengan 45 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut tingkat ketercapaian enam belas sasaran strategis Kemendikbud selama tahun 2017.

SS1 Meningkatnya perilaku positif siswa



Tren kenaikan Indeks Integritas UN SMP dan SMA/SMK 2015-2017

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100%
2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA /SMALB/SMK	70,55 dan 64,21	72 dan 74	79,69 dan 73,12 (sma) 67,73 (smk)	111 dan 99 (sma) 92 (smk)	77 dan 78	103% dan 94% (sma) 87% (smk)
3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100%

IKSS 1.1 “Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD” Khusus untuk siswa PAUD, perilaku positif siswa dilihat dari penanaman perilaku budi pekerti yang sangat mudah dilakukan pada usia dini. Membangun perilaku baik pada anak memerlukan keteladanan atau model dari guru dan perilaku baik yang ditanamkan pada anak sedini mungkin adalah dasar perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu satuan PAUD merupakan fondasi yang memberi dasar kuat bagi pembentukan karakter budi pekerti baik dan dilakukan melalui pembiasaan rutin.

Pada tahun 2017 telah keluar Peraturan Presiden No. 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di setiap satuan pendidikan dan tertuang dalam pasal 3 berbunyi *“PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab”*. PP No 87 tahun 2017 mendukung penerapan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan, sehingga capaian untuk indikator rata-rata nilai perilaku siswa PAUD adalah Baik sesuai dengan target renstra.

Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah belum adanya pelaporan dan evaluasi siswa PAUD yang tersistem dengan baik, sehingga cukup sulit mendapatkan data kuantitatif untuk melihat rata-rata perilaku siswa PAUD. Solusi yang akan dilaksanakan untuk kendala tersebut adalah mulai dibuatkannya instrumen Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan sistem yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan anak di Indonesia secara utuh.



Dengan didampingi guru sejumlah siswa PAUD sedang melakukan praktek sholat berjamaah untuk meningkatkan karakter terutama dalam nilai religius

IKSS 1.2 “Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK” diukur dengan tingkat kejujuran pelaksanaan ujian nasional. untuk tahun 2017 indeks integritas siswa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMP/SMPLB dari yang ditargetkan sebesar 72 berhasil terealisasi sebesar 79,69. Sedangkan jenjang SMA/SMALB/SMK dari target yang ditetapkan sebesar 74 baru berhasil terealisasi sebesar 73,12 (SMA) dan 67,73 (SMK).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,14 poin. Tercatat indeks integritas siswa SMP/SMPLB pada tahun 2016 sebesar 70,55. Selain terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 juga telah melampaui target akhir renstra 2019.

Indeks integritas ujian nasional menggambarkan capaian integritas sekolah-sekolah yang melaksanakan UN berbasis Kertas Pensil (UNKP). Capaian nilai integritas ujian nasional dikategorikan tinggi apabila mencapai nilai 70 s.d 100. Berdasarkan tabel capaian integritas, hampir pada semua jenjang capaian integritas ujian nasional tahun 2017 sudah mencapai kategori tinggi kecuali jenjang SMK.

Meskipun hampir semua jenjang masuk dalam kategori tinggi namun realisasi capaian integritas tahun 2017 masih ada yang di bawah target. Nilai integritas SMA/SMALB dan SMK pada tahun 2017 masing-masing 73,12 dan 67,73 dan berada di bawah target 74. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UNKP untuk jenjang SMA/SMALB dan SMK perlu didorong untuk lebih banyak lagi sekolah yang beralih ke UN Berbasis Komputer (UNBK) yang diyakini lebih berintegritas.

Peningkatan capaian indeks integritas yang melampaui target salah satunya disebabkan adanya transformasi massif mode penyelenggaraan ujian dari kertas dan pensil menjadi berbasis komputer. Pada jenjang SMA/MA/SMK, juga SMP/MTs tercatat peningkatan jumlah peserta UNBK dari 921.862 siswa di tahun 2016 menjadi 3.782.453 siswa di tahun 2017, meningkat 410%, demikian juga dengan jumlah sekolah penyelenggaraan UNBK meningkat dari 4381 sekolah di tahun 2016 menjadi 33.448 sekolah di tahun 2017, meningkat 763%. Secara rinci jumlah peserta UNBK per jenjang adalah sebagai berikut: 1.144.294 siswa SMA/MA (berasal dari 9.652 SMA/MA); 1.176.391 siswa SMK (berasal dari 9.829 SMK); serta 1.349.744 siswa SMP/MTs (berasal dari 11.096 SMP/MTs). Peningkatan jumlah peserta UNBK tercatat juga melampaui target sebesar 310%. Berikut tabel capaian IIUN setiap jenjang tahun 2016-2017:

Tabel capaian IIUN SMA/SMK/MA tahun 2016-2017

	Hasil IIUN SMA			Hasil IIUN SMK			Hasil IIUN MA		
	2016	2017	Perubahan	2016	2017	Perubahan	2016	2017	Perubahan
NEGERI & SWASTA	64.21	73.12	8.91	70.94	67.73	-3.21	61.12	74.68	13.56
NEGERI	63.27	71.32	8.05	69.35	64.46	-4.89	63.22	71.73	8.51
SWASTA	65.13	75.76	10.63	71.37	69.39	-1.98	60.90	74.85	13.95
UNBK	100.00	100.00	0	100	100	0	100	100	0
UNKP	64.21	73.12	8.91	70.94	67.73	-3.21	61.12	74.68	13.56

Tabel capaian IIUN SMP/MTs tahun 2016-2017

MODE	JENJANG	STATUS	IIUN		PERUBAHAN
			2017	2016	
UNBK & UNKP	SMP/MTS	NEGERI & SWASTA	77.96	69.65	8.31
		NEGERI	77.21	70.01	7.20
		SWASTA	78.56	69.37	9.19
	SMP	NEGERI & SWASTA	79.69	70.55	9.14
		NEGERI	76.94	69.82	7.11
		SWASTA	83.95	71.67	12.28
	MTS	NEGERI & SWASTA	74.16	67.69	6.47
		NEGERI	81.38	72.86	8.52
		SWASTA	73.47	67.19	6.28

Ketercapaian indikator kinerja indeks integritas siswa dikarenakan adanya dukungan beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Peralihan mode ujian nasional dari mode UNKP menjadi mode UNBK secara masif;
- Kampanye Ujian nasional yang mengedepankan kejujuran tidak semata prestasi;
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangannya untuk melaksanakan UNBK.

Target indikator kinerja berupa indeks integritas ujian nasional tercapai dengan sangat baik. Namun demikian, peningkatan IIUN disinyalir salah satunya karena tidak digunakannya lagi hasil UN dalam penentuan kelulusan. Jika sinyalemen ini benar, maka sangat disayangkan. Seharusnya perilaku baik tersebut tercermin pada setiap kondisi, tidak hanya saat konsekuensi yang ditimbulkan tidak beresiko. Oleh karena itu perlu indikator kinerja lainnya yang sifatnya lebih fundamental dan *sustainable* lintas kepentingan dan waktu.

IKSS 1.3 “Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM” realisasi capaiannya telah mencapai target. Keberhasilan pencapaian tersebut, tidak terlepas dari program/kegiatan yang dijalankan oleh Kemendikbud. Salah satu program yang dijalankan Kemendikbud untuk memperbaiki sikap siswa SD/SMP/SM adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Beberapa program yang dilakukan di tahun 2017 untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain : **1) pendidikan karakter bangsa kepada 32.896 siswa SD; 3.566 siswa SMP; 5.394 siswa SMA; 1.200 siswa SMK; dan 198 siswa SLB; 2) bantuan pembinaan ekstrakurikuler kepada 1.542 sekolah SD; 99 sekolah SMP; 158 sekolah SLB.**

Untuk mendukung perbaikan sikap siswa SD/SMP/SM, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dengan peraturan tersebut diharapkan setiap sekolah punya pola pembiasaan sikap positif kepada siswa. Dengan pembiasaan diharapkan akan menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual, nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat diri dan lingkungan, mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh,

Upaya lain yang dijalankan adalah Program Penguatan Karakter (PPK). PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, kelima nilai tersebut adalah **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas**. PPK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga/satuan pendidikan. Targetnya dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh siswa. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Implementasi program PPK dilakukan melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah, kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan diantaranya memulai hari dengan upacara bendera setiap senin, Apel, menyanyikan

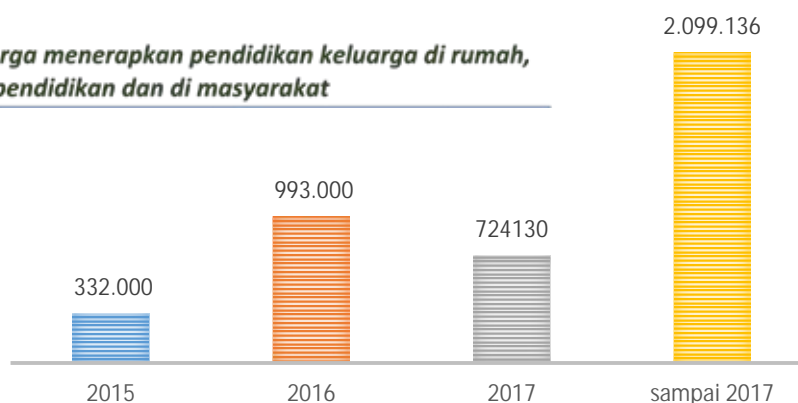
lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional dan daerah, berdoa bersama, membaca buku non pelajaran, cerita rakyat selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.

Sekolah sedang melakukan upacara bendera dengan menggunakan pakaian daerah, dengan tujuan pada diri siswa tumbuh nasionalisme dari keberagaman yang ada disekitarnya



SS2 Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan

Tren keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat	993.000	2.425.000	2.049.130	84,5	4.425.000	46%

IKSS 2.1 “jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga sampai dengan tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2.425.000 keluarga. Namun dari target tersebut baru terealisasi sebanyak 2.049.130, dengan persentase capaian 84,5%. Capaian untuk tahun 2017 sendiri ada sebanyak 724.130 keluarga yang menerapkan pendidikan keluarga.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami koreksi sebanyak 268.870 keluarga. Tercatat capaian tahun 2016 sebanyak 993.000 keluarga. Jika

dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka masih ada kekurangan sebanyak 2.375.870 keluarga untuk direalisasikan dua tahun ke depan. Tercatat target jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di sekolah, di satuan pendidikan pada akhir periode renstra 2019 sebanyak 4.425.000 keluarga.

Dalam meningkatkan pelibatan orang tua dan pemangku kepentingan dalam pendidikan, Kemendikbud melaksanakan beberapa program, diantaranya: Hari Pertama Sekolah (HPS) yaitu program dimana orang tua siswa diimbau untuk mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah; terbentuknya paguyuban orang tua; pelibatan orang tua pada kegiatan pentas kelas akhir tahun sekolah.

Kemendikbud terus berupaya meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan dalam pendidikan baik di rumah, di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kemendikbud melalui Ditjen PAUD dan DIKMAS melakukan beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017, antara lain:

- 1) Penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga di 60 Kab/kota dengan sasaran tenaga pendidik dan kependidikan, mitra serta orangtua/wali memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga pada 3.600 satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PNF).
- 2) Penyelenggaraan pendidikan keluarga di 4 Provinsi, menyasar sebanyak 810 satuan pendidikan (SMA, SMK, dan SLB) dan 79 Kab/kota dengan jumlah satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan PNF) sebanyak 3.950 dari unsur guru, kepala sekolah dan mitra serta pegiat pendidikan.
- 3) Bimbingan teknis Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan untuk komite sekolah dalam mendukung penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan dengan mengundang komite sekolah pada 1.623 satuan pendidikan di 34 Provinsi.

Tabel Partisipasi Satuan Pendidikan/Orang Tua Terlibat Pendidikan Tahun 2017				
No	Jenjang/Lembaga Pendidikan	Satuan/Lembaga Pendidikan	Jumlah Orangtua	Total
1	PAUD	1185	30	35.550
2	SD	1185	180	213.300
3	SMP	553	315	174.195
4	SMA	324	360	116.640
5	SMK	243	240	58.320
6	PKBM	400	25	10.000
7	SLB	81	20	1.620
8	PCP	-	280	280
9	Bimtek PPK	1625	1.625	1.625
Jumlah		3.971		611.531

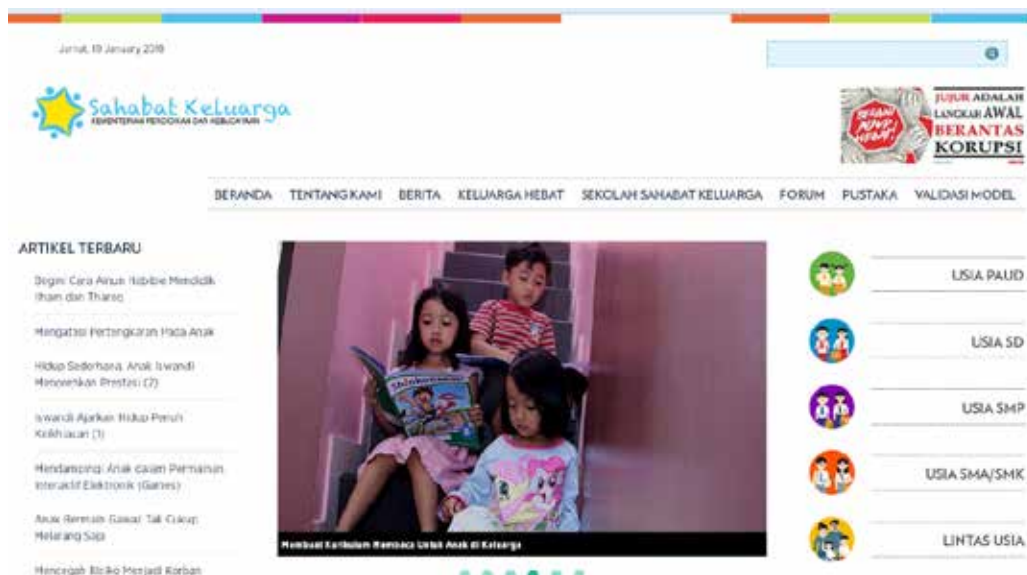
- 4) Bantuan penguatan pelaku pendidikan keluarga di 15 kabupaten/kota rintisan tahun 2016, dan 79 Kab/kota rintisan tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 47.079 orang dari unsur guru, pamong belajar, kepala sekolah dan mitra serta pegiat pendidikan.
- 5) Bimbingan teknis Komunitas masyarakat menyelenggarakan pendidikan keluarga di 50 lembaga dengan mengundang 150 pimpinan organisasi yang ada dimasyarakat, tokoh

masyarakat, tokoh agama, pengiat pendidikan, orang tua, anak dan remaja. Sehingga terdapat 7.500 keluarga memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga.

- 6) Bantuan penguatan dan rintisan penyelenggaraan pendidikan keluarga dan peningkatan ekosistem di satuan pendidikan pada 496 satuan pendidikan. Rata-rata dengan bantuan ini satuan pendidikan dapat melayani sebanyak 200 orangtua terlibat dalam program ini. Sehingga total orangtua yang terlayani dan kemudian mampu menerapkan pendidikan keluarga melalui program ini sebanyak 58.300 orang.

Selain melalui intervensi langsung seperti kegiatan-kegiatan di atas, strategi lain yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan dalam pendidikan antara lain melalui :

- 1) Seminar Nasional Pendidikan Keluarga dengan mengundang Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan dengan TP PKK untuk memperkuat implementasi penyelenggaraan pendidikan keluarga.
- 2) Fasilitasi tim kelompok kerja (POKJA) pendidikan tingkat provinsi dan 155 Kab/kota rintisan pendidikan keluarga tahun 2015 & 2016, serta pemberian bantuan peningkatan kapasitas POKJA pendidikan keluarga dengan menysasar sebanyak 13 pokja provinsi.
- 3) Sosialisasi dan implementasi penyelenggaraan pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan dan mitra (penilik, pengawas satuan pendidikan, serta organisasi masyarakat pegiat pendidikan keluarga) yang telah mengikuti program penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
- 4) Sosialisasi implementasi pendidikan keluarga melalui laman sahabat keluarga (<https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/>). Sampai tertanggal 28 Desember 2017 telah dikunjungi oleh 214.858 viewers. Melalui laman sahabat keluarga, berbagai program serta layanan penyelenggaraan pendidikan keluarga dapat tersosialisasi di kepada pengunjung laman.



Bentuk partisipasi aktif dalam hal ini adalah ikut serta mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan keluarga dan melibatkan orangtua siswa dalam satuan pendidikan, baik satuan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, maupun Pendidikan Nonformal.

Beberapa tantangan/permasalahan dalam peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan dalam pendidikan antara lain:

- 1) besarnya sasaran potensial pendidikan keluarga sebesar yang tersebar dari tingkat jenjang usia PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, dan Pendidikan Non Formal;
- 2) persepsi orang tua yang menyerahkan seluruh proses pendidikan kepada sekolah masih tinggi, sehingga partisipasi orang tua dalam keterlibatan orang tua masih rendah;
- 3) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pendidikan keluarga belum diimplementasikan secara maksimal pada satuan pendidikan. Hal ini disebabkan Permendikbud tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan keluarga baru disahkan akhir tahun.

Tantangan ke depan adalah meyakinkan pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/kota) melalui POKJA pendidikan keluarga untuk menerapkan manajemen terbaik serta orientasi kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan agar mampu dan meningkatkan diri dalam penerapan pendidikan keluarga.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kompetensi tim kelompok kerja tingkat provinsi dan kab/kota dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas pengawas sekolah, penilik pendidikan nonformal pelatih/fasilitator pendidikan keluarga dalam rangka pendampingan asistensi dan supervisi pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- 2) Perluasan bentuk praktik baik pendidikan keluarga melalui laman "sahabat Keluarga" dengan mengisi laman dengan berbagai konten;
- 3) Sosialisasi Permendikbud tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan keluarga baru disahkan pada akhir tahun melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh direktorat dan telah disiapkan peraturan turunan yaitu petunjuk teknis kemitraan keluarga dengan satuan pendidikan.

SS3 Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga kependidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	68,42%	67,70%	68,42%	101,1	82,40%	83%

IKSS 3.1 “Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik”

realisasi tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 67,70% atau 1.978.753 orang berhasil terealisasi sebesar 68,42% dengan persentase capaian kinerja 101,1%. Angka realisasi sebesar 68,42% merupakan pengukuran kinerja guru tahun 2016, karena untuk tahun 2017 sendiri tidak dilakukan pengukuran indikator kinerja ini namun berfokus pada perubahan-perubahan dalam penilaian kinerja guru.

Sedangkan untuk mencapai target akhir renstra 2019 masih berproses. Target akhir renstra di tahun 2019 sebesar 82.4% atau 2.426.938 orang. Sehingga capaian 2017 terhadap target akhir renstra 2019 adalah 83,03%.

Pada tahun 2016, Kemendikbud telah mengidentifikasi ada 1.999.821 guru sudah mempunyai nilai PKG minimal baik dari jumlah guru sebanyak 2.922.826.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan PKG telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Bagi guru, PKG merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Bila mengacu kepada empat kompetensi guru, maka PKG utamanya menilai terhadap kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

PKG merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru yang berdampak pada peningkatan mutu peserta didik yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PKG menjadi dasar memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Aktivitas PKG tersebut dilakukan setiap tahun. Lebih lanjut dalam tata kelola guru terdapat dua aktivitas dalam sistem karir fungsional kelola guru yang mensyaratkan nilai PKG minimal baik yaitu (1) pada setiap kenaikan jenjang karir fungsional guru; (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru yang dinilai dalam masa program induksi. Berdasar hal pada tahun 2016 telah dapat mengidentifikasi 68,42% atau 1.999.797 guru telah berkinerja baik.

Selain itu pada tahun 2017, terkait indikator ini dilakukan beberapa perubahan. Hal mendasari adanya perubahan tersebut adalah menyangkut implementasi di lapangan diantaranya (1) hasil penilaian kinerja guru belum menunjukkan kinerja guru yang sesungguhnya; (2) hasil penilaian masih subjektif; (3) jenis guru lainnya yang kurang cocok dengan instrumen PKG yang sudah ada, dan; (4) perubahan tugas guru TIK dengan berlakunya Permendikbud Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 68 tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka di tahun 2017 dilakukan perubahan dalam PKG, khususnya pada penilaian dari berbagai aspek/sisi dan penambahan instrumen. Hal ini sejalan

dengan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Amanat dalam PP tersebut adalah adanya penilaian dari berbagai sisi atau 360 derajat untuk mengukur kinerja dari pegawai. PKG yang ada masih dinilai satu sisi atau dari *point of view* kepala sekolah/penilai. Oleh karena itu dalam perubahan pedoman penilaian kinerja guru ditambahkan instrumen untuk survei atau kepuasan oleh orangtua/siswa, kolega, dan *stakeholder*. Kemudian, penilaian kinerja juga mempertimbangkan kehadiran dari guru tersebut di kelas.

Walaupun pada tahun 2017, PKG sedang dalam proses revisi instrumen penilaian, namun program terkait pengembangan karir yang selaras dengan PKG masih tetap dilakukan. Program dimaksud adalah proses bimtek dan sosialisasi angka kredit serta penyegaran bagi bagi Tim Penilai Angka Kredit pusat dan daerah. Selain itu pada tahun 2017 ini terjadi pula perubahan dalam pengelolaan penilaian angka kredit untuk guru golongan IV B keatas. Sebelumnya pengelolaan penilaian angka kredit tersebut dilakukan di pusat dalam hal ini Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, namun tahun 2017 mulai dilakukan oleh UPT Kemendikbud di daerah yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan.

SS4 Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan

Tren Kenaikan peran aktif pelaku budaya 2015-2017



Total Pelaku Budaya berperan aktif melestarikan kebudayaan



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.233.120	1.400.000	1.476.271	105	1.720.000	86%

IKSS 4.1 “pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan budaya” realisasi capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1.400.000 pelaku budaya terealisasi sebanyak 1.476.271 pelaku budaya dengan persentase capaian sebesar 105,44%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2016 ada sebanyak 1.233.120 pelaku budaya yang berperan

aktif dalam melestarikan kebudayaan meningkat menjadi 1.476.271 pelaku budaya pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019, maka masih ada kekurangan 243.729 pelaku budaya untuk dicapai. Tercatat jumlah pelaku budaya yang berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan ditargetkan sebanyak 1.720.000 orang di tahun 2019. Dengan sisa waktu sebanyak dua tahun, Kemendikbud yakin bahwa target tahun 2019 dapat tercapai.

Capaian sebanyak 1.476.271 tersebut berasal dari tujuh bidang garapan, yaitu bidang cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi dan kepercayaan.

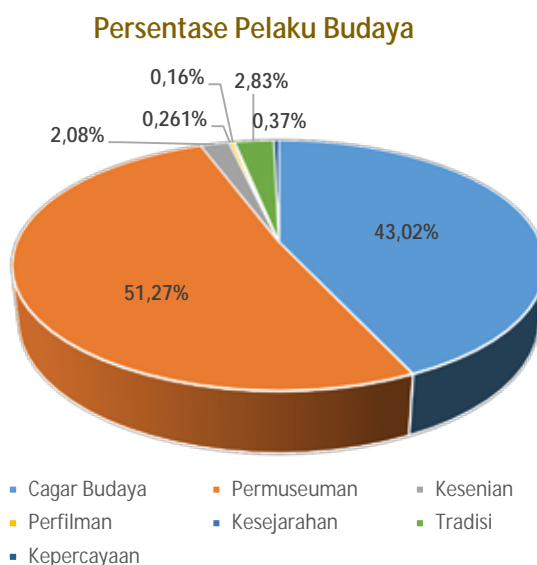
Berikut rincian pelaku budaya yang melestarikan budaya tahun 2017 dari tujuh bidang garapan.

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PELAKU BUDAYA BIDANG:							JUMLAH
		Cagar Budaya	Permuseuman	Kesenian	Perfilman	Kesejarahan	Tradisi	Kepercayaan	
1	Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman	6.733	26.205						32.938
2	Pembinaan Kesenian			25.172					25.172
3	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi						21.975	3.055	25.030
4	Pengembangan Sejarah					765			765
5	Pengembangan Diplomasi Budaya						306		306
6	Pengembangan Galeri Nasional			439					439
7	Pengelolaan Permuseuman	570.300	730.602	157	119	77	12		1.301.267
8	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	58.085		36			2.500		60.621
9	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional		70	4.287	3.737	1.538	16.965	2.475	29.072
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan			661					661
	Sub Jumlah	635.118	756.877	30.752	3.856	2.380	41.758	5.530	1.476.271
	JUMLAH								1.476.271

Ada lima bidang garapan yang masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku budaya dalam pelestarian kebudayaan sebagai prioritas. Kelima bidang tersebut adalah kesejarahan, perfilman, kepercayaan, kesenian, dan tradisi.

Meskipun realisasi sudah mencapai target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan di antaranya:

1. Masih rendahnya peran pemerintah daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Masih rendahnya kesadaran dan peran Badan Usaha Swasta melalui *corporate social responsibility (CSR)* dalam pelestarian kebudayaan dan pemberdayaan pelaku budaya;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan.



Upaya peningkatan peran pelaku budaya untuk berperan aktif dalam pelestarian kebudayaan, melalui:

1. Peningkatan kesadaran Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan dan pemberdayaan pelaku budaya melalui peningkatan ketersediaan peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan;
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha swasta untuk pemberdayaan pelaku budaya dan pelestarian asset kebudayaan melalui kerjasama dalam bentuk donasi yang tidak mengikat;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan dalam pemajuan peradaban melalui sosialisasi dalam pelestarian kebudayaan.

Kegiatan Prioritas

a. Peningkatan Kesadaran Pelaku Budaya dalam Pelestarian Kebudayaan

1. Registrasi Nasional Cagar Budaya

Sejumlah siswa sedang mengunjungi Candi Plausan. Kunjungan ke cagar budaya akan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian kebudayaan



Berikut rekapitulasi hasil registrasi nasional cagar budaya nasional sampai dengan tahun 2017 mulai dari tahap pencatatan, penetapan, rekomendasi.



Pencatatan dan penetapan cagar budaya tahun 2017, dengan hasil pencatatan sebanyak 9.626 cagar budaya, dan penetapan sebanyak 16 Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 27 cagar budaya direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Berikut rincian cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tahun 2017.

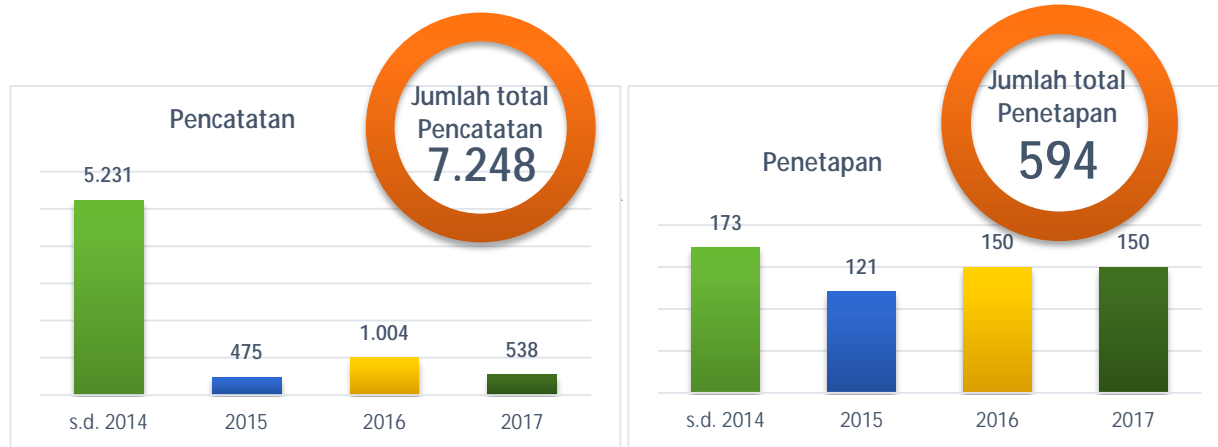
PENETAPAN CAGAR BUDAYA NASIONAL 2017

No	Nama Cagar Budaya	Keterangan
1	Gedung Sate	005/M/2017, tanggal 12 Januari 2017
2	Taman Kepurbakalaan Sunyaragi	006/M/2017, tanggal 12 Januari 2017
3	Stadion Sriwedari	
4	Museum Kereta Api Ambarawa	006/M/2017, tanggal 12 Januari 2017
5	Percandian Dieng	007/M/2017, tanggal 12 Januari 2017
6	Kantor Pos Besar Bandung	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
7	Museum Geologi	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
8	Hotel Savoy Homann Bandung	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
9	Gedung Dwi Warna	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
10	Observatorium Bosscha	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
11	Benteng Van Der Wijck	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
12	Gereja Immanuel Gambir	184/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
13	Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung	186/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
14	Permukiman, Pemandian, dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo	186/M/2017, tanggal 6 Juli 2017
15	Rumah Sakit Cikini (Khusus Eks Rumah Raden Saleh)	189/M/2017, tanggal 10 Juli 2017
16	Rumah Hadji Oemar Said Tjokroaminoto	189/M/2017, tanggal 10 Juli 2017
17	Masjid Istiqlal	Rekomendasi
18	Gereja Sion	Rekomendasi
19	Benteng Nieuw Victoria	Rekomendasi
20	Peningki Lama	Rekomendasi
21	Masjid Kuno Bayan Beleg	Rekomendasi
22	Benteng Vastenburg	Rekomendasi
23	Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Rekomendasi
24	Kompleks Percandian Bumiayu	Rekomendasi
25	Loji Gandrung	Rekomendasi
26	Kompleks Pura Tirta Empul	Rekomendasi
27	Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi	Rekomendasi
28	Pura Goa Gajah	Rekomendasi
29	Laweyan	Rekomendasi
30	Kraton Yogyakarta	Rekomendasi
31	Gua Harimau	Rekomendasi
32	Kompleks Percandian Bumiayu	Rekomendasi
33	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II	Rekomendasi
34	Panti Wangka	Rekomendasi
35	Kotakapur	Rekomendasi
36	Bukit Siguntang	Rekomendasi
37	Benteng Oranje	Rekomendasi
38	Benteng Otanaha	Rekomendasi
39	Keraton Sumenep	Rekomendasi
40	Puro Mangkunegaran	Rekomendasi
41	Tugu Lilin	Rekomendasi
42	Gereja Kyai Sadrah	Rekomendasi
43	Masjid Baiturrahman	Rekomendasi

2. Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya takbenda

Warisan budaya takbenda Indonesia dengan kategori pencatatan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Tradisi Lisan | h. Teknologi Tradisional |
| b. Bahasa | i. Arsitektur |
| c. Naskah Kuno | j. Kain tradisional |
| d. Permainan Tradisional | k. Kuliner tradisional |
| e. Seni Tradisi | l. Pakaian adat |
| f. Upacara/Ritus | m. Senjata Tradisional |
| g. Kearifan Lokal | |



150 warisan budaya takbenda Indonesia yang ditetapkan tahun 2017

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
1	Aceh	Landok Sampot	Seni Pertunjukan
2	Aceh	Rapa'i Pase	Seni Pertunjukan
3	Aceh	Payung Mesikhat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4	Aceh	Pasenatken	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
5	Aceh	Grimpheng	Seni Pertunjukan
6	Sumatera Utara	Genderang Sisibah	Seni Pertunjukan
7	Sumatera Utara	Holat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8	Sumatera Utara	Toge Panyabungan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
9	Sumatera Utara	Tari Gubang	Seni Pertunjukan
10	Sumatera Utara	Babae	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11	Sumatera Barat	Randai	Seni Pertunjukan
12	Bengkulu	Bekejai (Upacara Perkawinan Suku Rejang)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
13	Bengkulu	Tari Kejai	Seni Pertunjukan
14	Sumatera Selatan	Rumah Besemah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15	Sumatera Selatan	Lak	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16	Sumatera Selatan	Tari Penguton	Seni Pertunjukan
17	Jambi	Tari Elang	Seni Pertunjukan
18	Jambi	Tomboi Sialong/Tomboi Ngambek Rapa	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
19	Jambi	Sebelik Sumpah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20	Jambi	Ambung Orang Rimbo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21	Jambi	Cawot	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
22	Jambi	Ubat Ramuon Orang Rimbo	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
23	Jambi	Belangun Orang Rimbo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
24	Jambi	Hompongong	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
25	Jambi	Musik Gambang Dano Lamo	Seni Pertunjukan
26	Jambi	Tari Kadam	Seni Pertunjukan
27	Bangka Belitung	Gangan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
28	Bangka Belitung	Antu Bubu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
29	Riau	Tunjuk Ajar Melayu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
30	Riau	Sijobang "Buwong Gasiong"	Seni Pertunjukan
31	Riau	Silat Perisai	Seni Pertunjukan
32	Riau	Zapin Api	Seni Pertunjukan
33	Riau	Zapin Meskom	Seni Pertunjukan
34	Riau	Manongkah	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
35	Riau	Perahu Beganduang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
36	Riau	Batobo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
37	Riau	Rumah Lontiok	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
38	Riau	Selembayung Riau	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
39	Riau	Onduo Rokan	Seni Pertunjukan
40	Kepulauan Riau	Bejenjang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
41	Kepulauan Riau	Tari Inai	Seni Pertunjukan
42	Lampung	Nyambai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
43	Lampung	Bediom	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
44	Lampung	Tari Bedayou Tulang Bawang	Seni Pertunjukan
45	Banten	Golok Sulangkar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
46	Banten	Golok Ciomas	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
47	Banten	Zikir Saman Banten	Tradisi dan Ekspresi Lisan
48	Banten	Patingtung	Seni Pertunjukan
49	Banten	Wayang Garing Serang	Seni Pertunjukan
50	DKI Jakarta	Kebaya Kerancang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51	DKI Jakarta	Batik Betawi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
52	DKI Jakarta	Topeng Tunggal	Tradisi dan Ekspresi Lisan
53	DKI Jakarta	Penganten Sunat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
54	DKI Jakarta	Rebana Biang	Seni Pertunjukan

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
55	DKI Jakarta	Hadroh Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
56	DKI Jakarta	Dodol Betawi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
57	DKI Jakarta	Silat Cingkrik	Seni Pertunjukan
58	Jawa Barat	Gembyung	Seni Pertunjukan
59	Jawa Barat	Iket Sunda	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
60	Jawa Barat	Kolecer Jawa Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
61	Jawa Barat	Leuit	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
62	Jawa Barat	Nyangku	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
63	DI Yogyakarta	Beksan Lawung Ageng Keraton Yogyakarta	Seni Pertunjukan
64	DI Yogyakarta	Beksan Bandabaya Pura Pakualaman	Seni Pertunjukan
65	DI Yogyakarta	Badui	Seni Pertunjukan
66	DI Yogyakarta	Khuntulan Yogyakarta	Seni Pertunjukan
67	DI Yogyakarta	Montro	Seni Pertunjukan
68	DI Yogyakarta	Rinding Gumbreg Gunung Kidul	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
69	DI Yogyakarta	Srandul	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
70	DI Yogyakarta	Panjidur Yogyakarta	Seni Pertunjukan
71	DI Yogyakarta	Wayang Topeng Pedalangan	Seni Pertunjukan
72	DI Yogyakarta	Bancakan Bayi Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
73	DI Yogyakarta	Tata Cara Palakrama Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
74	DI Yogyakarta	Beksan Golek Menak	Seni Pertunjukan
75	DI Yogyakarta	Srimpi Rangga Janur	Seni Pertunjukan
76	DI Yogyakarta	Dadung Awuk	Seni Pertunjukan
77	DI Yogyakarta	Blangkon Yogyakarta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
78	DI Yogyakarta	Krumpyung Kulon Progo	Seni Pertunjukan
79	DI Yogyakarta	Wedang Uwuh Imogiri	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
80	DI Yogyakarta	Tenun Serat Gamplong	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
81	Jawa Tengah	Tempe Jawa Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
82	Jawa Tengah	Barongan Blora	Seni Pertunjukan
83	Jawa Tengah	Gethuk Goreng Sokaraja	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
84	Jawa Timur	Sandhur Manduro	Seni Pertunjukan
85	Jawa Timur	Nyadêr	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
86	Jawa Timur	Ceprotan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
87	Jawa Timur	Jamasan Gong Kyai Pradah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
88	Jawa Timur	Damar Kurung	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
89	Kalimantan Barat	Nyangahatn	Tradisi dan Ekspresi Lisan
90	Kalimantan Barat	Jonggan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
91	Kalimantan Barat	Sape Kalimantan Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
92	Kalimantan Barat	Tumpang Negeri	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
93	Kalimantan Barat	Tari Pinggan Sekadau	Seni Pertunjukan
94	Kalimantan Barat	Gawai Dayak Kalimantan Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
95	Kalimantan Barat	Tenun Corak Insang Kota Pontianak	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
96	Kalimantan Barat	Arakan Pengantin Kota Pontianak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
97	Kalimantan Barat	Saprahan Melayu Kota Pontianak	Tradisi dan Ekspresi Lisan
98	Kalimantan Selatan	Tari Topeng Banjar	Seni Pertunjukan
99	Kalimantan Selatan	Kuda Gipang	Seni Pertunjukan
100	Kalimantan Selatan	Sinoman Hadrah	Seni Pertunjukan
101	Kalimantan Selatan	Wayang Gung	Seni Pertunjukan
102	Kalimantan Selatan	Balogo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
103	Kalimantan Tengah	Nahunan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
104	Kalimantan Tengah	Wadian Dadas	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
105	Kalimantan Timur	Ronggeng Passer	Seni Pertunjukan
106	Kalimantan Utara	Jatung Utang	Seni Pertunjukan
107	Kalimantan Utara	Lalatip	Seni Pertunjukan
108	Kalimantan Utara	Penurunan Padaw Tuju Dulung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
109	Bali	Betutu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
110	Bali	Kare-kare Tenganan Pegringsingan	adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
111	Bali	Gamelan Selonding	adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
112	Bali	Usaba Dangsil	adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
113	Bali	Usaba Sumbu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
114	Bali	Siat Tipat Bantal	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
115	Bali	Leko	Seni Pertunjukan
116	Nusa Tenggara Barat	Kareku Kande	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
117	Nusa Tenggara Timur	Bonet	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
118	Sulawesi Selatan	Maccera Manurung Kalupini (Enrekang)	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
119	Sulawesi Selatan	Tari Salonreng	Seni Pertunjukan
120	Sulawesi Selatan	Barongko	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
121	Sulawesi Selatan	Balla To Kajang (Rumah Kajang)	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
122	Sulawesi Selatan	Kelong Pakkiyo Bunting	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
123	Sulawesi Selatan	Passura'	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
124	Sulawesi Barat	Lipa Saqbe Mandar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
125	Sulawesi Tenggara	Kantola	Tradisi dan Ekspresi Lisan
126	Sulawesi Tenggara	Istana Malige Buton	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
127	Sulawesi Tenggara	Kaago-Ago	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
128	Sulawesi Utara	Masamper	Seni Pertunjukan

No	PROVINSI	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN
129	Sulawesi Utara	Tinutuan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
130	Sulawesi Tengah	Kaledo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
131	Sulawesi Tengah	Kakula	Tradisi dan Ekspresi Lisan
132	Gorontalo	Paiya Lohungo Lopoli	Tradisi dan Ekspresi Lisan
133	Gorontalo	Tuja'i	Tradisi dan Ekspresi Lisan
134	Gorontalo	Wunungo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
135	Gorontalo	Tidi Lopolopalo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
136	Gorontalo	Palebohu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
137	Maluku	Minyak Kayu Putih	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
138	Maluku	Dansa Tali	Seni Pertunjukan
139	Maluku	Enbal	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
140	Maluku	Tahuri	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
141	Maluku Utara	Sasadu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
142	Papua	Ndambu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
143	Papua	Yu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
144	Papua	Pokem	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
145	Papua Barat	Fararior	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
146	Papua Barat	Farbakbuk	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
147	Papua Barat	Kuk Kir Kna	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
148	Papua Barat	Mansorandak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
149	Papua Barat	Mbaham-Matta/Ko On Kno Mi Mombi Du Opona	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
150	Papua Barat	Anu Beta Tubat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

b. Dukungan Pemerintah Untuk Pelestarian Budaya Yang Diinisiasi Pelaku Budaya

1. Revitalisasi dan Pembangunan Museum

Berikut 16 museum yang direvitalisasi dan 10 museum dibangun selama tahun 2017.

No	Museum yang Direvitalisasi	Museum Yang di Bangun
1.	Museum Etnobotani	Museum Song Terus - Kab. Pacitan
2.	Museum Tino Sidin	Museum Islam Nusantara - Kab. Jombang
3.	Museum Universitas Airlangga	Museum Situs Samedo - Kab. Tegal
4.	Museum Radyapustaka	Museum Batik - Tmii Dki Jakarta
5.	Museum Kain Cual	Museum Situs Gua Harimau - Kab. Ogan Komering Ulu
6.	Museum Sunda Kecil	Museum Keris - Kota Surakarta
7.	Museum Kota Tanjung Pinang	Museum Subak Gianyar (Tp)
8.	Museum Kab. Mamasa	Museum Coelacanth Ark (Tp)
9.	Museum Sawah Lunto	Museum Natuna (Tp)
10.	Museum Mpu Purwa, Kota Malang	Museum Deli Serdang (Tp)
11.	Museum Provinsi Jambi	
12.	Museum Provinsi Riau	
13.	Museum Budaya Kab Sumba Barat Daya	
14.	Museum Tenggarong, Provinsi Kaltim	
15.	Museum Bintan	
16.	Museum Kota Makassar	

2. Revitalisasi Cagar Budaya

Berikut enam cagar budaya yang berhasil direvitalisasi pada tahun 2017.

No	Nama Cagar Budaya
1	Keraton Cirebon
2	Gedung Indonesia Menggugat, Bandung
3	Situs Kaplongan Indramayu
4	Situs Samudra Pasai
5	Keraton Kadriyah, Kota Pontianak
6	Rumah Kampoeng Kapitan, Prov. Sumsel

Revitalisasi Cagar Budaya Monumen Situs Samudra Pasai



3. Revitalisasi Taman Budaya

Sejak tahun 2012-2015, Revitalisasi Taman Budaya telah tersusun 25 materplan dan *Detail Engineering Desain (DED)*, penguatan program, dan penguatan kualitas sumber daya manusia, dan revitalisasi fisik terhadap 6 Taman Budaya yaitu: Taman Budaya Banda Aceh; Taman Budaya Lampung; Taman Budaya Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Taman Budaya Jawa Barat; Taman Budaya Jawa Tengah; dan Taman Budaya Nusa Tenggara Barat.

Revitalisasi fisik Taman Budaya pada tahun 2016 telah dihasilkan 3 Taman Budaya, yaitu: Taman Budaya Jambi; Taman Budaya Maluku; dan Taman Budaya Sulawesi Tengah.

Revitalisasi Taman Budaya tahun 2017 telah dihasilkan 4 Taman Budaya yaitu: **Taman Budaya Lampung; Taman Budaya Jambi; Taman Budaya Maluku; dan Taman Budaya Sulawesi Tengah.**

4. Bantuan Pemerintah Untuk Pelestarian Kebudayaan tahun 2017

218 komunitas budaya; 81 komunitas sejarah; 67 desa adat, alat Kesenian di 221 sekolah; Laboratorium Seni Budaya dan Film 4 sekolah

c. Sinergi Kerjasama Pelaku Budaya, Masyarakat, dan Pemerintah, Sebagai Satu Kesatuan Ekosistem Kebudayaan

1. Europalia Arts Festival Indonesia

Europalia adalah sebuah asosiasi internasional non-profit yang berdiri sejak tahun 1969 di bawah naungan Raja Belgia dan hingga saat ini telah menyelenggarakan 25 kali Festival Internasional setiap dua tahunan (*biennale*) dengan menampilkan budaya beberapa negara. Festival Europalia ini berlangsung selama 4 bulan (Oktober 2017 hingga Januari 2018) di 39 kota dan 7 negara di Eropa, yaitu: Austria, Belanda, Belgia, Perancis, Inggris, Polandia, dan Jerman.



Kehadiran Festival Europalia Indonesia diharapkan dapat menduniakan keragaman budaya Indonesia yang toleran, demokratis dan modern namun tetap menjunjung tinggi khasanah seni dan budaya; memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara di Eropa; meningkatkan *people to people understanding and contact*; dan menunjukkan pada publik dalam negeri bahwa kebudayaan Indonesia diakui dunia.

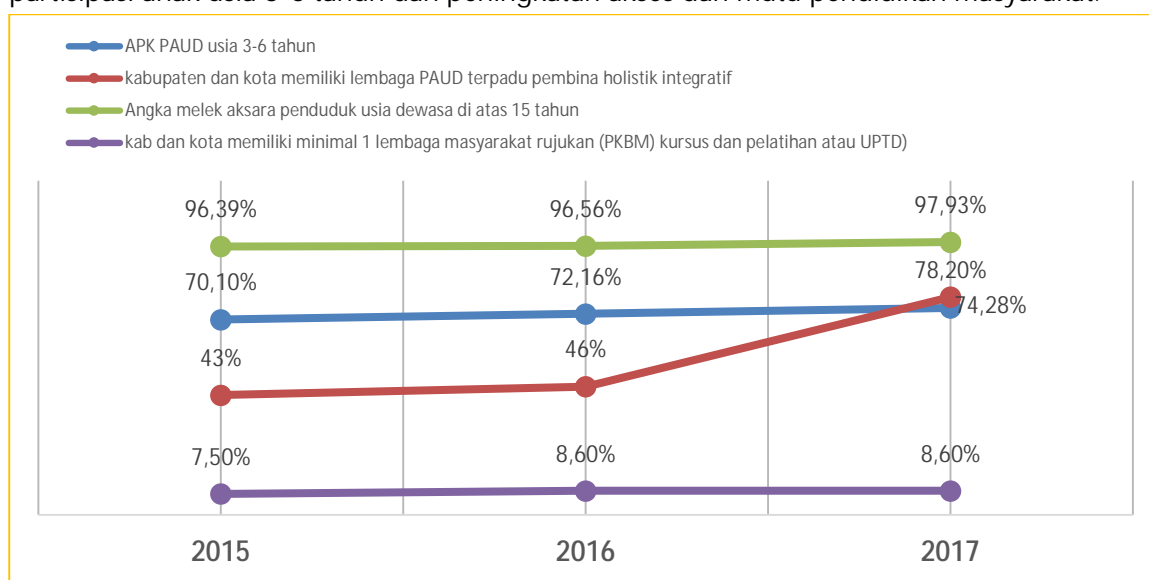
2. Pekan Budaya Indonesia 2017

Dengan mengusung tema **"Ragam Budaya untuk Indonesia Berkarakter"**, Pekan Budaya Indonesia 2017 melibatkan seluruh pelaku budaya yang tergabung dalam berbagai komunitas adat dan seni, termasuk seni jalanan yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Pekan Budaya Indonesia 2017 dilaksanakan di lokasi Taman Budaya,

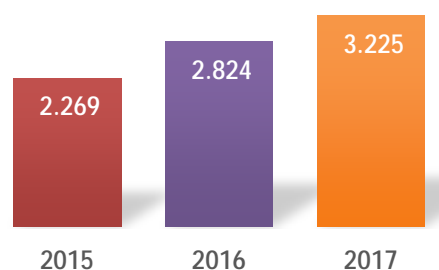
Museum Negeri Provinsi, dan sepanjang pantai di Palu, Sulawesi Tengah. Terdapat berbagai macam kegiatan yang disuguhkan dalam Pekan Budaya Indonesia 2017, meliputi pameran, workshop, diskusi budaya, seminar, bedah buku, aneka lomba, dan berbagai pentas. Bioskop Keliling juga turut meramaikan rangkaian kegiatan Pekan Budaya Indonesia 2017 di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

SS5 Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Akses masyarakat menjangkau pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dengan meningkatnya angka partisipasi anak usia 3-6 tahun dan peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat.



Tren Kenaikan lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi



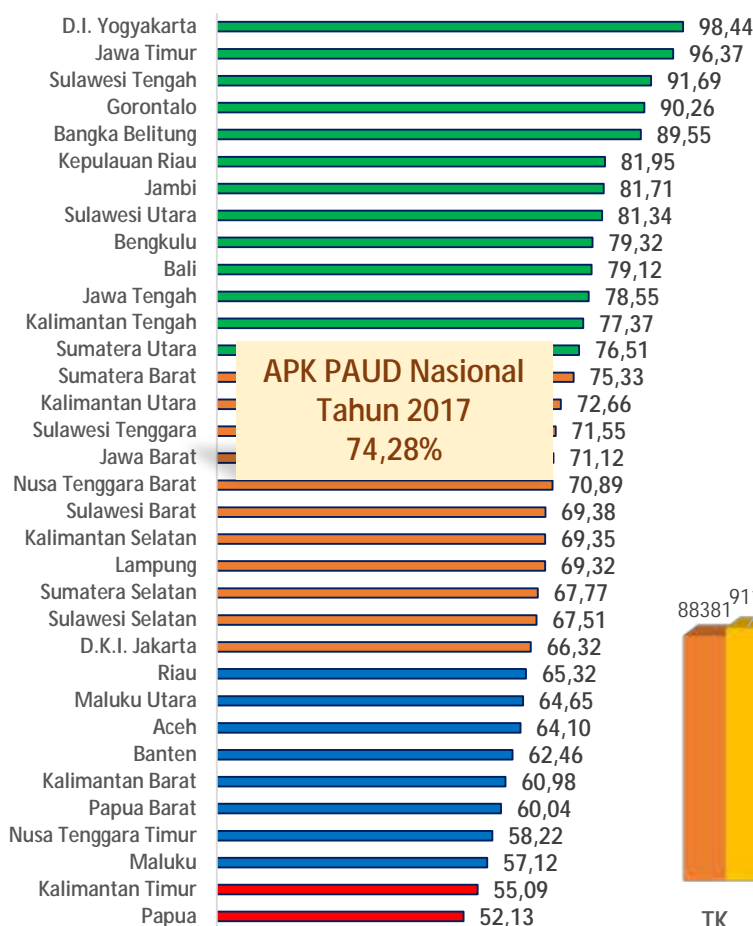
Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. APK PAUD usia 3-6 tahun	72,16%	74,30%	74,28%	100	78,70	94%
2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	46%	49%	78,2%	159	54,60	143%
3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	2.824	4.121	3.225	78	7.871	41%
4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,56%	96,51%	97,93	101,5	96,73	101%
5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM) kursus dan pelatihan atau UPTD	8,6%	11%	8,6%	78,2	15,60	55%

IKSS 5.1 “APK PAUD usia 3-6 tahun” mencapai 74,28% di tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja tahun 2017 merupakan dampak dari meningkatnya dana BOP PAUD yang dilokasikan di kab/kota/prov DKI Jakarta. Peningkatan dana DAK BOP PAUD cukup signifikan, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp2.281.912.000.000,00 naik menjadi Rp3.358.504.200.000,00 pada tahun 2017. Pencapaian APK PAUD usia 3-6 tahun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 cukup tinggi dengan kenaikan 2,94% yaitu dari 72,16% menjadi 74,28%, dan angka absolute jumlah anak usia 3-6 yang terlayani mencapai 14.286.856 anak dari total 19.234.500 anak.

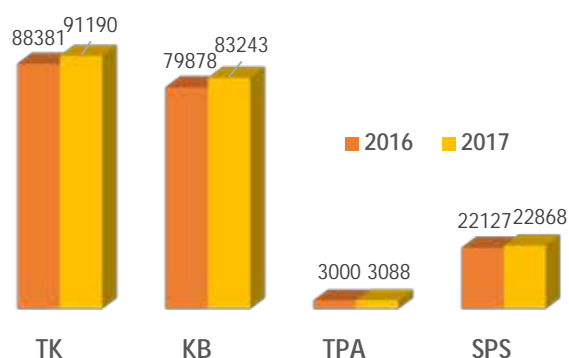
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019, maka masih ada kekurangan sebesar 4,42% untuk dicapai di tahun 2019. Tercatat target APK PAUD di tahun 2019 atau akhir periode renstra sebesar 78,70%. Dengan rata-rata kenaikan APK PAUD 2% lebih pertahun, maka Kemendikbud yakin target tersebut dapat tercapai.

APK PAUD usia 3-6 tahun dapat mencapai target karena didukung oleh kegiatan yang menunjang perluasan akses diantaranya Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD di daerah 3T sebanyak 15 lembaga di 11 provinsi, serta Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembina sebanyak 8 lembaga. Kegiatan Perluasan akses lainnya yang menunjang pada pencapaian APK PAUD usia 3-6 tahun adalah Bantuan PAUD Baru yang khusus di daerah 3T, terealisasi sebanyak 160 lembaga yang tersebar di 20 provinsi.

Grafik APK PAUD Per Provinsi



Grafik peningkatan jumlah sekolah PAUD Sederajat 2016-2017



Pembangunan PAUD baru yang didukung oleh dana pemerintah cukup memberikan dampak yang besar dalam perkembangan jumlah lembaga PAUD. Hal ini membuktikan bahwa dana stimulan dapat mendorong partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, dan peran serta daerah dalam perluasan akses PAUD diberikan apresiasi oleh pemerintah melalui kegiatan Anugrah PAUD Nasional.

Kendala dalam pencapaian target APK PAUD usia 3-6 tahun adalah data yang dipakai belum dapat menggunakan data DAPODIK, tetapi masih menggunakan data konfirmasi ke daerah. Hal ini dikarenakan DAPODIK hanya mencatat lembaga yang telah mempunyai NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional), sedangkan masih banyak satuan PAUD yang belum terdata di DAPODIK terutama lembaga PAUD yang keberadaannya di daerah terpencil dan minim akses internet. Selain daripada itu masih ada lembaga dimana binaannya belum masuk ke dinas pendidikan karena menyatu dengan rumah peribadatan, misalnya di bawah dewan masjid, gereja maupun tempat peribadatan lainnya. Bahkan dengan maraknya dana desa banyak lembaga PAUD yang berasal dari anggaran dana desa belum tersentuh pendataan dan pembinaan dari dinas setempat.

Diharapkan di tahun mendatang penataan kelembagaan akan lebih ditingkatkan, terutama dalam hal pembinaan kelembagaan yang belum terjangkau oleh dinas pendidikan setempat dengan SPM mengenai PAUD telah disetujui oleh pemerintah.

IKSS 5.2 “kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif” pada tahun 2017 realisasi kinerjanya melampaui target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 49% (251 kab/Kota) berhasil terealisasi sebesar 78,2% (402 Kab/Kota), dengan persentase pencapaian kinerja 159%. Pencapaian target ini didukung oleh adanya kegiatan pelatihan kurikulum 2013, pendampingan dan magang bagi pendidik di lembaga yang telah ditunjuk untuk menjadi PAUD percontohan.

Dibandingkan tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,2%. Kenaikan capaian tersebut disebabkan fokus pemerintah dalam PAUD pada pendidikan yang berkualitas dan untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang PAUD *Holistik Integratif* yang telah memasuki tahun ke empat sejak diluncurkannya. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019, sebesar 54,6% maka capaian kinerja indikator kinerja tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan.

Sampai dengan tahun 2017 jumlah lembaga PAUD percontohan ada di 185 kab/kota se Indonesia atau 36% dari 514 kab/kota. Sedangkan untuk Pelatihan kurikulum 2013 telah dilaksanakan di 402 kab/kota. Diharapkan lembaga yang menerima pelatihan memberikan imbas kepada lembaga lainnya untuk pelaksanaan kurikulum 2013, termasuk bagaimana pelaksanaan PAUD secara *Holistik Integratif*. Pelayanan PAUD secara *Holistik Integratif* mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan indikator ini adalah bahwa tidak semua lembaga yang ada di Kab/Kota telah mendapatkan pelatihan kurikulum 2013 yang dapat menjadi dasar pelaksanaan PAUD secara *holistik dan integratif*. Tetapi jumlah lembaga yang dilatih langsung oleh pemerintah pusat hanya lembaga-lembaga percontohan yang diharapkan dapat memberikan imbas kepada lembaga lainnya di Kab/kota. Sehingga walaupun telah ada 402 kab/kota yang dilatih kurikulum 2013 dan tercatat diantaranya ada 185 kab/kota yang memiliki PAUD percontohan tidak dapat memastikan semua lembaga yang ada di kab/kota tersebut telah melaksanakan PAUD secara *holistic integrative*.

IKSS 5.3 “Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi” sampai dengan tahun 2017, jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terakreditasi telah mencapai 3.225 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 4.121 lembaga maka capaian tersebut belum mencapai target, dengan persentase capaian sebesar 78%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 401 lembaga kursus dan pelatihan yang berhasil terakreditasi. Namun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019, maka masih ada kekurangan sebanyak 4.646 lembaga untuk dicapai sampai dengan tahun 2019. Tercatat lembaga kursus dan pelatihan yang berakreditasi ditargetkan sebanyak 7.871 lembaga di akhir periode renstra. Melihat masih banyaknya jumlah target yang belum tercapai, diperlukan kerja keras agar target sebanyak 7.871 dapat tercapai di tahun 2019.

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terakreditasi mencapai 3.225 lembaga, yang terdiri dari 2.450 akreditasi program dan 775 akreditasi satuan (lembaga). Berikut data enam tahun terakhir program dan satuan LKP yang telah terakreditasi:

Program/ Satuan		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Tera kred itasi	Total Program/ Satuan Terakreditasi 2012 - 2016	Total Lembaga Terakreditasi
		Tera kred itasi	Tidak Terakre ditasi	Tera kred itasi	Tidak Terakre ditasi	Tera kred itasi	Tidak Terakre ditasi	Tera kred itasi	Tidak Terakre ditasi	Tera kred itasi	Tidak Terakre ditasi			
LKP	Program Satuan	186	16	229	26	135	17	700	115	555	46	401	2.450	3.225
		29	6	57	5	58	11						775	

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) merupakan lembaga yang berwenang melakukan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), sedangkan Ditjen PAUD dan Dikmas dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (BP-PAUD dan Dikmas) hanya bertugas mempersiapkan dan membantu lembaga-lembaga tersebut memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi delapan SNP LKP antara lain dilakukan melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas, termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam rangka persiapan akreditasi, yang baru diinisiasi pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan evaluasi kinerja terhadap LKP oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan pelatihan di bawah naungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Berikut capaian hasil akreditasi lembaga kursus dan pelatihan yang dilakukan BAN PNF tahun 2017.

Tabel Jumlah Program dan PNF yang Terakreditasi sesuai SNP

Program dan Satuan	Terakreditasi				Tidak Terakreditasi	Jumlah
	A	B	C	Jumlah		
LKP	40	193	233	466	7	473
PKBM	67	641	650	1.358	15	1.373

Jumlah program dan satuan PAUD dan PNF **diakreditasi** adalah 10.913 program dan satuan PAUD dan PNF dengan rincian sebagai berikut: PAUD sebanyak 9.067 lembaga; LKP sebanyak 473 lembaga; PKBM sebanyak 1.373. Realisasi yang melebihi target tersebut karena adanya partisipasi dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan akreditasi Raudhatul Athfal (RA). Dari jumlah 10.913 yang diakreditasi tersebut sebanyak 10.835 program dan satuan PAUD dan PNF **Terakreditasi** sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Dalam pelaksanaan Akreditasi PAUD/PNF ditemukan beberapa kendala antara lain:

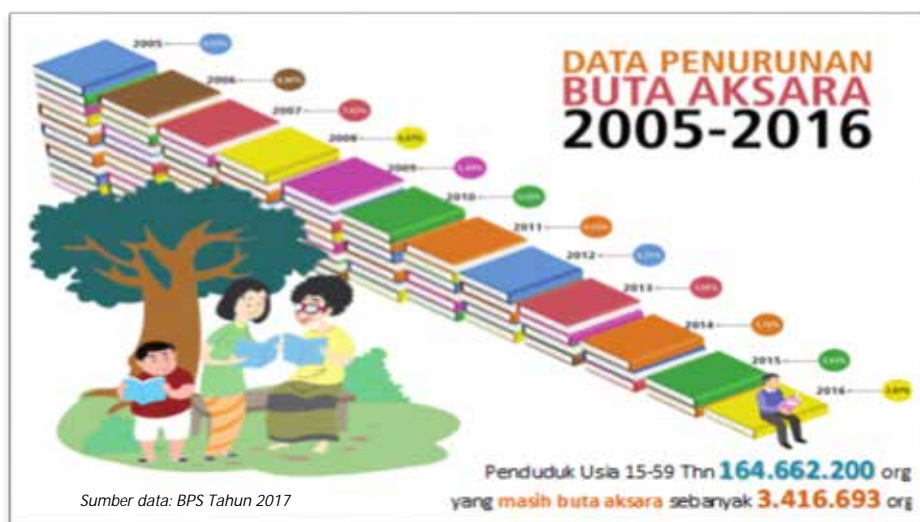
- 1) Sasaran pemetaan mutu yang dilakukan Direktorat PAUD DIKMAS belum tersosialisasikan dengan baik
- 2) Jumlah sebaran asesor belum merata di setiap Kabupaten/Kota
- 3) Rendahnya satuan biaya pelaksanaan akreditasi di setiap provinsi, sehingga sulit menjangkau daerah 3T

Untuk itu, telah dilakukan Langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kendala di atas, yaitu dengan cara:

- 1) Melakukan pemetaan mutu berkoordinasi dengan Direktorat PAUD dan DIKMAS yang telah melakukan pembinaan sebelumnya;
- 2) Melakukan penugasan asesor dengan melintaskan antara rumpun (PAUD, LKP, PKBM) untuk memaksimalkan asesor yang ada;
- 3) Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi asesor di setiap provinsi;
- 4) Melakukan pemetaan mutu, dengan demikian satuan biaya pelaksanaan akreditasi di setiap provinsi akan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- 5) Menerapkan sistem penilaian akreditasi berbasis *online*.

IKSS 5.4 “Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun” realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun ditargetkan sebesar 96,51%. Dari target tersebut berhasil teralisasi sebesar 97,93% dengan persentase capaian 101,47%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,37%. Tercatat angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun pada tahun 2016 baru mencapai 96,56%. Selain itu, capaian tahun 2017 juga telah melampaui target akhir renstra 2019. Tercatat angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun ditargetkan sebesar 96,73% tahun 2019 atau akhir renstra 2015-2019.



Keberhasilan pencapaian kinerja didukung melalui pemberian afirmasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif, (seperti di daerah 3T, Komunitas Adat Terpencil, Papua dan Papua Barat), BOP Keaksaraan Usaha Mandiri, Multikeaksaraan, Gerakan Indonesia Membaca, dan Kampung Literasi.

**Kemendikbud memberikan layanan keaksaraan dasar
kepada **53.700** orang dewasa di tahun 2017**

Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar sampai dengan akhir tahun 2017 telah menyalurkan untuk pembelajaran sebanyak 53.700 orang. Capaian 53.700 orang berasal dari pendanaan APBN. Sedangkan dalam pelaksanaannya, program pendidikan Keaksaraan Dasar juga didukung oleh anggaran dari APBD serta swadaya masyarakat. Dengan demikian, jumlah penduduk buta aksara 5.769.270 orang atau 3,44% tahun 2016 berkurang menjadi 3.416.693 orang atau 2,07% di tahun 2017 ini.

Capaian angka melek aksara ini dilihat dari anggaran APBN Direktorat Bindiktara mengalami penurunan target dari 64.280 orang di tahun 2016 menjadi 53.700 orang di tahun 2017. Penurunan target sasaran ini dikarenakan menurunnya jumlah penduduk tuna aksara dan bergesernya kebijakan Kemendikbud menjadi mempertahankan keberaksaraan melalui program Keaksaraan Lanjutan. Apabila dibandingkan dengan target penduduk melek aksara sesuai Renstra sebesar 150.525 orang, maka capaian ini mengalami penurunan sebesar 96.825 orang atau 64,32%.

Usaha menurunkan penduduk tuna aksara, menemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya: 1) Lokasi yang terpencil dan Warga Belajar yang masih mengutamakan pekerjaan dari pada belajar; 2) Masih ada kab/Kota yang sulit mendapatkan NIK peserta didik; 3) sebagian laporan KD mengalami keterlambatan; (4) Anggaran yang terbatas (hanya 50%) dari lulusan KD yang bisa dibiayai; dan (5) Pengusulan nomor seri SUKMA belum sepenuhnya dipahami.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan antara lain: 1) Klasifikasi sasaran berdasarkan lokasi Tertinggal, Terdepan, Terluar; Komunitas Adat Terpencil (KAT), Papua, dan Papua Barat); 2) untuk prov. Papua dan Papua Barat dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala kampung. Untuk daerah yang lain wajib memiliki NIK hingga waktu yang ditentukan belum terpenuhi dapat dialihkan ke daerah lain; 3) Membuat surat edaran direktur untuk menyampaikan laporan; 4) Dinas pendidikan membuat skala prioritas dari lulusan KD yang ada; 5) Dinas pendidikan mencari sumber pembiayaan selain APBN; dan 6) Membuat surat edaran Direktur Bindiktara ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.

IKSS 5.5 “Kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)” sampai dengan tahun 2017 capaian indikator kinerja ini masih sama dengan capaian tahun 2016. Tercatat pada tahun 2016, Kab/kota yang memiliki satu lembaga masyarakat rujukan ada sebanyak 8,6% atau 44 kab/kota yang telah memiliki minimal satu lembaga masyarakat rujukan dari total 514 Kab/kota.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019, maka masih ada selisih 7% atau 36 Kab/Kota. Tercatat Kab/kota yang memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM) kursus dan pelatihan atau UPTD ditargetkan sebanyak 15,6% atau 81 Kab/Kota di akhir periode renstra 2019.

Untuk tahun 2017, Kemendikbud tidak mengganggu bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjadi lembaga rujukan/pembina karena alokasi anggaran lebih mendahulukan program prioritas Kemendikbud lainnya. PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan berbagai program layanan pendidikan di Kab/kota.

Dalam rangka mewujudkan lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan di Kab/kota, Kemendikbud memberikan bantuan sarana praktik kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan. Lembaga Kursus dan Pelatihan rujukan yang mendapatkan bantuan sarana praktik sebanyak 136 lembaga. IKSS ini awalnya diperuntukan untuk membuat *centre of excellent* atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap Kab/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran maka desain IKSS diubah menjadi bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dan SKB dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan DUDI.

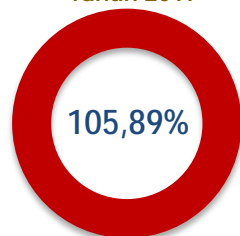
SS6 Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah

Sampai dengan tahun 2017, angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan. APK dan APM jenjang SMP dan SM sederajat mengalami peningkatan kecuali APK dan APM SD yang mengalami sedikit koreksi. Selain itu, peningkatan angka partisipasi juga terlihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun.

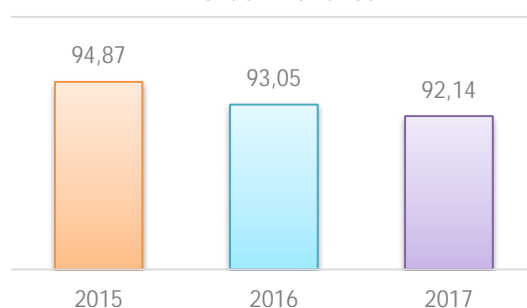
Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. APK SD/SDLB/Paket A	93,5%	98,02%	92,14%	94	100,55	92%
2. APM SD/SDLB	81,54%	82,88%	80,95%	98	85,20	95%
3. APK SMP/SMPLB/Paket B	76,69%	82,40%	77,78%	94	83,77	93%
4. APM SMP/SMPLB	56,55%	73,07%	57,81%	79	73,72	78%
5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	71,48%	82,15%	75,90%	92	85,71	89%
6. APM SMA/SMK/SMLB	52,22%	69,49%	54,59%	79	73,05	75%
7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,91	0,88	0,98	111	0,90	109%
8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,59	0,57	0,98	172	0,60	163%
9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	7,95 tahun	8,5 tahun	8,42 tahun	99	8,8 tahun	96%

IKSS 6.1 “APK SD/SDLB/Paket A” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. APK SD/SDLB/Paket A ditargetkan mencapai 98,02% di tahun 2017, namun dari target tersebut baru terealisasi sebesar 92,14%. Jika ditambahkan dengan jumlah siswa MI maka pada tahun 2017 APK SD sederajat menjadi sebesar 105,89%.

APK SD sederajat termasuk MI
Tahun 2017

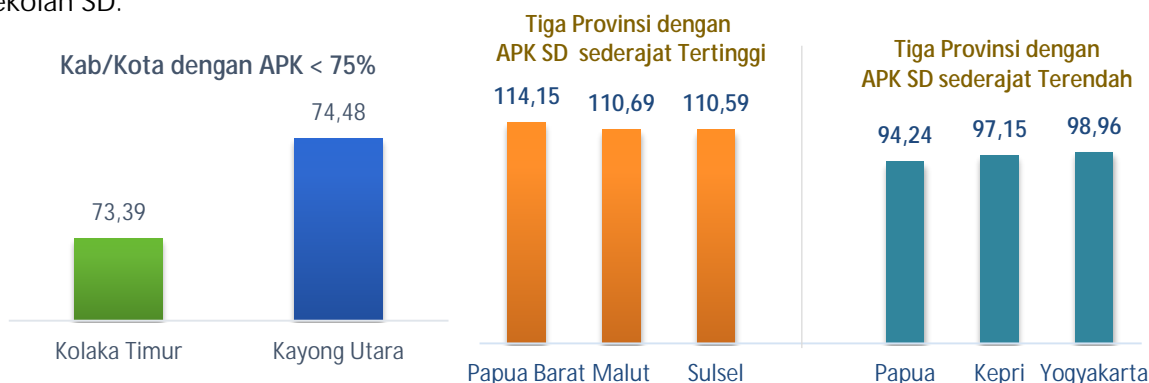


APK SD/SDLB/Paket A

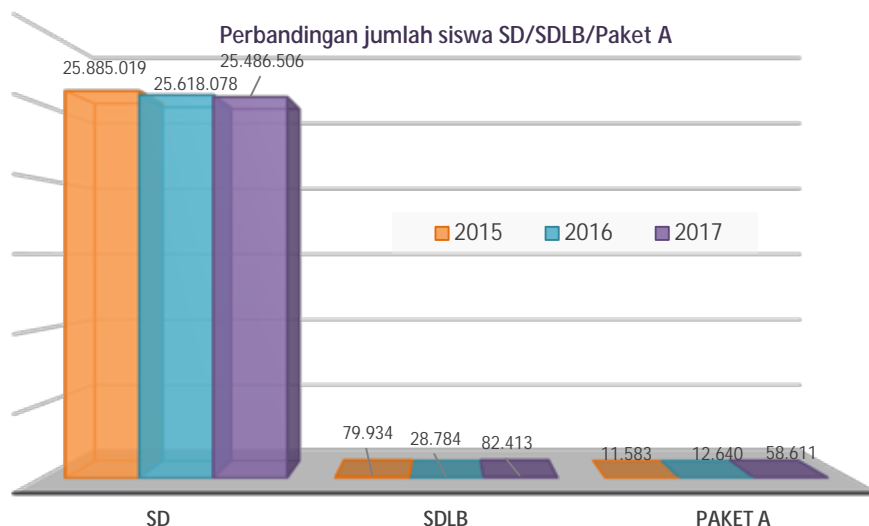


Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 yaitu APK SD/SDLB/Paket A sebesar 100,55%, maka masih ada kekurangan sebanyak 8,41% yang harus di capai selama dua tahun ke depan.

Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah namun sebaliknya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7-12 tahun, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. Selain itu, penurunan terjadi dikarenakan menurunnya jumlah siswa mengulang di sekolah SD.

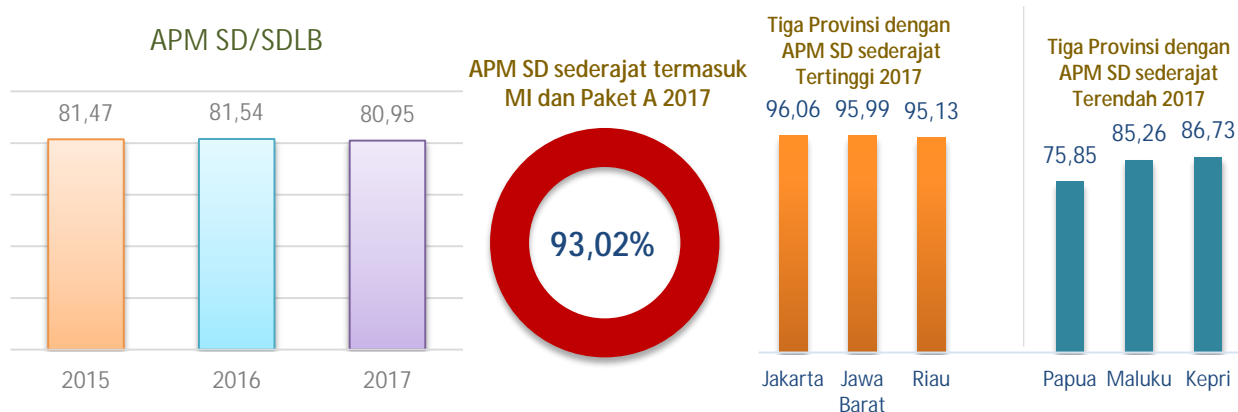


Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.843.400 orang. Sedangkan jumlah siswa SD sebanyak 25.486.506 siswa; SDLB 82.413 siswa; dan Paket A sebanyak 58.611 siswa. Dibandingkan dengan data tahun 2016, terjadi penurunan jumlah siswa SD sebanyak 131.572 siswa, sedangkan siswa SDLB terjadi kenaikan sebanyak 53.629 siswa dan siswa Paket A terjadi kenaikan sebanyak 45.971 siswa.



IKSS 6.2 “APM SD/SDLB” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. pada tahun 2017 sendiri APM SD/SDLB ditarget sebesar 82,88%, dari target tersebut baru terrealisasi sebesar 80,95%. APM sebesar 80,95% tersebut belum termasuk siswa MI dan Paket A. A. Jika ditambahkan dengan MI dan Paket A maka APM SD sederajat menjadi 93,02%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami koreksi 0,59%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 85,2%, maka masih ada kekurangan sebanyak 4,25% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

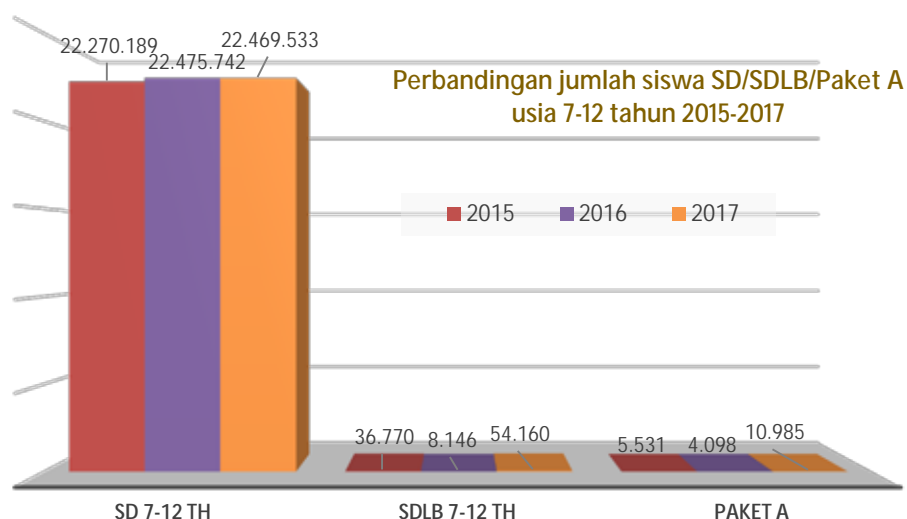


Jika dilihat per wilayah, APM mengalami peningkatan, pada tahun 2016/2017 ada 39 kab/kota dengan APM di bawah 60%, sementara pada 2017/2018 tidak ada lagi kab/kota dengan capaian APM dibawah 60%.

Tantangan yang terjadi adalah adanya penurunan persentase angka partisipasi baik APK dan APM jenjang SD dibandingkan tahun 2016. Penurunan tersebut tampak pada penurunan jumlah siswa SD/SDLB. Penurunan jumlah peserta didik SD dimungkinkan oleh

meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anak usia 7-12 tahun ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Salafiyah ULA. Tercatat siswa MI sebanyak 3.671.812 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017 meningkat menjadi 3.829.024 peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018 sedangkan Salafiyah ULA ada sebanyak 20.503 peserta didik pada tahun ajaran 2016/2017 meningkat menjadi 27.805 peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018, dengan kontribusi APM sebesar 11,35% bagi APM secara nasional. Selain itu, penurunan angka partisipasi jenjang SD juga disebabkan kurangnya akses keberadaan sekolah di daerah-daerah terpencil serta faktor ekonomi terutama pada daerah-daerah 3T.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.843.400 orang. Sedangkan jumlah siswa SD usia 7-12 tahun sebanyak 22.469.533 siswa; SDLB usia 7-12 sebanyak 54.160 siswa; dan Paket A usia 7-12 sebanyak 10.985 siswa.



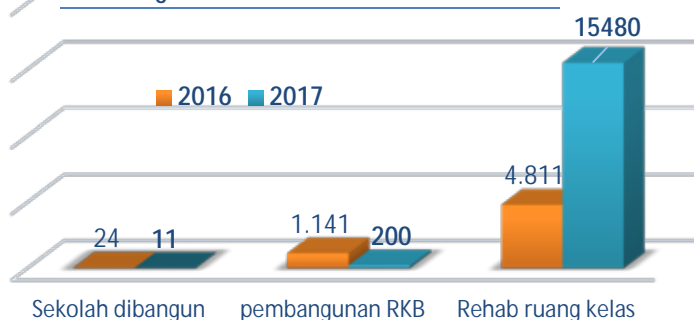
Pemenuhan akses pendidikan dasar termasuk jenjang sekolah SD baik APK maupun APM merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, Kemendikbud tetap memberikan bantuan pemenuhan akses pendidikan pendidikan dasar khususnya jenjang SD. Beberapa program yang dijalankan Kemendikbud dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah diantaranya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian BOS, pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan Sekolah SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa di luar negeri (SILN), dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi.

Untuk jenjang SD, pada tahun 2017 telah disalurkan bantuan melalui PIP kepada 10.362.746 siswa SD. Adapun sekolah SD yang berhasil dibangun sebanyak 11 sekolah, sekolah yang

Bantuan PIP SD 2017

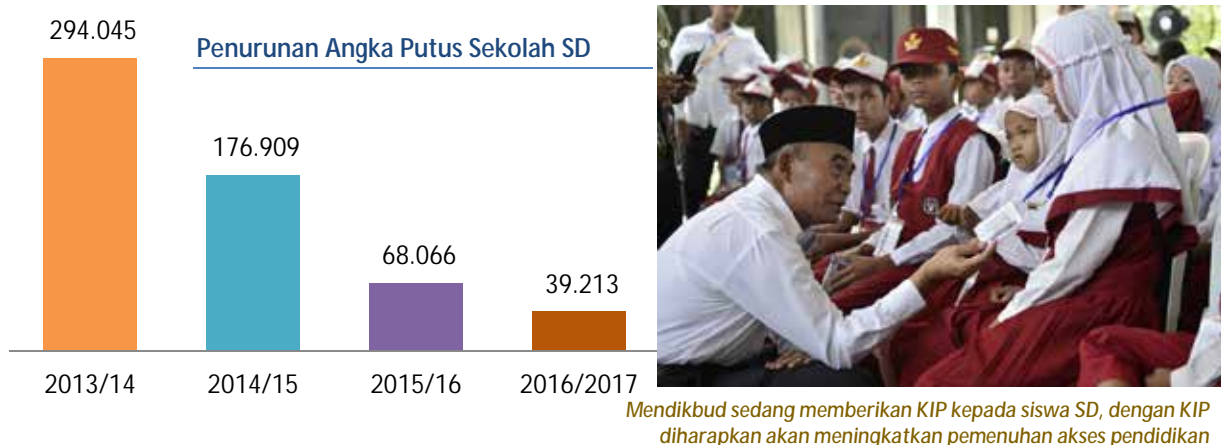


Pembangunan Prasarana SD 2016-2017



direnovasi sebanyak 101 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 200 ruang, ruang belajar yang berhasil direhabilitasi sebanyak 15.480 ruang, pemberian bantuan beasiswa bakat dan prestasi kepada sebanyak 1.635 siswa.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah jenjang SD. Berikut tren penurunan jumlah siswa angka putus sekolah dasar selama empat tahun terakhir.



Untuk tahun 2017 angka putus sekolah SD sebesar 0,15%. Beberapa kondisi yang menyebabkan siswa putus sekolah antara lain. Pada lingkungan perkotaan angka putus sekolah dipicu oleh tingkat kemiskinan. Pada beberapa kasus anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki status kependudukan tetap mengalami kesulitan bagi anak-anaknya untuk memperoleh akses pendidikan formal. Hal ini mendorong munculnya anak-anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

Selain itu, angka putus sekolah siswa sekolah dasar untuk daerah pedalaman, daerah pertanian atau perkebunan didorong oleh minimnya infrastruktur seperti jalan atau sekolah itu sendiri, selain itu budaya membantu ekonomi rumah tangga dengan bekerja menjadi buruh tani ataupun buruh perkebunan.

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan APM antara lain:

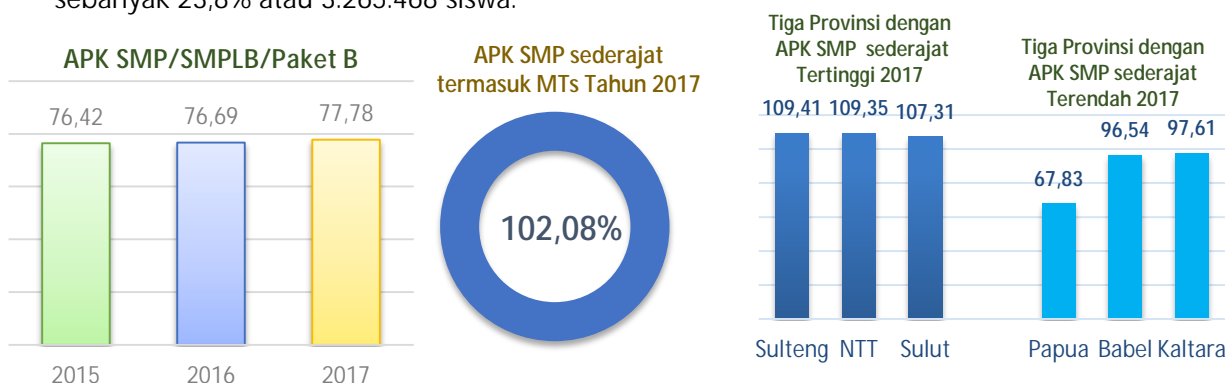
- 1) Dikarenakan adanya otonomi daerah perlu adanya peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah, sehingga program-program pemenuhan akses dan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia di Sekolah Dasar, dimana banyak siswa-siswi yang pindah ke MI yang menyebabkan penurunan APM pada jenjang SD/SDLB;
- 3) Menyempurnakan kurikulum yang digunakan agar dapat menarik minat orangtua murid menyekolahkan anaknya ke SD formal;
- 4) Menambah dan memperbaiki akses pendidikan terutama di daerah-daerah dimana akses pendidikan masih sulit;

- 5) Memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dan usaha-usaha yang terus dilakukan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia;
- 6) Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketepatan pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarginalkan agar bersekolah kembali. Program pemberian kartu Indonesia Pintar juga diberikan kepada anak yatim piatu. Program retrieval merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah.

IKSS 6.3 “APK SMP/SMPLB/Paket B” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 82,40% baru terealisasi sebesar 77,78%. Meskipun belum mencapai target, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Tercatat APK SMP/SMPLB/Paket B di tahun 2016 sebesar 76,69% sedangkan di tahun 2017 sebesar 77,78%.

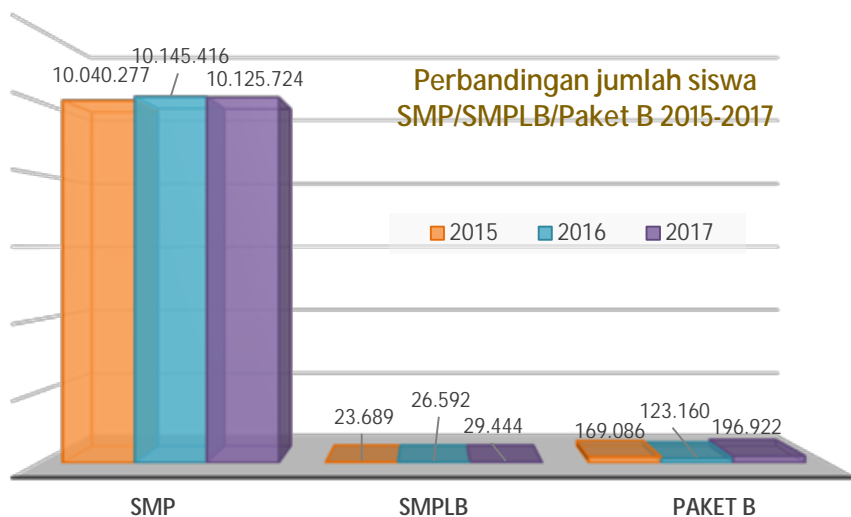
Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2019 sebesar 83,77%, maka masih ada kekurangan sebanyak 5,99% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

APK sebesar 77,78% tersebut belum mencakup siswa MTs, jika termasuk siswa MTs maka APK SMP sederajat secara nasional sebesar 102,08%. Kontribusi MTs kurang lebih sebanyak 23,8% atau 3.265.468 siswa.



Untuk tahun 2017 jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 13.440.400 anak. Sedangkan jumlah siswa SMP sebanyak 10.125.724 siswa, SMPLB sebanyak 29.444 siswa, dan paket B sebanyak 196.922 siswa.

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan BOS dan pelaksanaan PIP yang tepat sasaran merupakan salah satu langkah yang harus

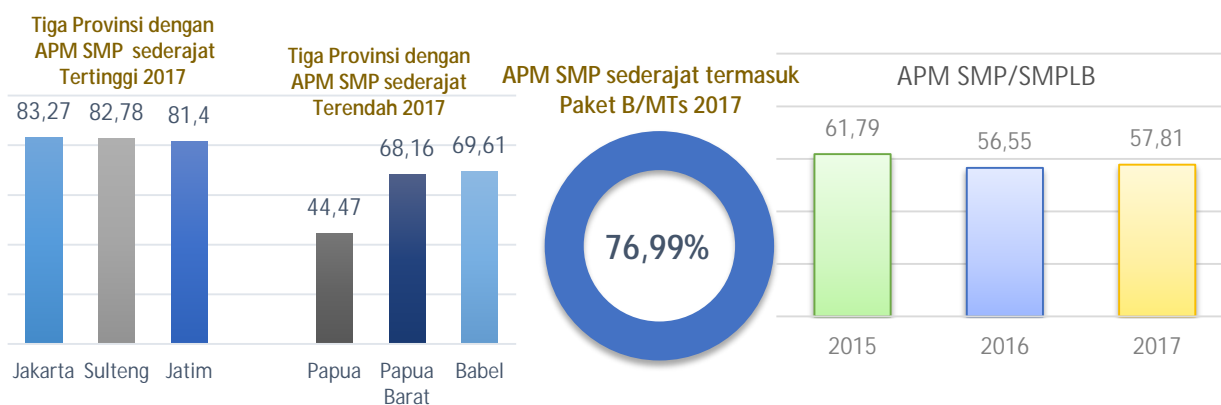


ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarginalisasi agar bersekolah kembali. Program retrieval merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kab/kota dengan dukungan pemerintah. Pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran dana PIP yang kontroversi. Sementara siswa yang benar-benar dari keluarga miskin tidak menerima bantuan sedang siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik mendapat bantuan.

IKSS 6.4 “APM SMP/SMPLB” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. APM SMP/SMPLB ditargetkan sebesar 73,07%, dari target tersebut baru terealisasi sebesar 57,81%. Meskipun belum mencapai target, namun capaian di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat APM SMP/SMPLB ditahun 2016 sebesar 56,55%.

Namun jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 73,72%, maka masih ada kekurangan sebanyak 15,91% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan. Melihat masih besarnya kekurangan yang harus dicapai tersebut diperlukan kerja keras agar target APM SMP/SMPLB sebesar 73,72 dapat tercapai di tahun 2019.

APM sebesar 57,81% belum termasuk siswa dari MTs dan Paket B, jika termasuk dengan MTs dan Paket B, rata-rata APM SMP sederajat secara nasional sebesar 76,99%.

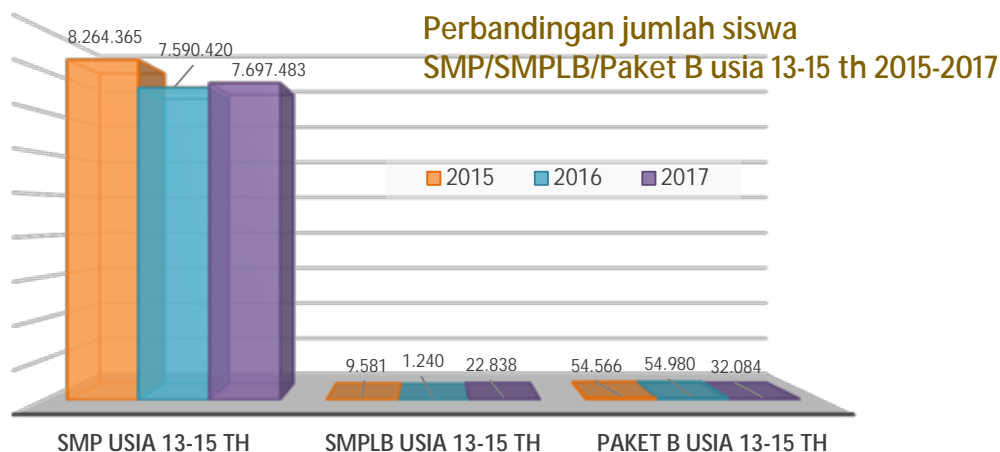


Beberapa hal yang menyebabkan angka partisipasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MTs dan Salafiyah Wustha. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MTs dari 3.198.624 siswa di tahun ajaran 2016/2017 menjadi 3.265.468 siswa pada tahun ajaran 2017/2018 dan Salafiyah Wustha dari 72.479 siswa di tahun 2016/2017 menjadi 102.250 siswa pada tahun ajaran 2017/2018;
2. masih banyaknya siswa SD usia 13-15 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SD. Tercatat ada 361.215 siswa SD yang mengulang pada tahun ajaran 2016/2017.

3. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke SMP. Tercatat sebanyak 78,08% anak lulusan SD yang melanjutkan sekolah SMP;
4. rendahnya daya dukung infrastruktur yang mendorong akses pendidikan bagi penduduk setempat seperti kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke SMP/setara sangat jauh (tidak semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3 s.d. 8 km);
5. kurangnya layanan pendidikan SMP yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T;
6. faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bersekolah terutama di daerah-daerah tertinggal,
7. belum terbentuknya pola masyarakat pembelajar atau faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan;
8. Orang tua lebih memilih pesantren untuk mendidik anaknya daripada sekolah formal setelah lulus SD/MI;
9. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah;

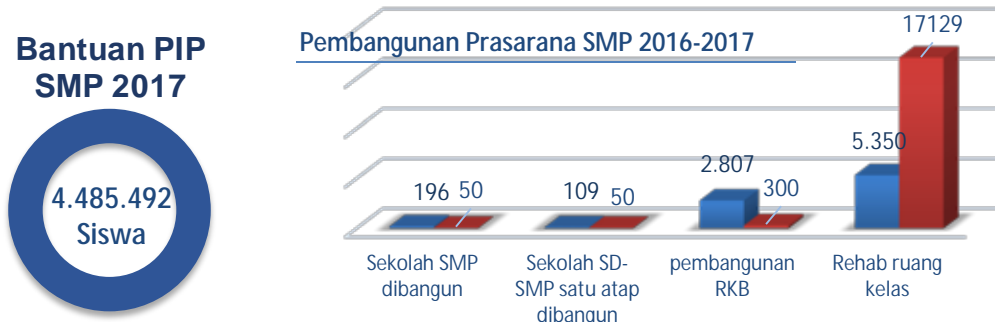
Untuk tahun 2017 jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 13.440.400 anak. Sedangkan jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun sebanyak 7.697.483 siswa, SMPLB usia 13-15 tahun sebanyak 22.838 siswa, dan Paket B usia 13-15 sebanyak 32.084 siswa.



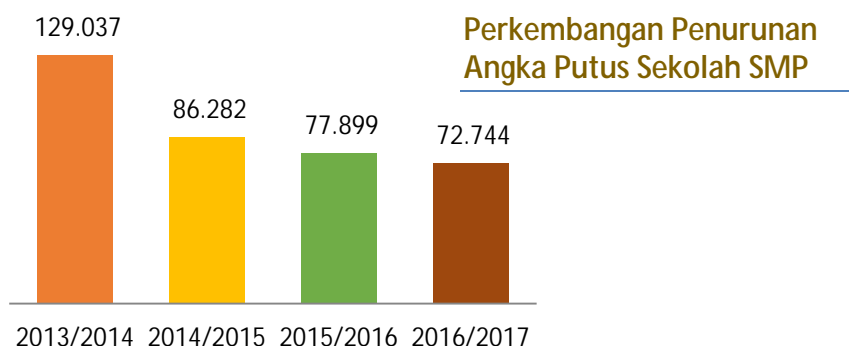
Pemenuhan akses pendidikan dasar termasuk jenjang sekolah SMP baik APK maupun APM merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kab/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk membantu peningkatan APK maupun APM SMP sederajat, Kemendikbud menjalankan beberapa program diantaranya **Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian BOS, pembangunan RKB SMP, pembangunan Sekolah SMP, sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi.**

Untuk SMP, pada tahun 2017 telah disalurkan bantuan melalui PIP kepada 4.485.492 siswa SMP. Adapun sekolah SMP yang berhasil dibangun sebanyak 50 sekolah, ruang kelas baru yang dibangun sebanyak 300 ruang, rehabilitasi sebanyak 17.129 ruang, sekolah yang direnovasi sebanyak 101, dan SD-SMP satu atap yang dibangun sebanyak 50.



Program Indonesia Pintar telah berhasil membantu menurunkan angka putus sekolah termasuk pada jenjang SMP sederajat. Untuk tahun 2017 sendiri angka putus sekolah SMP sebesar 0,38 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,50. Berikut tren penurunan jumlah siswa angka putus SMP selama tiga tahun terakhir.

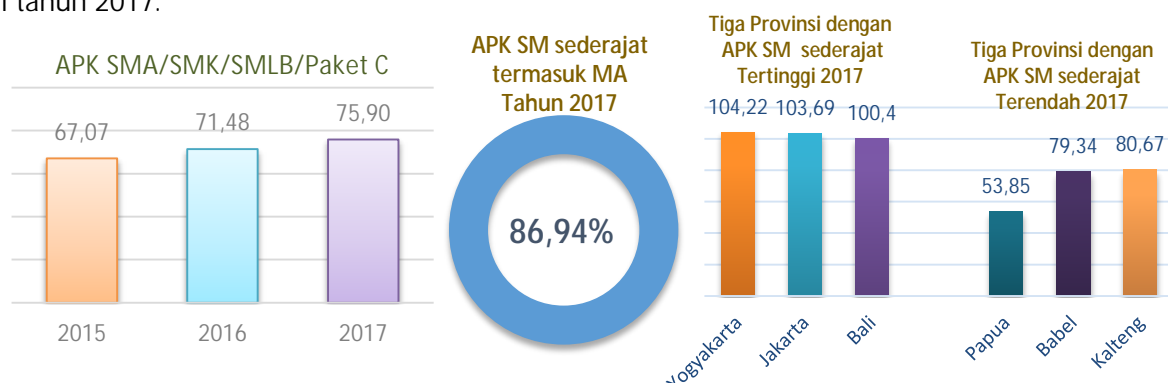


Antisipasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi jenjang SMP antara lain adalah perluasan akses keberadaan sekolah di daerah-daerah yang belum terdapat sekolah jenjang SMP, penyaluran PIP dan beasiswa-beasiswa serta peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik kurikulum maupun tenaga pengajar, dan mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan akses pendidikan dasar secara merata.

IKSS 6.5 “APK SMA/SMK/SMLB/Paket C” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. APM SMA/SMK/SMLB/Paket C ditargetkan sebesar 82,15%, dari target tersebut baru terealisasi sebesar 75,90%. Meskipun belum mencapai target, namun capaian di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,42% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tercatat APK SMA/SMK/SMLB/Paket C ditahun 2016 sebesar 71,48%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 85,71%, maka masih ada kekurangan sebanyak 9,81% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

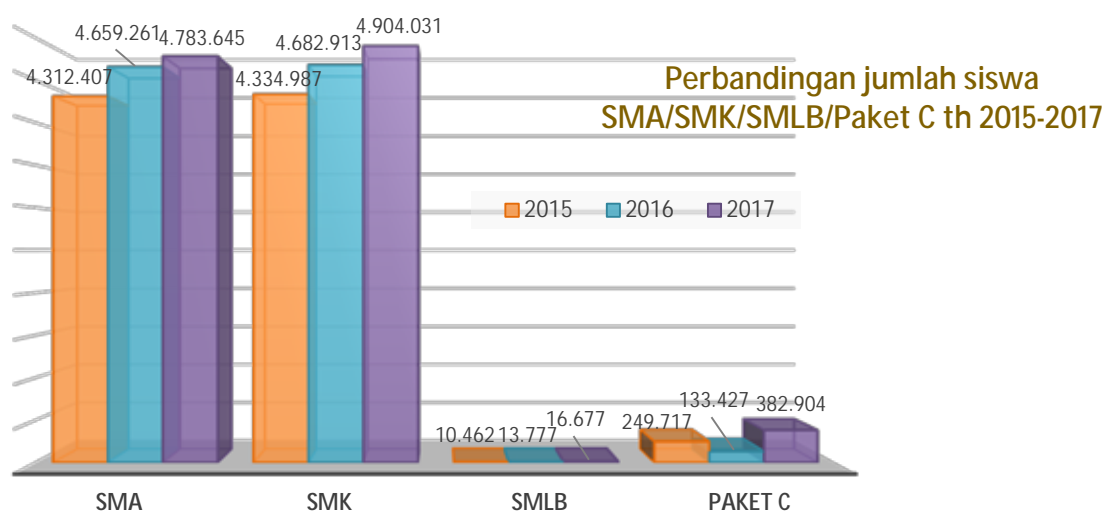
APK sebesar 75,90% belum termasuk jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA), jika ditambah dengan MA dan Salafiyah maka APK sekolah menengah sederajat menjadi 86,94% di tahun 2017.



Terdapat 15 Kab/kota dengan APK SMA/SMK/SMLB di bawah 50%. Sebanyak 14 kabupaten tersebut berada di Provinsi Papua. Berikut Kab/kota dengan APK SMA/SMK/SMLB di bawah 50%.

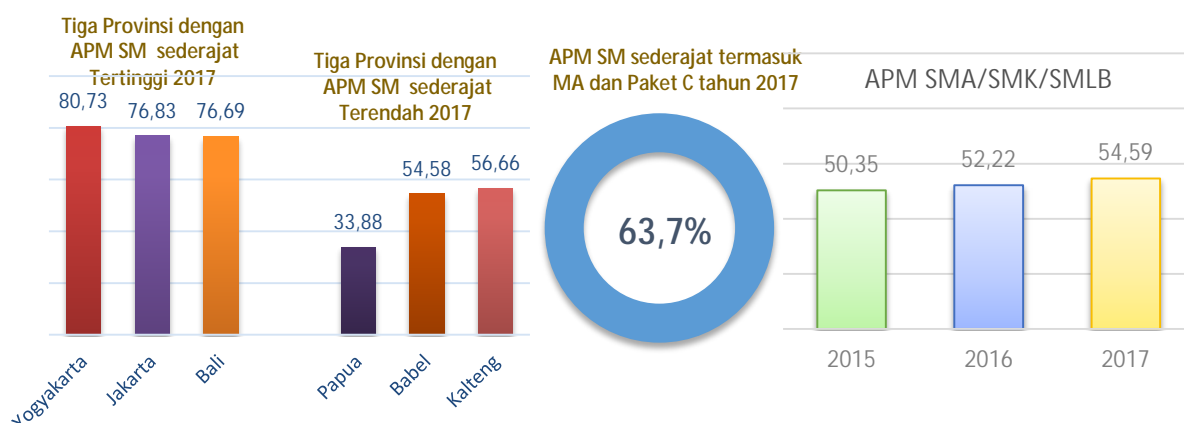
No	Provinsi	Kab/Kota	APK
1	Papua	Kab. Intan Jaya	11,93
2	Papua	Kab. Dogiyai	13,71
3	Papua	Kab. Yahukimo	15,94
4	Papua	Kab. Lanny Jaya	18,95
5	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	22,10
6	Papua	Kab. Tolikara	24,42
7	Papua	Kab. Asmat	24,86
8	Papua	Kab. Yalimo	31,62
9	Papua	Kab. Puncak	32,43
10	Papua	Kab. Puncak Jaya	34,98
11	Papua	Kab. Paniai	41,75
12	Papua	Kab. Mappi	42,09
13	Papua	Kab. Deiyai	43,41
14	Papua	Kab. Nduga	48,68
15	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	49,42

Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 13.305.400 anak. Berikut grafik kenaikan jumlah siswa jenjang SMA sederajat selama tiga tahun terakhir.

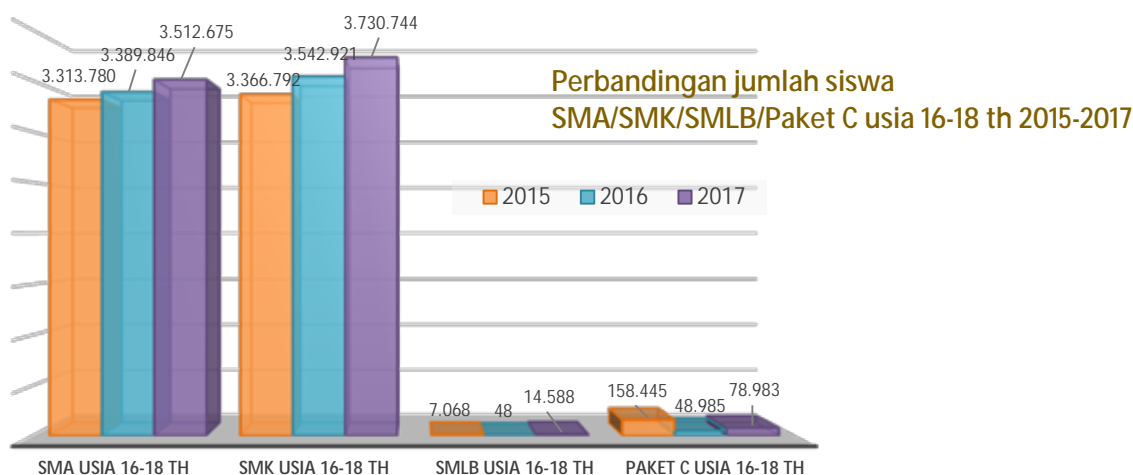


IKSS 6.6 “APM SMA/SMK/SMLB” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. APM SMA/SMK/SMLB ditargetkan sebesar 69,49% di tahun 2017, dari target tersebut baru terealisasi sebesar 54,59%. Meskipun belum mencapai target, namun capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,37% dari tahun sebelumnya. Tercatat APM SMA/SMK/SMLB di tahun 2016 mencapai 52,22%. Dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2019 yaitu sebesar 73,05%, maka masih ada selisih sebanyak 18,46% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

APM sebesar 54,59% belum termasuk siswa dari MA dan Paket C, jika digabungkan dengan jumlah siswa MA dan Paket C maka APM SM sederajat menjadi sebesar 63,7%.

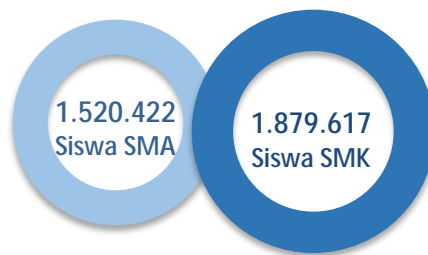


Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 13.305.400 anak. Berikut grafik kenaikan jumlah siswa jenjang SMA sederajat usia 16-18 selama tiga tahun terakhir.

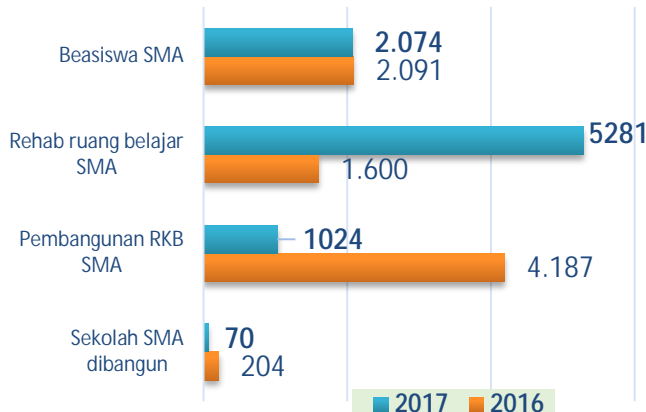


Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk membantu peningkatan APK maupun APM sekolah menengah sederajat, Kemendikbud melaksanakan beberapa program diantaranya Program Indonesia Pintar, Pemberian BOS, pembangunan sekolah baru, sekolah berasrama, Pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa.

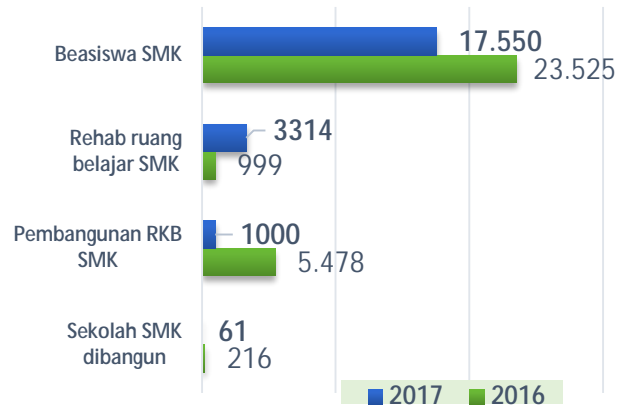
JUMLAH PENERIMA PIP TINGKAT
SMA/SMK Tahun 2017



Pembangunan Prasarana SMA 2016-2017

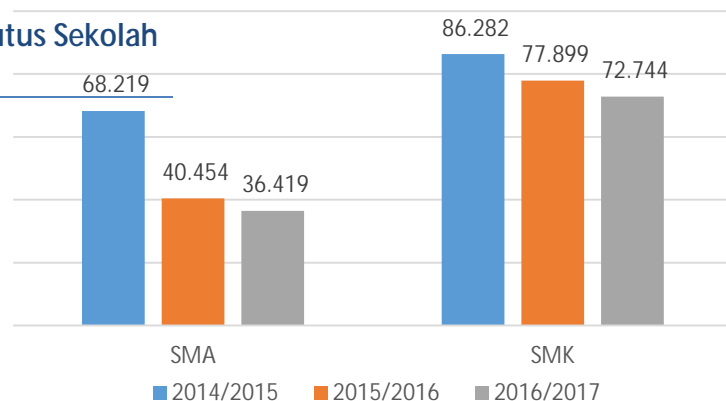


Pembangunan Prasarana SMK 2016-2017



Program Indonesia Pintar yang dijalankan pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah. Selain itu PIP juga berhasil meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP ke Sekolah Menengah. Tercatat angka melanjutkan siswa SMP ke sekolah menengah sebesar 102,18% (data 2016/2017= 3.281.121 lulusan SMP; 3.352.554 siswa baru SM) pada tahun 2016/2017. Berikut tren penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang sekolah menengah selama tiga tahun terakhir.

Tren Penurunan Angka Putus Sekolah
SMA/SMK 2015-2017



Untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah dibutuhkan ketersediaan sekolah sampai dengan tingkat kecamatan. Untuk itu, Kemendikbud berupaya membantu pemerintah provinsi untuk meningkatkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 99.8% Kecamatan di Indonesia yang memiliki minimal satu sekolah menengah.

PIP menjadi salah satu andalan untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Selain itu PIP diharapkan dapat mencegah peserta didik dari putus sekolah (DO) dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penerima PIP diprioritaskan kepada:

- Peserta didik pemegang KIP
- Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah teregister di DAPODIK;
- Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan KKS;
- Siswa yatim/piatu/yatim piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial lainnya;
- Siswa terdampak bencana alam;
- Siswa drop out yang diharapkan bisa kembali bersekolah;
- Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terancam putus sekolah;
- Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

Penentuan data sasaran calon penerima PIP disusun oleh Kementerian Sosial karena melibatkan data siswa maupun data penduduk usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian antara data siswa dari DAPODIK dengan data dari Kemensos.

Perlu adanya sinergi yang lebih intensif antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendataan siswa dan penduduk sehingga permasalahan data PIP ini dapat teratasi dan juga ketepatan sasaran siswa penerima PIP ini bisa lebih akurat.

Di beberapa daerah, terutama pada penduduk jenis kelamin perempuan masih terdapat kecenderungan menikah dini sehingga setelah menyelesaikan pendidikan SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini berpengaruh terhadap upaya meningkatkan angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB. Upaya meningkatkan jumlah lulusan SMP dan sederajat agar dapat melanjutkan pendidikan menengah dapat dilakukan melalui upaya persuasif terutama pada daerah yang masih memiliki tradisi memberikan akses kepada pekerja anak. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi wajib belajar dua belas tahun. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat orang tua agar putra-putrinya berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan APK dan APM SMA/SMK/SMLB belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan anaknya di jenjang sekolah menengah (faktor ekonomi);

2. tingkat pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan ada rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah menengah;
3. kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi); jarak dari rumah ke sekolah menengah sangat jauh;
4. kurangnya layanan pendidikan SMA/SMK yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat;
5. kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA/SMK masih rendah;
6. rendahnya kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab terjadinya putus sekolah;
7. masih banyaknya siswa SMP usia 16-18 tahun yang mengulang di jenjang sekolah SMP. Tercatat ada 23.449 siswa SMP yang mengulang pada tahun ajaran 2016/2017;
8. masih banyaknya orang tua yang memilih pesantren sebagai tempat pendidikan selain pendidikan jalur formal setelah lulus SMP.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah mendorong pemerintah provinsi untuk menambah akses sekolah tingkat SMA di daerah-daerah 3T melalui pembangunan USB atau pembangunan RKB, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan hingga tingkat SMA/SMK kepada masyarakat melalui media-media informasi yang memungkinkan dengan memberdayakan pemerintah daerah setempat.

IKSS 6.7 “Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya” capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. pada tahun 2017 rasio yang ditetapkan sebesar 0,88, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 0,98. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan rasio sebesar 0,07. Namun jika bandingkan dengan target akhir renstra 2019 yaitu rasio sebesar 0,90%, maka masih ada selisih sebanyak 0,08% yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

Menurut data BPS jumlah penduduk tahun 2017 adalah 262.000.000 sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.580.000 atau 10,6%. Sementara jumlah penduduk kaya diasumsikan sebanyak 10% dari jumlah penduduk. Jumlah siswa SMP sendiri sebanyak 10.155.168 siswa. Dengan demikian diperoleh angka rasio 0,98.

Ketercapaian rasio ini menunjukkan akses penduduk miskin terhadap sekolah SMP semakin baik. Ketercapaian rasio APK SMP/SMPLB tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program yang dijalankan pemerintah yaitu program pemberian BOS dan Program Indonesia Pintar. Untuk tahun 2017 sendiri siswa SMP yang mendapatkan bantuan melalui PIP sebanyak 4.485.492 siswa. Sedangkan pemberian BOS diberikan kepada seluruh siswa SMP melalui sekolah.



IKSS 6.8 “Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya”

capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. pada tahun 2017 rasio yang ditetapkan sebesar 0,59, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 0,98. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan cukup besar yaitu sebesar 0,39. Selain itu, capaian tahun 2017 telah melampaui target akhir renstra 2019. Tercatat rasio yang ditargetkan di akhir renstra 2019 sebesar 0,60.

Menurut data BPS jumlah penduduk tahun 2017 adalah 262.000.000 sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.580.000 atau 10,6%. Sementara jumlah penduduk kaya diasumsikan sebanyak 10% dari jumlah penduduk. Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB sebanyak 9.704.353 siswa. Dengan demikian diperoleh angka rasio 0,98.

Ketercapaian rasio ini menunjukkan akses penduduk miskin terhadap sekolah SM sederajat semakin baik. Ketercapaian rasio APK SMA/SMK/SMLB tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program yang dijalankan pemerintah yaitu Program Indonesia Pintar dan bantuan BOS. Untuk tahun 2017 sendiri siswa SMA yang mendapatkan bantuan melalui PIP sebanyak 1.520.422 siswa, SMK sebanyak 1.879.617 siswa. Sedangkan pemberian BOS diberikan kepada seluruh siswa SMA melalui sekolah meskipun bantuan BOS SM belum mencapai 100%.

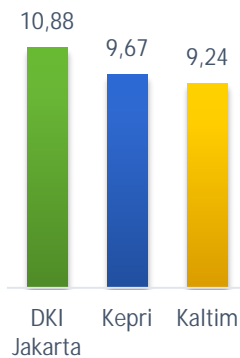


IKSS 6.9 “Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun” pada tahun 2017 baru mencapai 8,42 tahun. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Angka sebesar 8,42 merupakan hasil pengukuran BPS untuk tahun 2016, untuk tahun 2017 sendiri BPS belum merilis rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ditargetkan mencapai 8,5 tahun di tahun 2017. Meskipun belum mencapai target, namun capaian tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.

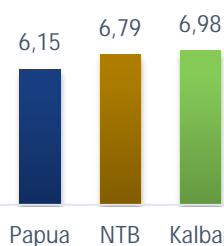
Jika bandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 dimana rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,8 tahun, maka masih ada selisih sebanyak 0,38 tahun yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

Jika dihitung rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun maka pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,95 tahun.

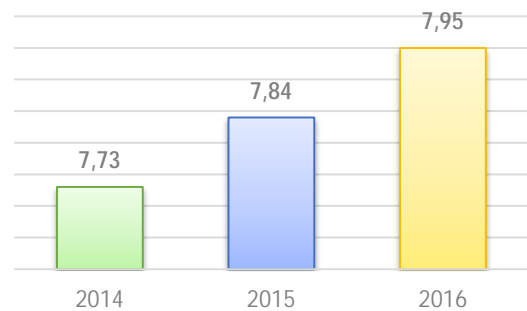
Tiga Provinsi dengan RLS Tertinggi tahun 2016



Tiga Provinsi dengan RLS terendah tahun 2016



Rata-rata Lama Sekolah 2014-2016 untuk usia penduduk di atas 25 tahun (dalam tahun)



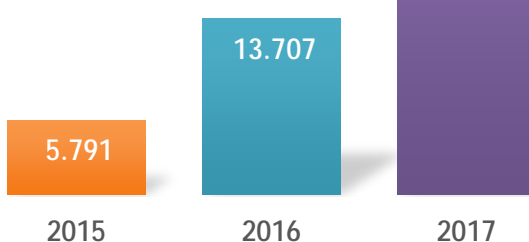
Kontribusi pendidikan dalam peningkatan IPM tersebut dapat dilihat melalui peningkatan rata-rata harapan lama sekolah dari 12,39 tahun di tahun 2014, menjadi 12,72 tahun pada tahun 2016. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat dari 7,73 tahun menjadi 7,95 tahun. Jika dihitung seluruh penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas), rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,07 tahun di tahun 2012, menjadi 8,42 tahun 2016.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur IPM selain rata-rata harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2016 sudah menembus 70,18. Ini merupakan kali pertama IPM tembus angka 70 sejak 2010, sekaligus mengubah status Indonesia dari negara dengan pembangunan 'sedang' menjadi 'tinggi'.

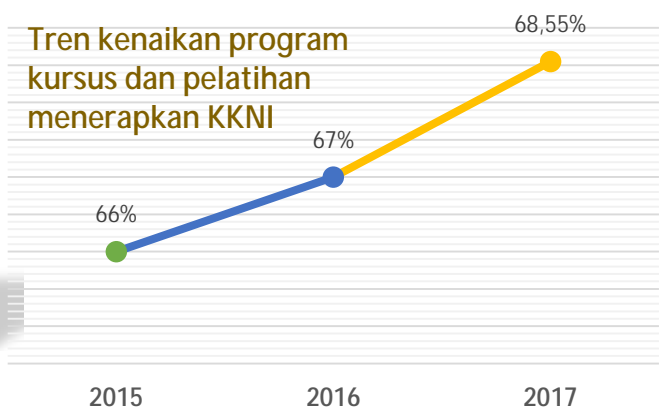
Kemendikbud berupaya meningkatkan rata-rata lama sekolah usia di atas 15 tahun agar IPM dapat meningkat. Upaya yang dilakukan adalah antara lain pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk peningkatan angka partisipasi, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka melanjutkan dan afimasi pendidikan khususnya di daerah 3T.

SS7 Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

Jumlah lembaga PAUD terakreditasi 2015-2017



Tren kenaikan program kursus dan pelatihan menerapkan KKNi



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	13.707	37.851	23.444	61,9	42.926	55%
2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi	67%	63,10%	68,55%	109	71,38	96%

IKSS 7.1 “Jumlah lembaga PAUD terakreditasi” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Lembaga PAUD terakreditasi ditargetkan sebanyak 37.851 lembaga di tahun 2017. Dari target tersebut baru sebanyak 23.444 lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2017.

Akreditasi diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Kewenangan melakukan akreditasi pada satuan lembaga PAUD ada pada BAN PNF. Manfaat akreditasi itu sendiri secara umum merupakan bagian dari penjaminan dan usaha peningkatan mutu pendidikan. Secara langsung akreditasi PAUD menunjang peningkatan mutu program PAUD serta meningkatkan kinerja satuan PAUD. Pada tahun 2017, BAN PNF telah melakukan akreditasi kepada 9.067 lembaga PAUD, berikut rinciannya.

Program dan Satuan	Terakreditasi				Tidak Terakreditasi	Jumlah
	A	B	C	Jumlah		
PAUD	855	4.950	3.206	9.011	56	9.067

Kendala dalam pencapaian target adalah masih banyak lembaga yang dalam antrian panjang untuk dapat diakreditasi sedangkan BAN PNF sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi, memiliki sumberdaya manusia yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah lembaga yang harus diberikan penilaian dalam rangka pemberian akreditasi. Selain kendala tersebut di atas, yang menyebabkan masih belum tercapainya target adalah terdapat lembaga yang tidak memperpanjang atau memperbaharui akreditasi setelah status akreditasinya berakhir.

Mendikbud didampingi Dirjen PAUD, perwakilan UNICEF, dan IKEA bersama-sama memencet tombol dimulainya peluncuran kerjasama PAUD berkualitas Universal



Kemendikbud melalui Ditjen PAUD dan Dikmas mengupayakan kesiapan lembaga untuk mempertahankan akreditasinya, diantaranya adalah dengan Pembinaan Lembaga PAUD yang sudah Terakreditasi. Untuk tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan kepada 1.293 lembaga di 13 Kab/kota. Tujuan pembinaan lembaga PAUD yang sudah terakreditasi sendiri

adalah 1). Memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan implementasi model pembelajaran PAUD yang berkarakter; 2). Memberikan pemahaman tentang peranan penilik sebagai penjamin mutu dan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan program PAUD; 3). Memberikan pemahaman tentang Gerakan PAUD Berkualitas; 4). Memberikan pemahaman tentang Gugus PAUD sebagai wahana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; 5). Memberikan pemahaman tentang peningkatan satuan PAUD menuju PAUD berkualitas; 6). Memberikan pemahaman tentang peningkatan program layanan PAUD menuju PAUD berkualitas.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 jumlah lembaga PAUD terakreditasi meningkat sebanyak 9.737 lembaga atau naik 71% dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh sejumlah kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan melalui PKG, dengan adanya bantuan kepada 2.100 PKG diharapkan lembaga lembaga PAUD lebih meningkatkan mutu layanan mereka. Melalui pertemuan gugus-gugus PAUD diharapkan dapat menjadi bengkel kerja para pendidik PAUD.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 dimana jumlah lembaga PAUD terakreditasi ditargetkan sebanyak 42.926, maka masih ada selisih sebanyak 19.482 lembaga yang harus dicapai selama dua tahun ke depan.

Selain itu untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, Pemerintah memberikan penguatan melalui implementasi kurikulum 2013 PAUD yang dilaksanakan di 20 Kab/kota dengan jumlah pendidik yang dilatih adalah 1.600 pendidik PAUD. Dalam upaya peningkatan mutu lembaga PAUD dan kesiapan lembaga untuk mendapatkan akreditasi, pada tahun 2017 telah diberikan bantuan APE kepada 2.952 lembaga.

IKSS 7.2 “Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)” realisasi kinerjanya melampaui target yang ditetapkan. Program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 63,10%. Program kursus dan pelatihan yang berhasil menerapkan KKNi mencapai 68,55% atau sebanyak 9.350 lembaga. Dengan demikian persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 109%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,55%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 maka capaian tersebut masih memiliki selisih sebesar 2,83%. Tercatat target di akhir periode renstra sebesar 71,38%.

Angka ini meliputi program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan satuan Pendidikan Non Formal lainnya seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Rumah Pintar, dll serta organisasi kemasyarakatan.

Meningkatnya persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi tersebut diantaranya ditunjang oleh implementasi dan fasilitasi penerapan kurikulum berbasis KKNi kepada LKP yang relevan yang dilakukan secara sinergi baik oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT P2-PAUD Dikmas dan BP-PAUD Dikmas di tingkat provinsi, Dinas

Kabupaten/kota, organisasi mitra kursus dan pelatihan, konsorsium, dunia usaha dan dunia industri serta mitra kursus dan pelatihan lainnya.

Walaupun target telah tercapai bahkan melebihi, masih dijumpai kendala dalam penerapan KKNi, di antaranya: 1) masih banyak program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di daerah terpencil atau pedesaan, daerah perbatasan dan pulau terluar, yang belum mengacu kepada SKL berbasis KKNi akibat belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah; 2) beberapa unit kompetensi yang ada di KKNi belum dapat diajarkan secara optimal oleh sebagian pendidik kursus dan pelatihan karena belum dikuasainya kompetensi tersebut sehingga diperlukan *upgrading* secara berkesinambungan; 3) implementasi dan fasilitasi penerapan kurikulum berbasis KKNi pun masih terbatas dilakukan di wilayah regional dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Beberapa terobosan sudah dilakukan dalam rangka mendorong LKP untuk menggunakan SKL berbasis KKNi antara lain:

- Menyebarkan informasi tentang KKNi melalui laman www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus atau www.infokursus.net;
- Mewajibkan kepada seluruh penerima program bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dengan tujuan bekerja untuk menggunakan SKL berbasis KKNi bagi program kursus dan pelatihan yang sudah disusun SKL berbasis KKNi nya. Sehingga nantinya pada saat dilakukan uji kompetensi harapannya tingkat persentase kelulusan akan tinggi;
- Lebih mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan KKNi melalui APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
- Bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan uji kompetensi bagi pendidik kursus dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi.

Berikut rincian jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi:

No	Jenis Keterampilan	Program Kursus yang dilaksanakan	Program Kursus Menerapkan KKNi
1	Akuntansi	414	269
2	Akupunktur	83	55
3	Broadcasting (Kameramen)	48	36
4	Broadcasting (Penyiaran)	51	43
5	Broadcasting (Video Editing)	48	29
6	Ekspor Impor	19	14
7	Hantaran	267	214
8	Merangkai Bunga dan Desain Floral	95	67
9	Musik (Piano Pop dan Jazz)	375	221
10	Spa	212	191
11	Tata Boga (Jasa Usaha Makanan)	469	333
12	Tata Boga (Pastry and Bakery)	426	277
13	Tata Busana	3.283	2.659
14	Tata Kecantikan Kulit	953	686
15	Tata Kecantikan Rambut	1.940	1.393
16	Tata Rias Pengantin	1.744	1.221
17	Sekretaris	80	40
18	Bordir dan Sulam	324	191
19	Master of Ceremony	26	10
20	Mengemudi Kendaraan Bermotor	556	311

No	Jenis Keterampilan	Program Kursus yang dilaksanakan	Program Kursus Menerapkan KKNI
21	Sinshe	2	2
22	Baby Sitter	141	96
23	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	1	1
24	Otomotif (Mekanik Sepeda Motor)	602	433
25	Perpajakan	58	36
26	Pijat Refleksi	24	18
27	Senam	81	46
28	Perhotelan (Housekeeping)	190	122
29	Elektronika	250	128
30	Fotografi	32	16
31	Pekarya Kesehatan (Asisten Perawat)	109	52
32	Desain Grafis	174	99
33	Membatik	12	8
34	Las	107	19
35	Bahasa Jepang	252	13
Jumlah		13.640	9.350

SS8 Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah

Sampai dengan tahun 2017, Mutu layanan pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan makin banyaknya satuan pendidikan dasar dan menengah yang memperoleh akreditasi dan makin banyak sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain mutu layanan yang meningkat, mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah juga menunjukkan peningkatan kualitas meskipun secara kuantitas nilai UN menurun. Peningkatan IIUN memberikan dampak pada peta kualitas mutu pendidikan yang sebenarnya.

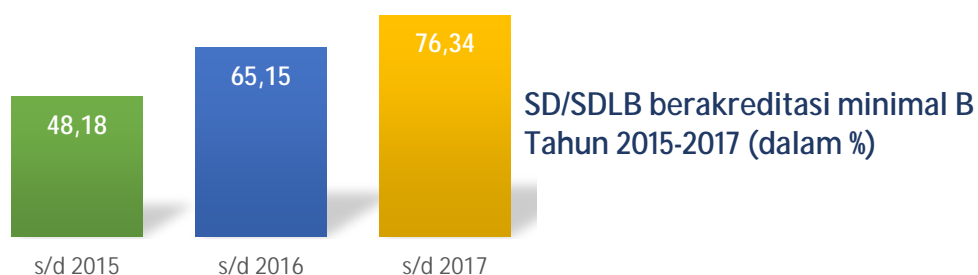
Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	66%	72%	76,34%	106	84,20	91%
2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	56,36%	68%	67,92%	100	81	84%
3. Persentase SMA/SLB berakreditasi minimal B	70,50%	81,83%	73,09%	89	85	86%
4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	50,66%	58,27%	64,81%	111	65	100%
5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	70,1%	61,35%	74,13%	121	61,49	121%
6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	70,9%	75,13%	63,80%	85	75,37	85%
7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	64,48%	60%	53,11%	89	68	78%
8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	7,29	6,7	6,84	102	7,5	91%
9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	5,85	6,7	5,45	81	7,5	73%
10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	5,5	6,7	5,09(sma) 4,7 (smk)	76(sma) 70(smk)	7,5	68% (sma) 63%(smk)
11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	100,37%	73%	99,91%	136,9	80	124,9%

Pada tahun 2017, siswa Indonesia memperoleh 30 Emas, 39 Perak, 29 Perunggu dalam kompetisi Internasional

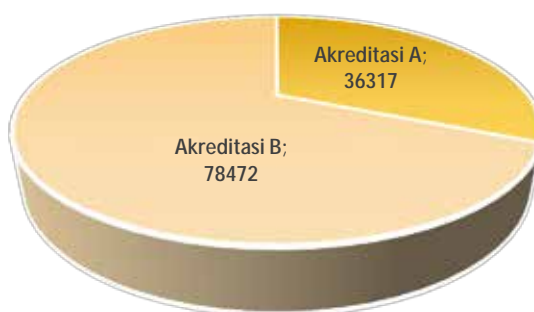
Lomba	Jenjang	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
		30	39	29
Thailand Open Chess Championship	SD	1	0	1
International Mathematics Competition (IMC)	SD	1	3	2
2 nd edition of International Karate Open of Province de Liege	SD	4	2	1
International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)	SD	3	6	3
The 31 st Coupe Internationale de Kayl Karate	SMP	4	3	2
8 th International Teenagers Mathematics Olympiad 2017	SMP	5	7	2
Expo Science Mexico 2017	SMP	2	-	-
14 th International Junior Science Olympiad (IJSO)	SMP	4	3	2
International Biology Olympiad (IBO)	SMA	1	2	1
International Chemistry Olympiad (IChO)	SMA	1	1	-
International Earth Science Olympiad (IESO)	SMA	1	4	2
International Geography Olympiad (IGEO)	SMA	1	-	2
International Mathematics Olympiad (IMO)	SMA	-	2	3
International Olympiad Astronomy an Astrophysics (IOAA)	SMA	-	-	5
International Olympiad in Informatics (IOI)	SMA	-	1	3
International Physics Olympiad (IPhO)	SMA	2	3	-
World Skills Competition	SMK		2	

IKSS 8.1 “Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B” capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 SD/SDLB yang berakreditasi minimal B ditargetkan sebesar 72%, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 76,34%.

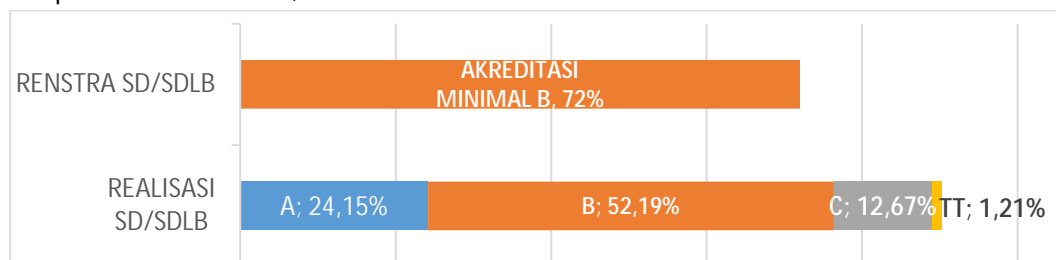
Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Tercatat pada tahun sampai dengan tahun 2016 sendiri persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B baru mencapai 66%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 84,20% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih sebesar 7,86%.



Pencapaian akreditasi sampai dengan tahun 2017 untuk satuan pendidikan SD/SDLB, dengan rincian SD sebanyak 134.489 satuan pendidikan dan SDLB sebanyak 1.175 satuan pendidikan, sehingga total SD/SDLB yang diakreditasi sebanyak 135.664 satuan pendidikan. SD/SDLB dengan peringkat akreditasi A sebanyak 36.317 satuan pendidikan atau 24,15% dan akreditasi B sebanyak 78.472 satuan



pendidikan atau 52,19%, sehingga total SD/SDLB berakreditasi minimal B sebanyak 114.789 satuan pendidikan atau 76,34%.



Untuk tahun 2017 Akreditasi Sekolah/Madrasah difokuskan untuk a) memprioritaskan sasaran akreditasi Sekolah/Madrasah yang belum diakreditasi dan berada pada daerah 3T; b) memprioritaskan sasaran akreditasi Sekolah/Madrasah yang diakreditasi ulang tetapi berperingkat C dan TT; dan c) meningkatkan persentase capaian Sekolah/Madrasah yang berperingkat A dan B.

Berikut rincian sekolah jenjang SD yang berhasil diakreditasi oleh BAN S/M di tahun 2017 untuk jenjang SD.

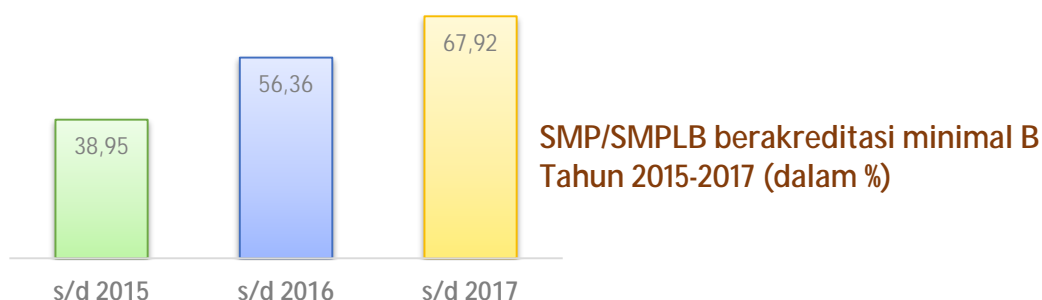
NO	SUMBER DANA	A	B	C	TT	DIAKREDITASI	TERAKREDITASI
A	APBN KEMENDIKBUD						
	SD/MI	3.872	10.631	2.686	179	17.368	17.189
B	APBN KEMENAG						
	SD/MI	20	81	43		144	144
C	APBD PROVINSI						
	SD/MI	518	226	3		747	747
D	APBD KAB/KOTA						
	SD/MI	1.111	2.377	467	28	3.983	3.955

Untuk mendukung dan membantu ketercapaian indikator kinerja, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah agar sekolah SD dapat memenuhi SNP, bantuan yang diberikan Kemendikbud di tahun 2017 diantaranya:

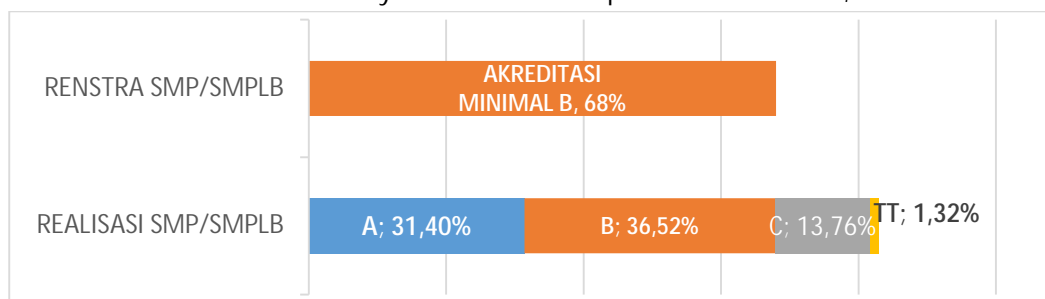
- Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 200 ruang;
- Rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 15.480 ruang;
- Renovasi sekolah sebanyak 101 SD;
- Pembangunan perpustakaan SD sebanyak 424 ruang;
- Pembinaan Sekolah Rujukan sebanyak 490 SD;
- Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 543 sekolah;
- Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SD sebanyak 51.527 sekolah;

IKSS 8.2 “Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B” realisasi capaian kinerjanya telah mencapai target. Pada tahun 2017 SMP/SMPLB berakreditasi minimal B ditargetkan sebesar 68%, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 67,92%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang hanya 56,36%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 11,56%. Meskipun terjadi kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 81% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 13,08%.



Pencapaian akreditasi sampai dengan tahun 2017 untuk satuan pendidikan SMP/SMPLB, dengan rincian SMP sebanyak 32.475 satuan pendidikan dan SMPLB sebanyak 79 satuan pendidikan, sehingga total SMP/SMPLB yang diakreditasi sebanyak 32.554 satuan pendidikan. SMP/SMPLB dengan peringkat akreditasi A sebanyak 12.316 satuan pendidikan atau 31,40% dan akreditasi B sebanyak 14.324 satuan pendidikan atau 36,52%, sehingga total SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sebanyak 26.640 satuan pendidikan atau 67,92%.



Berikut rincian sekolah jenjang SMP yang berhasil di akreditasi oleh BAN S/M di tahun 2017 untuk jenjang SMP.

NO	SUMBER DANA	A	B	C	TT	DIAKREDITASI	TERAKREDITASI
A	APBN KEMENDIKBUD						
	SMP/MTs	2.326	3.583	1.493	145	7.547	7.402
B	APBN KEMENAG						
	SMP/MTs	15	88	68	4	175	171
C	APBD PROVINSI						
	SMP/MTs	39	6			45	45
D	APBD KAB/KOTA						
	SMP/MTs	256	321	133	10	720	710

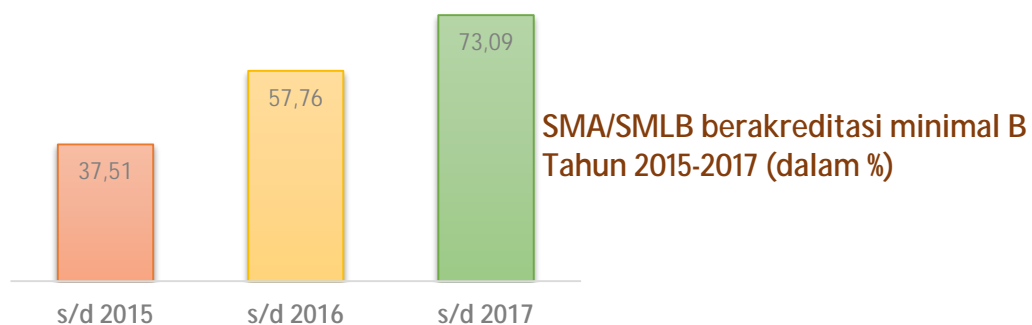
Untuk mendukung dan membantu ketercapaian indikator kinerja, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah agar sekolah SMP dapat memenuhi SNP, bantuan yang diberikan Kemendikbud di tahun 2017 diantaranya;

- Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 300 ruang;

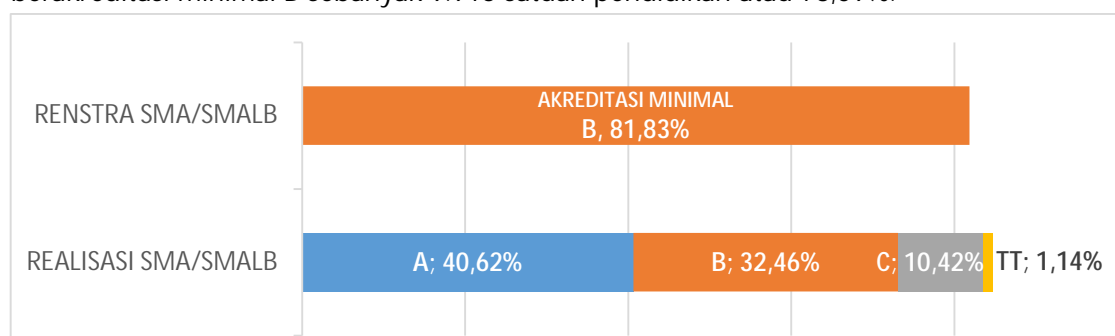
- b. Rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 17.129 ruang;
- c. Renovasi sekolah sebanyak 101 SMP;
- d. Pembangunan perpustakaan SMP sebanyak 350 ruang;
- e. Ruang laboratorium yang dibangun sebanyak 440 ruang;
- f. Pembinaan Sekolah Rujukan sebanyak 514 SMP;
- g. Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 771 sekolah;
- h. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMP sebanyak 13.900 sekolah; dan
- i. Bantuan peralatan pendidikan kepada 6.130 sekolah.

IKSS 8.3 “Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B” capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan. SMA/SMLB berakreditasi minimal B ditargetkan sebesar 81,83%, dari target tersebut, SMA berakreditasi minimal B baru mencapai 73,09% di tahun 2017. Meskipun belum mencapai target, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 SMA/SMLB berakreditasi minimal B baru mencapai 70,50%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 11,91%. Tercatat persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B ditargetkan sebesar 85% di tahun 2019.



Pencapaian akreditasi sampai dengan tahun 2017 untuk satuan pendidikan SMA/SMALB, dengan rincian SMA sebanyak 11.422 satuan pendidikan dan SMALB sebanyak 61 satuan pendidikan, sehingga total SMA/SMALB yang diakreditasi sebanyak 11.483 satuan pendidikan. SMA/SMALB dengan peringkat akreditasi A sebanyak 5.511 satuan pendidikan atau 40,62% dan akreditasi B sebanyak 4.404 satuan pendidikan atau 32,46%, total SMA/SMALB berakreditasi minimal B sebanyak 9.915 satuan pendidikan atau 73,09%.



Berikut rincian sekolah jenjang SMA/MA yang berhasil di akreditasi oleh BAN S/M di tahun 2017 untuk jenjang SMA/MA.

NO	SUMBER DANA	A	B	C	TT	DIAKREDITASI	TERAKREDITASI
A	APBN KEMENDIKBUD						
	SMA/MA	1.334	1.511	580	75	3.500	3.425
B	APBN KEMENAG						
	SMA/MA	21	44	23	1	89	88
C	APBD PROVINSI						
	SMA/MA	42	97	80	3	222	219
D	APBD KAB/KOTA						
	SMA/MA		4	6		10	10

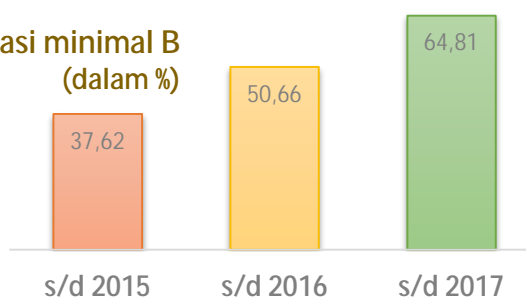
Untuk mendukung dan membantu ketercapaian indikator kinerja, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah agar sekolah SMA dapat memenuhi SNP, bantuan yang diberikan Kemendikbud di tahun 2017 diantaranya;

- Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1.024 ruang;
- Rehabilitasi ruang kelas SMA sebanyak 5.281 ruang;
- Renovasi sekolah sebanyak 103 SMA;
- Pembangunan perpustakaan SMA sebanyak 351 ruang;
- Ruang laboratorium yang dibangun sebanyak 467 ruang;
- Pembinaan Sekolah Rujukan sebanyak 613 SMA;
- Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 3.557 sekolah;
- Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMA sebanyak 9.398 sekolah; dan
- Bantuan peralatan pendidikan kepada 1.979 sekolah.

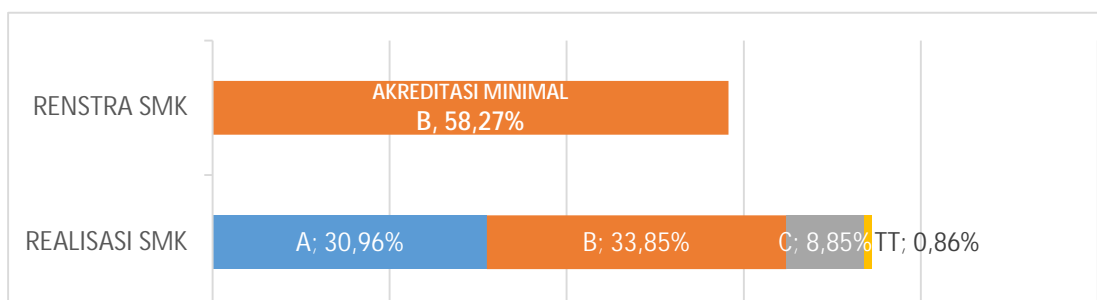
IKSS 8.4 “Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B” capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 paket keahlian SMK yang berakreditasi minimal B ditargetkan sebesar 58,27%, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 64,81%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,15%. Tercatat di tahun 2016, paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sebanyak 50,66%. Namun jika bandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 65% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 0,19%. Dengan sisa waktu dua tahun, selisih sebesar 0,19% tersebut optimis dapat tercapai dengan baik.

**Paket keahlian SMK berakreditasi minimal B
(dalam %)**



Pencapaian akreditasi sampai dengan tahun 2017 untuk SMK sebanyak 27.119 program keahlian, dengan perincian yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak 11.267 program keahlian atau 30,96% dan akreditasi B sebanyak 12.318 program keahlian atau 33,85%, sehingga total SMK berakreditasi minimal B sebanyak 23.585 program keahlian atau 64,81%.



Berikut rincian sekolah jenjang SMK yang berhasil di akreditasi oleh BAN S/M di tahun 2017 untuk jenjang SMK.

NO	SUMBER DANA	A	B	C	TT	DIAKREDITASI	TERAKREDITASI
A	APBN KEMDIKBUD						
	SMK	2.128	2.381	748	66	5.323	5.257
B	APBN KEMENAG						
	SMK/MAK	-	-	-	-	-	-
C	APBD PROVINSI						
	SMK	250	383	98	5	736	731
D	APBD KAB/KOTA						
	SMK	3	10	8		21	21

Untuk mendukung dan membantu ketercapaian indikator kinerja, Kemendikbud memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada sekolah agar sekolah SMA dapat memenuhi SNP, bantuan yang diberikan Kemendikbud di tahun 2017 diantaranya;

- Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1.000 ruang;
- Rehabilitasi ruang kelas SMK sebanyak 3.314 ruang;
- Pembangunan perpustakaan SMK sebanyak 208 ruang;
- Ruang Praktik siswa/keterampilan yang dibangun sebanyak 1.251 ruang;
- Pembinaan Sekolah Rujukan sebanyak 100 SMK;
- Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 233 sekolah;
- Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMK sebanyak 4.854 sekolah;
- Bantuan peralatan pendidikan kepada 7.445 sekolah;
- SMK yang bekerjasama dengan industri sebanyak 1.540 sekolah;
- SMK yang melakukan penyelarasan kejuruan sebanyak 1.280 sekolah;
- SMK yang melaksanakan *teaching/technopark* sebanyak 220 sekolah;
- SMK kelautan yang mendukung kemaritiman sebanyak 50 sekolah; dan
- SMK pariwisata yang mendukung industri pariwisata sebanyak 50 sekolah;
- SMK pertanian yang mendukung ketahanan pangan sebanyak 100 sekolah.

Akreditasi diberikan kepada sekolah yang telah memenuhi delapan SNP. Kewenangan pelaksanaan dan pemberian akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah bukan menjadi Kemendikbud melainkan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) selaku lembaga independen. Sedangkan kewenangan pemenuhan SNP pada pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Kemendikbud sesuai dengan kewenangannya hanya mendorong dan membantu kepada sekolah agar sekolah memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan makin banyaknya sekolah yang memperoleh akreditasi diharapkan akan mutu pendidikan semakin merata di seluruh daerah.

Selain memberikan dukungan dan bantuan di atas, Kemendikbud melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada di 34 Provinsi juga melakukan fasilitasi dan supervisi kepada sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam hal pemenuhan delapan SNP. Dengan fasilitasi dan supervisi SNP diharapkan sekolah dapat dengan mudah memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan akreditasi baik tingkat pendidikan dasar dan menengah mengalami beberapa kendala, antara lain :

- a. Sasaran akreditasi belum sepenuhnya bisa menjangkau daerah-daerah 3T terutama di wilayah Indonesia bagian timur Indonesia. Pada saat asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah dan sosialisasi instrumen terkendala tidak hanya pada jaringan/akses internet, tetapi juga cuaca (musim) karena menggunakan transportasi laut. Oleh karena itu sasaran pada tahun berikutnya untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud harus bisa menjangkau daerah 3T;
- b. Sistem penilaian akreditasi yang digunakan sudah berbasis *on-line*, sehingga untuk daerah-daerah tertentu yang belum ada jaringan internet harus ada kebijakan khusus dari BAN S/M;
- c. Perangkat akreditasi baru belum sesuai dengan kondisi lapangan, karena masih terdapat sekolah/madrasah yang menggunakan kurikulum 2006;
- d. Kuantitas dan kualitas asesor menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan akreditasi dikarenakan ketersediaan asesor per jenjang masih belum proporsional terhadap jumlah sekolah/madrasah. Disamping itu variasi latar belakang pekerjaan asesor masih harus di evaluasi, karena umumnya asesor sekarang adalah pengawas yang berada dalam lingkungan dinas pendidikan maupun kantor wilayah kementerian agama.

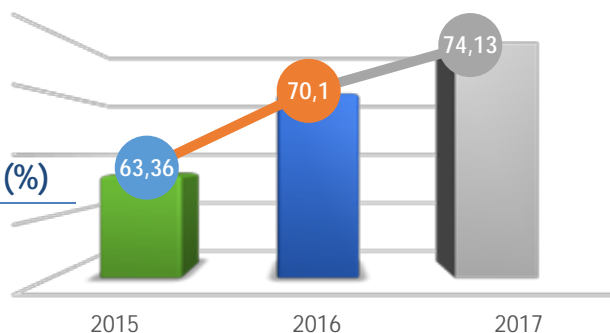
Untuk mengatasi kendala yang dialami tersebut telah diambil langkah-langkah antisipasi diantaranya:

- a. Untuk menjaga kualitas asesor, pada tahun mendatang sistem rekrutmen harus dilakukan secara *on line*;
- b. Penyempurnaan SisPenA harus dilakukan untuk memudahkan para pengguna terutama sekolah/madrasah dan asesor;
- c. Perangkat akreditasi terutama untuk standard pembiayaan memerlukan peninjauan ulang tentang item-item instrumen yang ada dalam standard pembiayaan.

IKSS 8.5 “Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM” capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. SD/SDLB yang memenuhi SPM ditargetkan sebesar 61,35% di tahun 2017. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 74,13%.

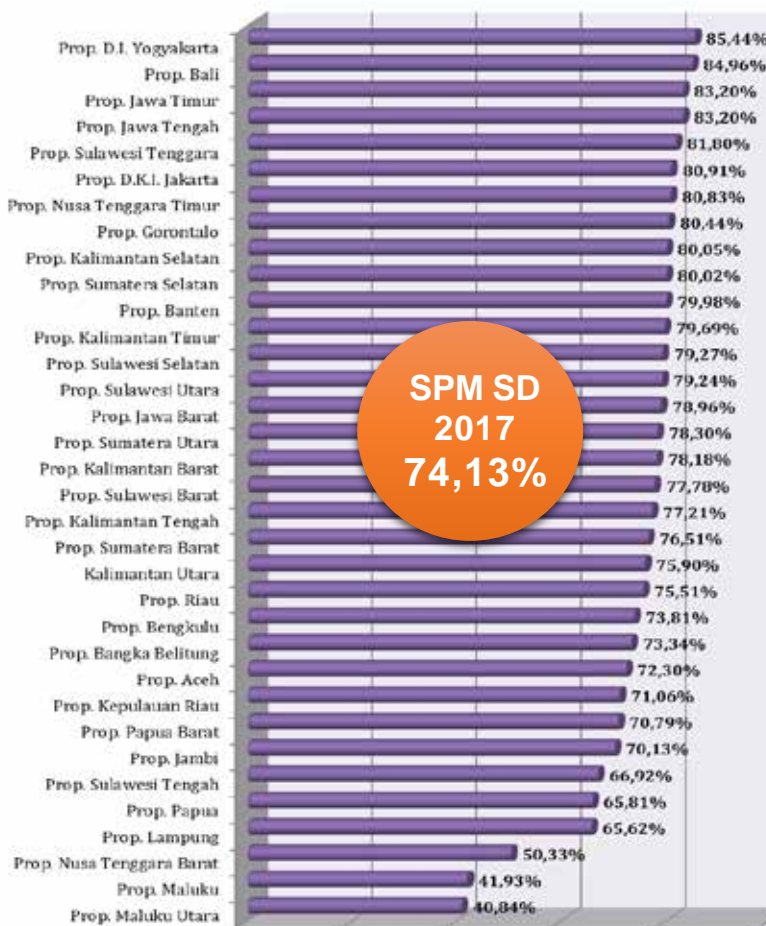
Realisasi capaian tahun 2017 meningkat sebesar 4,03% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Tercatat SD/SDLB yang memenuhi SPM di tahun 2016 sebesar 70,1%. Selain meningkat dari tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 juga melampaui target akhir periode renstra 2019. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM di tahun 2019 sendiri ditargetkan sebesar 61,49%.

**Tren Kenaikan
SD/SDLB yang memenuhi SPM (%)**



SPM SD meliputi pemenuhan terhadap 4 standar pendidikan yaitu ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan. Keempat standar tersebut diuraikan menjadi 27 indikator pencapaian yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Kab/kota dan satuan pendidikan.

Pemenuhan SPM jenjang sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah Kab/kota dan satuan pendidikan, hal itu tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010



Grafik capaian SPM SD 2017

Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab/Kota dan satuan pendidikan dasar. Pemerintah Kab/Kota bertanggungjawab pemenuhan atas 14 pelayanan pendidikan dasar untuk dipenuhi sedangkan satuan pendidikan bertanggungjawab pemenuhan atas 12 pelayanan pendidikan dasar.

Meskipun pemenuhan SPM pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah Kab/Kota, namun Kemendikbud terus mendorong dan membantu pemenuhan SPM jenjang pendidikan sekolah dasar. Beberapa program yang dijalankan Kemendikbud untuk membantu pemenuhan SPM pendidikan dasar antara lain pemberian BOS, Guru Garis Depan, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas rusak, pemberian bantuan pembangunan perpustakaan, bantuan peralatan pendidikan, pembinaan manajemen berbasis sekolah dan pembinaan proses belajar dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku.

Untuk tahun 2017, Kemendikbud telah membangun 11 sekolah SD, pembangunan 200 RKB, rehab ruang kelas sebanyak 15.480 ruang kelas, renovasi sekolah sebanyak 101 sekolah, pembangunan 424 perpustakaan, pembinaan Manajemen Berbasis Kinerja (MBS) sebanyak 543 sekolah, pembinaan sekolah yang melaksanakan kurikulum 13 sebanyak 51.527 sekolah, dan bantuan peralatan pendidikan kepada sebanyak 4.191 sekolah.

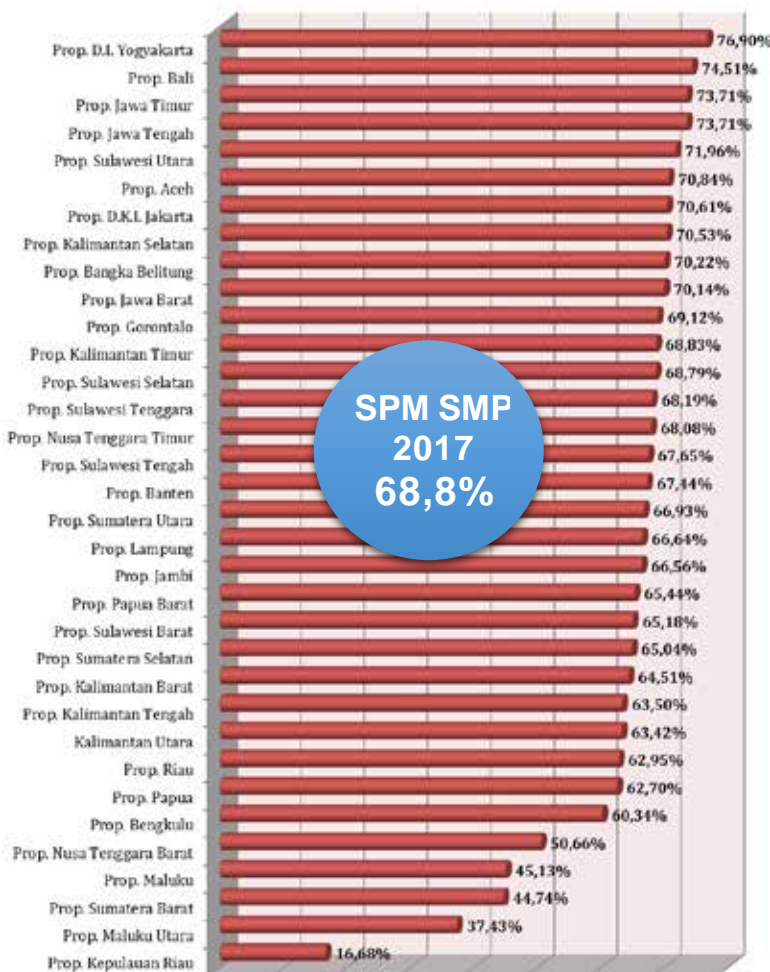
IKSS 8.6 “Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM” realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. SMP/SMPLB yang memenuhi SPM ditargetkan sebesar 75,13% di tahun 2017. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 63,80%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami koreksi sebesar -7,1%. Tercatat pada tahun 2016 SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebesar 70,9%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 yaitu sebesar 75,37% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 11,57%. Perlu kerja keras baik pemerintah dan pemerintah daerah agar target yang ditetapkan tersebut dapat tercapai di tahun 2019.

SPM SMP meliputi pemenuhan terhadap 4 standar pendidikan yaitu ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan. Keempat standar tersebut diuraikan menjadi 22 indikator pencapaian yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh kab/kota dan satuan pendidikan.

Sama seperti pencapaian SPM Sekolah Dasar, pencapaian SPM untuk jenjang SMP merupakan tanggung jawab pemerintah Kab/kota dan satuan pendidikan. Meskipun pemenuhan layana SPM pendidikan dasar menjadi tanggungjawab Pemerintah Kab/Kota, namun Kemendikbud terus mendorong dan membantu pemenuhan SPM pada jenjang SMP.

Grafik capaian SPM SMP 2017



Beberapa program yang dijalankan Kemendikbud untuk pemenuhan SPM pendidikan dasar antara lain pemberian BOS, pengiriman GGD, pembangunan USB SMP, pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas rusak, bantuan pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan, bantuan peralatan pendidikan, dan pembinaan manajemen berbasis sekolah.

Untuk tahun 2017, Kemendikbud telah membangun 50 sekolah SMP, 50 SD-SMP satu atap, pembangunan 300 RKB SMP, rehab ruang kelas sebanyak 17.129 ruang kelas SMP, renovasi sebanyak 101 sekolah, pembangunan 350 perpustakaan, pembangunan 440 laboratorium, pembinaan MBS sebanyak 71 sekolah, dan

bantuan peralatan pendidikan kepada 6.130 sekolah SMP, pembangunan ruang penunjang lainnya sebanyak 100 ruang, dan rehab ruang penunjang lainnya sebanyak 1.415 ruang, dan sekolah yang dilakukan pembinaan pelaksanaan kurikulum K13 sebanyak 13.900 sekolah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar antara lain mengenai penyediaan sekolah dan pemerataan guru. Untuk penyediaan sekolah, Pemerintah kesulitan melakukan pembangunan dikarenakan seringnya ditemui permasalahan legalitas lahan yang akan dibangun. Masalah tersebut menyebabkan pembangunan sekolah sering kali dibatalkan. Sedangkan untuk penyediaan guru yang sesuai SPM pada satuan pendidikan, Kemendikbud kesulitan untuk memenuhinya karena pengadaan dan mutasi guru pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah Kab/kota dan bukan kewenangan Kemendikbud.

Untuk mengatasi masalah kekurangan guru tersebut, Kemendikbud telah menjalankan program guru garis depan. Guru yang berprestasi akan dikirimkan ke daerah-daerah yang masih kekurangan guru terutama pada daerah terdepan, terluar dan Tertinggal.

IKSS 8.7 “Kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1” realisasi capaian kinerjanya belum mencapai target dari yang ditetapkan, Dari target yang ditetapkan sebesar 60% baru terealisasi sebesar 53,11%. Capaian tahun 2017 tersebut mengalami koreksi sebesar 11,37% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Tercatat

pada tahun 2016 ada sebanyak 64,48% kab/kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 68% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih sebesar 14,89%. Pemerintah Kab/Kota perlu kerja agar selisih sebesar 14,89% dapat tercapai dua tahun ke depan.

Sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM pendidikan dasar di Kabupaten/Kota, pencapaian SPM pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah Kab/kota dan tingkat satuan pendidikan. Ada empat belas butir pelayanan pendidikan dasar yang harus dipenuhi oleh Kab/kota, yaitu :

1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan;
6. setiap SMP/MTs tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. setiap SD/MI tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. setiap kab/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12. setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Meskipun menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemenuhan SPM ada pada pemerintah Kab/kota, Kemendikbud berupaya mendukung dan membantu pencapaian layanan SPM pendidikan dasar. Beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain pemberian BOS, pembangunan USB, pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas rusak, pemberian bantuan peralatan pendidikan, pembangunan perpustakaan dan laboratorium, dan pengiriman guru dan tenaga pendidik ke daerah-daerah 3T melalui program guru garis depan.

IKSS 8.8 “Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB” realisasi capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB ditargetkan sebesar 6,7 di tahun 2017. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 6,84.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, rata-rata nilai ujian sekolah tingkat SD/SDLB mengalami koreksi -0,45 poin. Selain mengalami koreksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih sebesar 0,66 poin. Tercatat rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,5.

Ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah jenjang sekolah SD sederajat yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Porsi penyusunan soal ketiga mata pelajaran tersebut terdiri dari 75% soal yang disusun oleh daerah dan 25% soal disiapkan oleh Pusat.

Mulai tahun 2018, Kemendikbud menetapkan kebijakan baru untuk ujian akhir jenjang SD yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah. Sebanyak 70 sampai dengan 80% soal USBN jenjang SD disiapkan oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang kemudian dikonsolidasikan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) sisanya disiapkan oleh pusat. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN tetap tiga mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPA dan Matematika, dengan porsi 90% soal berjenis pilihan ganda dan 10% berbentuk esai.

Sedangkan untuk ujian sekolah (US), 100% soal disiapkan guru di sekolah masing-masing berdasarkan kisi-kisi nasional yang disiapkan oleh pusat. Ada lima mata pelajaran yang diujikan dalam US yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan keterampilan, dan Penjaskes dan Olahraga. Kemendikbud mendorong guru-guru untuk membuat soal US dengan kombinasi pilihan ganda dan esai.

Dengan pelaksanaan USBN, Kemendikbud mengembalikan peran guru dalam evaluasi belajar pada satuan pendidikan. Dengan USBN juga diharapkan akan meningkatkan kompetensi guru dan capaian kompetensi lulusan.

IKSS 8.9 “Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB” capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata nilai UN SMP untuk tahun 2017 baru mencapai 5,45 sedangkan pada tahun tersebut ditargetkan sebesar 6,7. Rata-rata nilai UN tersebut juga mengalami koreksi sebesar -4,02 dari tahun sebelumnya. Tercatat nilai UN jenjang SMP untuk tahun 2016 sebesar 5,85. Secara umum, hasil UN jenjang SMP mengalami penurunan. Penurunan terjadi terutama pada sekolah yang beralih dari UN berbasis kertas pensil ke UN berbasis komputer.

Selain mengalami koreksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih sebesar 2,05 poin. Tercatat rata-rata UN SMP/SMPLB pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,5.

HASIL UN SMP 2016-2017

MODE	JENJANG	STATUS	JUMLAH		RERATA UN		PERUB
			SEKOLAH	PESERTA	2017	2016	
UNBK & UNKP	SMP/MTS	N & S	54,771	4,157,035	54.25	58.61	-4.36
		NEGERI	24,862	2,617,712	54.57	58.85	-4.28
		SWASTA	29,909	1,539,323	53.71	58.19	-4.48
	SMP	N & S	36,982	3,153,075	54.54	58.57	-4.02
		NEGERI	22,462	2,353,946	54.68	58.86	-4.17
		SWASTA	14,520	799,129	54.13	57.70	-3.57
	MTS	N & S	16,845	977,748	53.49	59.06	-5.57
		NEGERI	1,458	237,569	54.21	60.14	-5.92
		SWASTA	15,387	740,179	53.27	58.72	-5.45

HASIL UN PER MAPEL 2016-2017

	2017					2016				
	BIN	ING	MAT	IPA	RATA	BIN	ING	MAT	IPA	RATA
TOTAL	64.32	50.18	50.31	52.19	54.25	70.75	57.17	50.24	56.26	58.61
UNBK	70.20	49.08	47.75	51.97	54.75	78.30	65.96	53.39	60.98	64.66
UNKP	61.52	50.71	51.53	52.29	54.01	70.45	56.83	50.12	56.08	58.37

HASIL UNPK PAKET B 2016/2017

MODE	JM. SEK	JM. PES	BIN	ING	MAT	IPA	IPS	PKN	RERATA	IIUN
UNBK	693	14281	55.15	41.53	36.22	38.83	48.11	50.44	45.05	100
UNKP	3674	88228	61.34	56.43	55.66	51.91	55.98	55.15	56.08	47.02

Penurunan nilai UN juga dipengaruhi oleh meningkatnya integritas pelaksanaan UN 2017, baik melalui perubahan mode dari UNKP menjadi UNBK, atau UNKP integritas rendah menjadi integritas tinggi. Penurunan terbesar terjadi pada sekolah dengan integritas rendah di tahun 2016.

Pelaksanaan UN jenjang SMP tahun 2017 berjalan dengan lancar. Perubahan secara masif terjadi dari mode pelaksanaan UN yaitu dari mode UNKP ke UNBK (11.096 SMP/MTs) berjalan minim kendala karena kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.

Perubahan dari UNKP ke UNBK secara masif meningkatkan integritas pelaksanaan UN (menekan kecurangan) dan meningkatkan keandalan hasil UN. Peningkatan integritas juga merubah peringkat capaian antar daerah. Sekolah yang selama ini integritas tinggi cenderung tidak mengalami perubahan capaian, bahkan meningkat. Sementara sekolah dengan IIUN rendah di tahun sebelumnya mengalami penurunan capaian setelah beralih ke UNBK atau meningkat IIUNnya. Hasil UN yang murni bila digunakan untuk perbaikan pembelajaran menunjukkan peningkatan capaian secara nyata pada capaian siswa di tahun berikutnya.

Soal-soal UN semakin mencerminkan tuntutan kurikulum, dengan cakupan level *kognisi* yang semakin komprehensif. Diharapkan pembelajaran di kelas juga makin berorientasi ke penuntasan kurikulum.

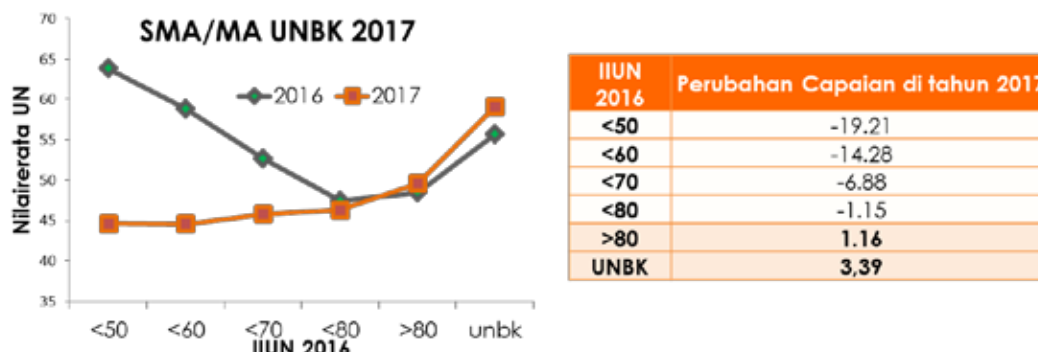
Yang terpenting dari hasil UN adalah bagaimana hasil tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa program perbaikan yang dilaksanakan Kemendikbud antara lain: 1) pemerataan kualitas pendidikan, Kemendikbud telah menggulirkan kebijakan zonasi sekolah di tahun 2017. Peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin; 2) peningkatan profesionalisme guru dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan; 3) pemenuhan guru khususnya di daerah-daerah 3T.

IKSS 8.10 “Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK”realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata nilai ujian baik SMA dan SMK tidak mencapai target. Pada tahun 2017 baik SMA dan SMK nilai UN ditargetkan sebesar 6,7. Untuk sekolah SMA baru berhasil terealisasi sebesar 5,09 sedangkan sekolah SMK terealisasi lebih rendah yaitu 4,7.

Selain mengalami koreksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih sebesar 2,41 poin untuk SMA dan 2,8 poin untuk SMK. Tercatat rata-rata UN SMA dan SMK pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,5. Diperlukan upaya yang lebih agar nilai rata-rata UN khususnya jenjang sekolah menengah dapat meningkat tanpa harus mengorbankan kejujuran/integritas-nya.

SEKOLAH	SMA			SMK			MA		
	Hasil UN			Hasil UN			Hasil UN		
	2016	2017	Perubahan	2016	2017	Perubahan	2016	2017	Perubahan
NEGERI & SWASTA	55.02	50.93	(4.09)	52.84	47.01	(5.83)	53.92	48.45	(5.47)
NEGERI	55.46	51.37	(4.09)	53.65	48.88	(4.77)	55.35	50.74	(4.61)
SWASTA	53.87	49.72	(4.15)	52.27	45.74	(6.53)	53.21	47.34	(5.87)
UNBK	58.61	52.33	(6.28)	52.75	47.36	(5.39)	52.79	49.04	(3.75)
UNKP	54.20	47.95	(6.25)	52.90	44.98	(7.92)	53.98	47.90	(6.08)

Senada dengan hasil UN jenjang SMP/MTS, hasil UN tahun 2017 jenjang SMA/MA, maupun SMK mengalami penurunan. Namun penurunan capaian tersebut terjadi secara rerata lintas semua mode penyelenggaraan tes. Jika dilihat trend capaian UN khusus sekolah UNBK 2 tahun berturut-turut, nilai UN mengalami kenaikan 3,39 dari skala 100. Kebijakan pemilihan mata pelajaran UN yang keempat juga memberikan hasil yang positif berupa peningkatan nilai pada mata pelajaran pilihan.



Hasil angket menunjukkan bahwa siswa senang dengan kebijakan mata pelajaran pilihan dan motivasi terbesar dalam menentukan pilihan adalah memilih mata pelajaran yang paling disukai. Pada jenjang SMK, capaian nilai UN murni tidak mengalami perubahan yang signifikan. Relative stabil.

Meskipun rata-rata nilai UN SMA/SMK sederajat mengalami penurunan namun kita patut bersyukur Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tingkat SMA/SMK sederajat mengalami kenaikan. IIUN SMA tahun 2017 mencapai 73,12 lebih tinggi dari tahun 2016 yang baru mencapai 64,21.

Penurunan nilai rata-rata UN dikarenakan berbagai faktor diantaranya: 1) semakin meningkatnya kejujuran dalam pelaksanaan UN dan semakin banyak pula sekolah yang menggunakan UNBK yang menjadikan kecurangan tidak lagi terjadi; 2) dengan tidak digunakannya hasil UN dalam menentukan kelulusan siswa, keseriusan siswa dan guru dalam menyiapkan diri menghadapi UN mungkin juga berkurang; 3) bentuk kisi-kisi UN tahun 2017 yang tidak lagi berupa indikator soal yang rinci. Dengan kisi-kisi yang tidak rinci maka bentuk soal ujian tidak lagi bisa ditebak oleh bimbingan belajar atau latihan soal intensif (*drilling*) yang cenderung menyempitkan kurikulum. Kebijakan UN tahun 2017 menggunakan *blue print* atau kisi-kisi yang lebih luas (*general*), sedangkan pada tahun sebelumnya menggunakan kisi-kisi yang sangat rinci atau detil per indikator, sehingga sebagian besar sekolah yang terbiasa melakukan "*drilling*" dan "*narrowing curriculum*" mengalami penurunan capaian nilai UN; 4) Soal-soal UN tahun 2016 menggunakan irisan dari Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, pendekatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 mengalami sedikit perbedaan prinsip jika dibandingkan dengan pendekatan pada Kurikulum 2006. Dengan demikian terjadi hal yang kurang sinkron pada sekolah yang berbasis K-2013. Hal ini kemungkinan besar mempengaruhi capaian nilai UN pada sekolah tertentu.

Selain itu, dalam UN 2017 jumlah soal dengan ketrampilan berpikir orde tinggi juga ditingkatkan hingga mencapai 10%. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi

penilaian yang terus dilakukan untuk lebih mendorong siswa dan guru melakukan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan kompetensi abad 21.

Indonesia mengukir sejarah baru dalam penggunaan teknologi dalam ujian terstandar dengan terlaksananya UNBK di 30.577 sekolah/madrasah/pusat kegiatan belajar masyarakat yang diikuti oleh 3.731.099 siswa dan peserta kegiatan belajar mengajar. Peningkatan jumlah peserta UNBK dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 410%, sementara peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 760%.



Siswa jenjang SM sedang melaksanakan UNBK, mode UNBK akan meningkatkan kejujuran siswa sehingga dapat mengukur keberhasilan belajar mengajar yang sebenarnya

Pada jenjang pendidikan menengah, UN diikuti oleh 1.312.023 siswa dari 12.501 SMK, serta 2.301.176 siswa dari 20.512 SMA/MA/ sederajat. Untuk jenjang SMK, 1,176 juta siswa (90%) dilayani dengan UNBK, sementara pada jenjang SMA/MA 1,145 juta siswa (60%) dilayani dengan UNBK. Sisanya mengikuti UNKP.

Pada jenjang SMK, Provinsi Bangka-Belitung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan telah 100% menggunakan UNBK. Sementara pada jenjang SMA/MA, Provinsi Bangka-Belitung, DKI Jakarta, dan Yogyakarta telah 100% menggunakan UNBK.

Kemendikbud tetap menyelenggarakan UN di tahun 2018. Selain UN, Ujian Sekolah yang dilakukan masing-masing sekolah akan ditingkatkan mutunya menjadi USBN. USBN dilakukan hanya untuk beberapa mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. USBN jenjang SMA dan SMK, 75 sampai 80 persen naskah soal disiapkan oleh guru pada masing-masing sekolah sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan BNSP dan dikonsolidasikan dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sisanya disiapkan dari pusat.

IKSS 8.11 “Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu” capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan ditargetkan 73%. Dari target tersebut berhasil terrealisasi sebesar 99,91% dengan persentase capaian sebesar 136,9%.

Berikut hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di tahun 2017.

1. Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan

Dihasilkan sebanyak 206 model pengembangan kurikulum dan perbukuan, terdiri dari :

a. Model perbukuan.

Model perbukuan dikembangkan untuk menyediakan bahan perbukuan (buku teks utama, atau naskah buku teks, naskah buku nonteks pelajaran lainnya) sesuai dengan kebijakan dan muatan kurikulum terkini pada tingkat nasional dan daerah, serta bahan kebijakan perbukuan untuk mendukung penyediaan buku yang murah, merata dan bermutu.

b. bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD Dikmas.

Bertujuan untuk menghasilkan bahan penyempurnaan dan/atau revisi perangkat kurikulum dan pembelajaran berdasarkan masukan publik yang meliputi desain dan muatan kurikulum, model silabus, model RPP, model pembelajaran, model bahan ajar dan sumber belajar lainnya sesuai dengan tuntutan kurikulum terkini dalam mendorong pembelajaran yang efektif, efisien, berkualitas, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan dan daerah.

c. model kurikulum dan pembelajaran.

Disusun dalam bentuk pengembangan model kurikulum operasional tingkat sekolah/satuan pendidikan. Dihasilkan 10 model kurikulum dan pembelajaran berupa:

- 1) Naskah Diversifikasi Kurikulum;
- 2) Pedoman Pengembangan Muatan Lokal;
- 3) Naskah akademik lima hari sekolah;
- 4) Pedoman dan aktualisasi nilai dan moral Pancasila di satuan pendidikan;
- 5) Model KTSP SMA;
- 6) Kurikulum Bela Negara;
- 7) Kebijakan Implementasi HAM;
- 8) Kurikulum Anti Radikalisme;
- 9) Literasi bahasa dan sastra, Literasi sains, dan literasi numerasi;
- 10) Literasi digital dan TIK, literasi keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan

2. Ketersediaan Soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional.

Sebanyak 133.569 soal berhasil dikembangkan di tahun 2017 sesuai kebutuhan bank soal dan berkontribusi terhadap indikator program, berikut rinciannya.

No	Uraian	Target	Realisasi
Soal yang dikembangkan		130.830	133.569
1.	Soal Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dikembangkan (Pengembangan UKG dan Kepala Sekolah Model Baru)	4.500	5.295
2.	Soal Akademik yang dikembangkan	79.230	79.334
3.	Soal yang digunakan untuk mengukur kompetensi	47.100	48.940

3. Rekomendasi Kebijakan Arkeologi untuk Pelestarian Arkeologi.

Dihasilkan 105 rekomendasi kebijakan di tahun 2017. Hasil tersebut merupakan kontribusi sepuluh Balai Arkeologi dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

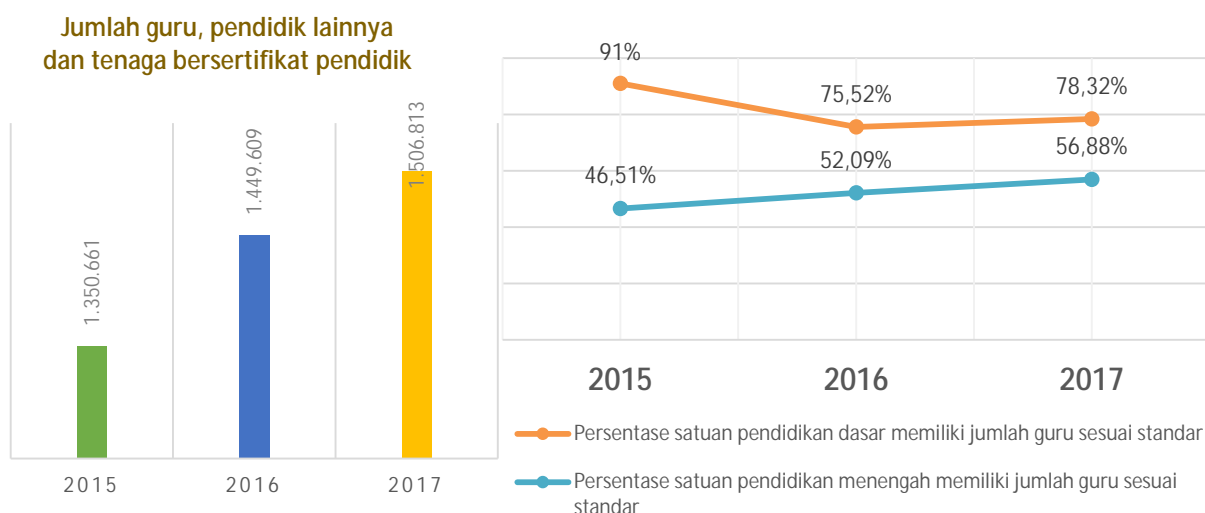
4. Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Peningkatan Mutu Pendidikan.

Dihasilkan enam naskah pengembangan/penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan. Keenam SNP tersebut adalah:

- Pengembangan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Mata Pelajaran Matematika dan IPA;
- Pengembangan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Mata Pelajaran IPS dan PPKN;
- Pengembangan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Mata Pelajaran Bahasa, Seni Budaya dan PJOK;
- Pengembangan Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti;
- Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Pengembangan Standar Pendidikan Kesetaraan.

SS9 Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan

Profesionalisme guru menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari makin banyaknya guru yang mempunyai sertifikat pendidik. Sampai dengan tahun 2017 sebanyak **1.506.813 (51.55%)** telah bersertifikat pendidik dari total guru 2.922.826 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 57.203 orang dari tahun 2016 yang hanya 1.449.609 orang.



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	49,6%	55,70%	51,55%	92,55	71,50	72%
2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	75,52%	68,24%	78,32%	114,77	68,43	114%
3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	52,09%	70,50%	56,88%	80,67	77,50	73%

IKSS 9.1 “Persentase guru pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 55,70% (1.628.014) baru terealisasi sebesar 51,55% (1.506.813) dengan persentase capaian 92,55%. Meskipun target yang ditetapkan tidak tercapai namun capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,95% dari capaian tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2019 sebesar 71,5% atau 2.089.821 guru maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih kekurangan cukup besar yaitu 19,95% atau 583.104 guru.



Guru profesional adalah guru yang bersertifikat dan berkualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sertifikasi 2017 diikuti oleh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang diangkat sebelum tahun 2017 serta mempunyai berstatus guru CPNS, PNS, atau guru tetap. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Ristek Dikti.

Program sertifikasi, pada tahun 2017 menggunakan pola sertifikasi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). Peserta yang mengikuti sertifikasi tahun ini mempunyai syarat Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006). Selanjutnya peserta akan mendapatkan pembekalan materi secara daring selama 2-3 bulan. Kelulusan sertifikasi 2017 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) ujian akhir PLPG yang meliputi uji kinerja dan uji tulis LPTK (UTL) dan (2) UKG dalam bentuk Uji Tulis Nasional (UTN). Namun bila guru lulus UTL dan mempunyai nilai UKG 2015 minimal 76,

guru tersebut lulus sertifikasi langsung tanpa perlu mengikuti UTN. Guru lainnya dinyatakan lulus sertifikasi bila mengikuti UTN dan mempunyai nilai melampaui nilai batas kelulusan UTN sebesar 76. Kedua tahap uji kompetensi tersebut tidak sekedar mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, tetapi lebih kepada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Peserta yang lulus sertifikasi merupakan guru profesional yang memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Peserta awal PLPG Tahun 2017 sebanyak 67.658 orang, namun yang menuntaskan dan lulus PPG sebanyak 64.424. Dari jumlah tersebut, yang berhasil mendapatkan sertifikat pendidik baik langsung ataupun UTN sebanyak 28.341 orang (44,13%). Pada tahun 2017, guru yang mendapatkan sertifikat pendidik tidak saja berasal dari peserta PLPG 2017. Sertifikat pendidik juga diberikan kepada guru PLPG 2016 yang tahun ini lulus UTN ulang sejumlah 28.862 orang. Sehingga tambahan guru bersertifikat tahun ini adalah sejumlah 57.203 orang. Tambahan guru bersertifikat tersebut menyebabkan hingga tahun 2017 total guru yang lulus sertifikasi mencapai 1.506.813 orang.

Dalam upaya peningkatan GTK yang professional dilakukan tidak saja melalui pemberian sertifikasi pendidik. Upaya lain yang dilakukan Kemdikbud adalah dengan melakukan peningkatan kompetensi guru melalui Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan (PKB). Pelaksanaan PKB selain dilakukan oleh Kemendikbud melalui 12 PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK, juga dilakukan *sharing* dengan Pemerintah daerah sebagai perwujudan tanggung jawab Pemda mendorong peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.

IKSS 9.2 “Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar” realisasi capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 persentase satuan pendidikan dasar yang memiliki jumlah guru sesuai standar sesuai SPM ditargetkan sebanyak 68,24%, dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 78,32%, dengan persentase capaian sebesar 110,74%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan 2,8%. Selain mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 juga melampaui target akhir renstra 2019. Tercatat target di akhir renstra tahun 2019 sebesar 68,43%.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab/Kota, menyatakan bahwa satuan pendidikan SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam guru untuk setiap satuan pendidikan, untuk daerah khusus 4 orang untuk satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan SD/MI minimal mempunyai 2 (dua) orang guru berkualifikasi S-1 atau D-IV dan dua orang guru yang memiliki sertifikat pendidik.

Pada satuan pendidikan SMP/MTs tersedia satu guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Selain itu satuan pendidikan SMP/MTs minimal tersedia guru berkualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan

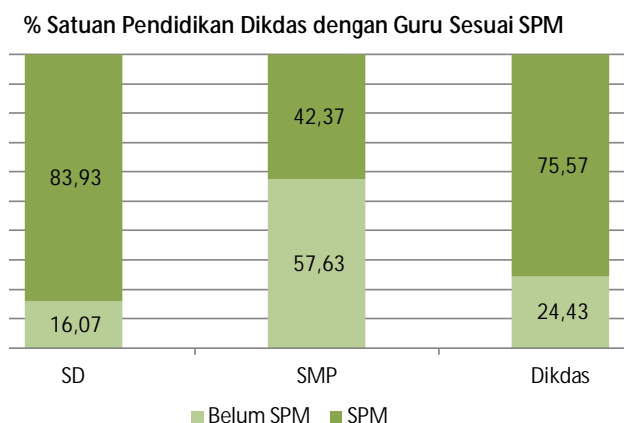
separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah bersertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 40% dan 20%.

Untuk daerah perkotaan, pemenuhan guru sesuai SPM pada satuan pendidikan sebagian besar dapat terpenuhi dengan cukup baik. Namun hal itu berbeda untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dimana jumlah guru pada daerah 3T tersebut masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitas. Capaian kerjanya telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan rumusan tersebut pada tahun 2017, satuan pendidikan dasar yang memiliki jumlah guru sesuai SPM telah mencapai 144.807 sekolah (78,32%). Jumlah tersebut melampaui target tahun 2017. Pada tahun 2017, ditargetkan sebanyak 68,24% atau 126.172 satuan pendidikan dasar telah memiliki jumlah guru sesuai SPM. Sehingga capaian terhadap target di tahun 2017 adalah 114,77%.

Capaian tersebut juga telah melampaui target akhir renstra tahun 2019 yaitu 68,43% atau 126.523 satuan pendidikan. Bila dibandingkan dengan capaian akhir renstra, persentase capaian sampai 2017 ini adalah 114,45%. Lebih lanjut terlihat dari tabel di bawah bahwa capaian tinggi tersebut karena kontribusi capaian jenjang SD yang mencapai 127.905 sekolah. Capaian jenjang SMP masih belum mencapai target. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan ketersediaan guru di pendidikan dasar. Salah satunya karena adanya perbedaan dalam perhitungan SPM antar jenjang.

Jenjang	Jumlah Sekolah	SPM	%
SD	147.707	127.905	86,59
SMP	37.188	16.902	45,45
Dikdas	184.895	144.807	78,32



Otonomi daerah menyebabkan pengelolaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota, termasuk memastikan adanya guru sesuai standar di sekolah. Pemenuhan SPM untuk pendidikan dasar merupakan kewenangan Kab/kota. Saat ini ketersediaan guru sesuai standar tersebut menjadi permasalahan hampir di semua daerah, utamanya ketersediaan guru PNS yang berkurang karena pensiun. Hal tersebut menyebabkan kekurangan guru PNS di sekolah. Sedangkan pemerintah mempunyai keterbatasan dalam mengangkat guru PNS. Tidak cepatnya respon pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan guru PNS di sekolah negeri karena keterbatasan formasi CPNS. Kondisi tersebut menyebabkan kepala sekolah mengangkat guru honorer yang belum berstandar guru (berkualifikasi S1 dan bersertifikasi). Penambahan guru honorer tersebut dapat merubah capaian indikator.

Meskipun pemenuhan guru pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, Kemendikbud membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui program Guru Garis Depan (GGD). GGD merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang paling membutuhkan. Khususnya untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2017, Pemerintah pusat telah mengirimkan 6.296 orang GGD ke 93 kabupaten yang tersebar di 28 empat provinsi. Secara jumlah, program GGD tersebut kecil. Namun tahapan pengangkatan GGD menjadi rujukan tentang pengangkatan guru PNS secara ideal. Dimana guru yang diangkat PNS melalui GGD tersebut telah memenuhi syarat guru profesional yaitu berkualifikasi dan bersertifikat pendidik.

Kemendikbud mengirim 6.296⁽²⁰¹⁶⁻²⁰¹⁷⁾ dan 798⁽²⁰¹⁵⁾ GGD ke daerah Terdepan, terluar, Tertinggal



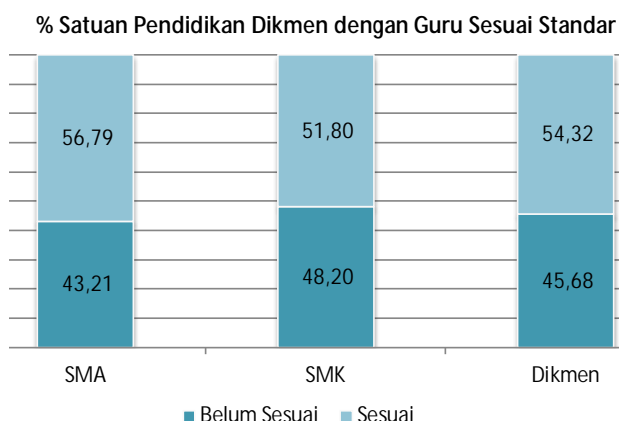
Mendikbud, Muhadjir Effendy sedang memberikan pengarahannya dan pelepasan 6296 GGD untuk daerah 3T

IKSS 9.3 “Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar” realisasi capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan. Target satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar sebesar 70,5% (17.670 sekolah), dari target tersebut baru terrealisasi sebesar 56,88% (14.256 sekolah), dengan persentase capaian kinerja 80,67%.

Meskipun capaian 2017 belum mencapai target, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,79%. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 77,5% atau 19.425 sekolah menengah yang memiliki guru sesuai standar, maka capaian 2017 terhadap akhir renstra adalah 73,4%.

Berbeda dengan pendidikan dasar yang telah memiliki SPM, Kemendikbud saat ini masih merancang SPM untuk pendidikan menengah. Sehingga dalam menghitung indikator ini menggunakan aturan satuan pendidikan SMA/SMK tersedia satu guru untuk setiap mata pelajaran. Berdasarkan rumusan tersebut, capaian indikator satuan pendidikan menengah yang memiliki jumlah guru sesuai SNP pada tahun 2017 baru mencapai 56,88% atau 14.256 sekolah menengah.

Jenjang	Jumlah Sekolah	Sesuai Standar	%
SMA	12.637	7.455	58,99
SMK	12.428	6.801	54,72
Dikmen	25.065	14.256	56,88



Bila dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian jenjang SMA lebih baik dibandingkan SMK. Namun dari kedua jenjang tersebut tidak ada yang memenuhi target. Permasalahan pemenuhan guru baik jenjang pendidikan menengah tidak jauh dengan permasalahan pemenuhan guru pada jenjang pendidikan dasar dimana Kemendikbud tidak bisa sepenuhnya mengontrol keberadaan guru di sekolah.

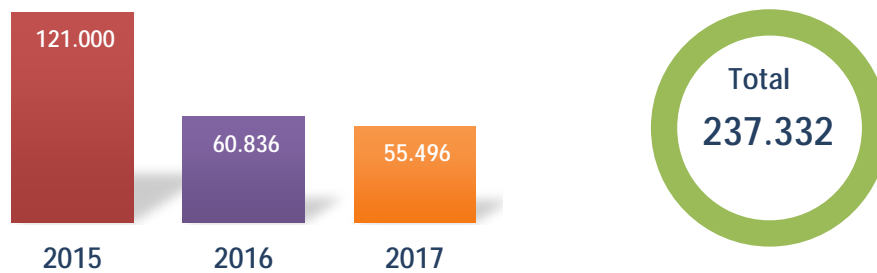
Program Vokasi yang dicanangkan oleh Presiden menyebabkan terjadi pertumbuhan jumlah sekolah SMK yang pesat. Pertumbuhan tersebut tidak dibarengi oleh ketersediaan guru produktif yang memadai. Semenjak tahun 2016 Kemdikbud mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di SMK khususnya ada program Alih fungsi dari guru normative ke produktif untuk bidang keahlian maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi dan rekayasa. Program ini berlanjut di tahun 2017 dengan mempersiapkan keberadaan guru alih tugas tersebut dengan diklat dan pembekalan yang dilakukan hampir satu tahun penuh. Guru yang berhasil melalui seluruh tahapan program keahlian ganda sebanyak 9.960 orang.

SS10 Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga

Pada tahun 2017 Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan bertambahnya jumlah lembaga/satuan pendidikan yang memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

Sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 237.332 lembaga/satuan pendidikan yang memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 55.496 lembaga/satuan pendidikan dari tahun sebelumnya.

Jumlah lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	60.836	54.000	55.496	103	94.000	59%

IKSS 10.1 “Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga” pada tahun 2017 memiliki target sebesar 54.000 lembaga/satuan pendidikan dan telah tercapai dengan baik, tercatat besaran realisasi mencapai 55.496 lembaga/satuan pendidikan, dengan persentase capaian 103%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2019 yaitu sebanyak 94.000 lembaga, maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 38.504 lembaga. Tercatat target di akhir periode renstra 2019 sebanyak 94.000 lembaga.

Capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik berkat efektifitas pengelolaan anggaran bimbingan teknis. Selain itu, keberhasilan capaian ini didukung adanya program lanjutan sosialisasi penguatan pelaku pendidikan keluarga dengan melibatkan 80 Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 15 Kab/kota tahun 2016 dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan keluarga pada 47.086 satuan pendidikan. Keberhasilan realisasi pencapaian target jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi dikarenakan adanya dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. program penyelenggaraan pendidikan keluarga di 60 kab/kota, dengan setiap Kab/Kota diundang 60 lembaga yang terdiri dari 50 Kepala satuan pendidikan rintisan dan 10 organisasi mitra (IGTKI, HIMPAUDI, Paguyuban PKBM dan Dewan Pendidikan). Sehingga dari kegiatan tersebut diketahui sebanyak 3.600 lembaga telah mengikuti program pendidikan keluarga pada satuan pendidikan dengan baik.
2. Pemberian bantuan Bimtek pendidikan keluarga kepada Dinas Pendidikan di 4 Provinsi dan 80 Kab/Kota. Jumlah peserta dari Provinsi dan kab/Kota dengan lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan karakter secara keseluruhan sebanyak 4.810 lembaga yang terdiri dari :
 - a. Bimtek Provinsi diselenggarakan pada 4 dinas Pendidikan Provinsi (Jawa Barat: 170 lembaga, Jawa Tengah: 230 lembaga, Jawa Timur: 290 lembaga, dan Lampung: 120 lembaga) dengan mengundang 10 lembaga/satdik (SMA, SMK, dan SLB serta Pengawas) di tiap kab/kota.

- b. Bimtek di 80 Kab/Kota dari masing-masing sebanyak 50 kepala satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF, Penilik, Pengawas, IGKTI, Forum PKBM, dan Dewan Pendidikan). Hasil dari kegiatan ini sebanyak 4.000 lembaga dapat memahami serta melaksanakan pendidikan keluarga.
3. sosialisasi penguatan pelaku pendidikan keluarga yang dilaksanakan oleh 80 Dinas Pendidikan Kab/Kota rintisan tahun 2017, dan 15 kab/Kota tahun 2016 yang belum mendapatkan program penguatan pendidikan keluarga. Kegiatan sosialisasi penguatan pelaku diikuti oleh 47.086 lembaga satuan pendidikan.

Pada tahun 2018 telah disiapkan agenda bimbingan teknis kepada 3.500 lembaga/satuan pendidikan rintisan tahun 2018. Selain itu, sebagai tindak lanjut pencapaian target kinerja di tahun 2017 termasuk di dalamnya satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T dan melalui dampak dari pembentukan kelompok kerja pendidikan keluarga pada 34 Provinsi, dan 240 kab/kota terpilih yang telah menyelenggarakan pendidikan keluarga mulai tahun 2015.

SS11 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional diukur tiga tahun sekali. Untuk tahun 2017 sendiri tidak dilakukan pengukuran. Indeks pembangunan kebudayaan nasional terakhir diukur tahun 2016. Tercatat indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 sebesar 52,49.

IPK mencapai 52,49 melebihi target akhir Renstra 2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	52,49	35	52.49 (2016)	150	37	142%

IKSS 11.1 “Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional” untuk realisasi tahun 2017 tidak dapat diketahui realisasinya karena untuk tahun 2017 indikator kinerja ini tidak dilakukan pengukuran. IPK diukur tiga tahun sekali. Pengukuran IPK terakhir kali dilakukan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 tersebut IPK telah mencapai 52,49 (skala 1-100). Dengan IPK 52,49 menunjukkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pemahaman dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masyarakat Indonesia masih dalam kategori menengah.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, capaian IPK sebesar 52,49 tersebut telah melampaui target. Tercatat pada akhir renstra 2019, IPK ditargetkan mencapai 37.

IPK sebesar 52,49 poin (skala 1-100) menunjukkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pemahaman dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masyarakat Indonesia masih dalam kategori menengah. Semakin tinggi capaian angka IPK

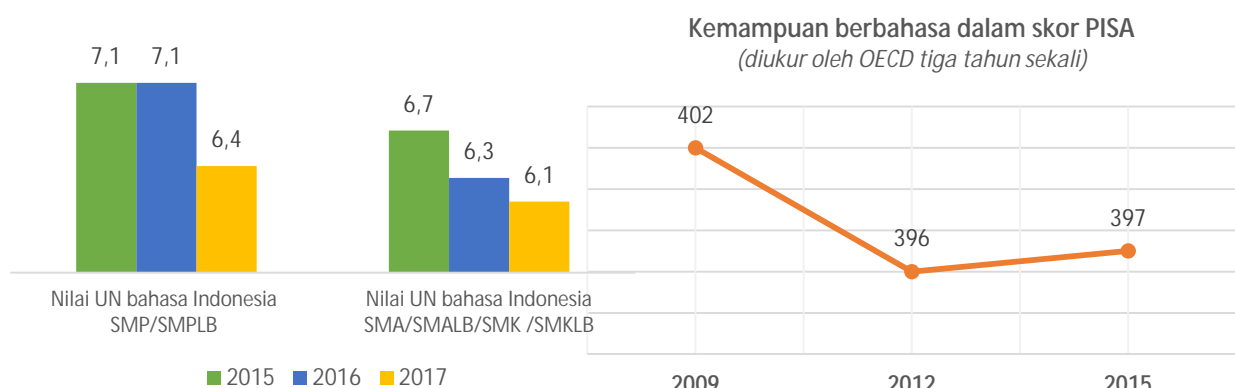
suatu wilayah mencerminkan semakin berhasilnya pembangunan bidang kebudayaan di wilayah tersebut. Pengukuran IPK dilakukan Kemendikbud bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks pembangunan kebudayaan diharapkan mampu menjadi instrumen bagi pengambilan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kebudayaan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun IPK tidak dapat dihitung setiap tahunnya karena ketersediaan data IPK bersumber pada data sensus yang dilakukan oleh BPS yang tidak mengeluarkan data setiap tahun. Adapun data yang digunakan dalam penghitungan IPK antara lain:

1. Data Sensus Penduduk, dikeluarkan setiap 10 tahun sekali, terakhir dikeluarkan BPS pada tahun 2010;
2. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP), dikeluarkan setiap 3 tahun sekali, terakhir dikeluarkan BPS pada tahun 2015;
3. Data Potensi Desa (Podes), dikeluarkan setiap 2 tahun sebelum Sensus Penduduk, terakhir dikeluarkan BPS pada tahun 2014,;
4. Data Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos), dikeluarkan setiap 3 tahun sekali, terakhir dikeluarkan BPS pada tahun 2014,.

Pengukuran IPK pada tahun mendatang harus mereview dimensi, indikator, dan sumber data, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan penyusunan Strategi Kebudayaan dan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang berisi: visi dan misi; tujuan dan sasaran; perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian;

SS12 Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	397	Tidak diukur OECD	Tidak diukur OECD	--	414	96%
2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK /SMKLB	7,1 dan 6,3	6,6 dan 6,9	6,4 dan 6,1	95,5 dan 88,4	7,2 dan 7,5	89% dan 81%

IKSS 12.1 “Kemampuan berbahasa dalam skor PISA” untuk tahun 2017 tidak ditetapkan target capaiannya karena Skor PISA diukur setiap tiga tahun sekali oleh OECD. Skor PISA terakhir kali diukur untuk tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 414 maka capaian tersebut masih memiliki selisih sebesar 17 poin.

Hasil pengukuran *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2015 yang dirilis pada 6 Desember 2016 menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan Indonesia, setidaknya jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada periode sebelumnya (sumber, laman <https://www.oecd.org/pisa>). PISA, sebuah program penilaian kompetensi siswa yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan berbasis di Paris, Prancis, merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains yang diperuntukkan bagi siswa berusia di bawah 15 tahun. Sebagaimana dimuat dalam laman kemdikbud.go.id, berdasarkan nilai rerata capaian, terjadi peningkatan nilai PISA Indonesia pada tiga kompetensi yang diujikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 2015. Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke atas bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. Karena periode pengukuran PISA adalah tiga tahunan, dengan sendirinya capaian tahun anggaran 2017 tidak ada.



SKOR RATA-RATA PRESTASI LITERASI MEMBACA UNTUK INDONESIA (PISA)					
Tahun Studi	Mata Pelajaran	Skor Rata-Rata Indonesia	Skor Rata-Rata Internasional	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara Peserta
2012	Membaca	396	500	61	65
	Matematika	375	500		
	Sains	382	500		
2015	Membaca	397	500	64	72
	Matematika	386	500		
	Sains	403	500		

Peningkatan nilai kompetensi membaca (*reading skill*) hanya 1 poin, dari 396 (survei 2012) menjadi 397 (survei 2015). Peningkatan ini relatif kecil dibandingkan peningkatan yang diperoleh pada kompetensi sains dan matematika.

Meskipun demikian, tercapainya target 414 masih bergantung pada pengukuran yang akan dilaksanakan pada bulan April 2018. Optimisme perlu dibangun dan ditumbuhkan. Kemendikbud melalui Badan Bahasa sudah mengantisipasi tuntutan peningkatan paling tidak

17 poin agar target tersebut dapat dicapai. Badan Bahasa pada tahun 2017 sudah bersinergi dengan Tim PISA Puspendik, Balitbang guna mendesain persiapan siswa untuk survei PISA 2018. Tim PISA sudah menentukan dua lokus pengukuran, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta.

Badan Bahasa menyiapkan sepuluh bahan bacaan yang secara khusus didesain untuk tujuan pengukuran PISA. Bahkan, pada tahun 2017 Badan Bahasa melalui UPT-nya di Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi masif kepada guru dan siswa berkaitan dengan rencana survei PISA.

Ada empat program yang dilakukan Badan Bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dalam Skor PISA, yaitu (a) melakukan pengembangan bahasa dan sastra, seperti pengayaan kosakata; (b) mengintensifkan pelatihan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) bagi tenaga pendidik agar sehingga jumlah tenaga pendidik berpredikat unggul dalam pengujian UKBI meningkat; (c) meningkatkan kompetensi tenaga kebahasaan dan kesastraan melalui kegiatan penyuluhan bahasa dan sastra sehingga dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pendidik yang penggunaan bahasa dan sastra Indonesia terbina; dan (d) melaksanakan penyediaan bahan pengayaan bahan bacaan.

Kemendikbud melalui Badan Bahasa berhasil melakukan pengembangan bahasa dan sastra. Hal itu terlihat dengan melimpahnya lema-lema baru (kosakata baru) bahasa Indonesia. Sebagai salah satu program prioritas, pengayaan kosakata menjadi fokus perhatian Badan Bahasa. Bahkan, pada TA 2017 ini Badan Bahasa telah menerbitkan KBBI V dan mendorong perluasan penggunaan aplikasi KBBI luring (luar-jaringan) dan daring (dalam-jaringan).

CAPAIAN KINERJA PROGRAM BAHASA 2017



Untuk mendukung peningkatan kompetensi berbahasa siswa, Kemendikbud melalui Badan Bahasa berhasil menerbitkan 200 judul buku pada tahun 2017, 10 di antaranya secara khusus diperuntukkan untuk persiapan pengukuran PISA 2018. Kesepuluh naskah buku tersebut sengaja didesain untuk tujuan peningkatan skor PISA yang pada pengukuran berikutnya akan dilaksanakan pada bulan April 2018 di dua lokus, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat).

IKSS 12.2 “Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB” realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dari target yang ditetapkan sebesar 6,6

baru terealisasi 6,4 dengan persentase capaian 95,5%. Sedangkan untuk nilai UN bahasa Indonesia SMA/SMALB/SMK/SMKLB dari target yang ditetapkan 6,9 baru terealisasi 6,1, dengan persentase capaian sebesar 88,4%.

Hasil pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2016/2017 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, baik untuk tingkat menengah pertama (SMP/SMPLB) maupun untuk tingkat menengah atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB) masih belum memuaskan, karena capaian UN Bahasa Indonesia untuk kedua jenjang pendidikan tersebut hanya memperoleh nilai rata-rata 6,4 untuk sekolah SMP/SMPLB dan 6,1 untuk tingkat sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB.

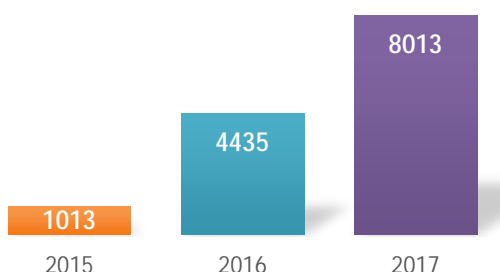
Dibandingkan dengan tahun pelajaran sebelumnya, capaian tahun 2016/2017 menurun. Pada tahun pelajaran 2015/2016, capaian nilai UN bahasa Indonesia untuk tingkat menengah pertama bahkan mencapai angka 7,1 dan untuk tingkat menengah mencapai 6,3. Artinya, capaian tahun pelajaran 2016/2017 lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun pelajaran 2015/2016.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian tahun 2017 masih memiliki selisih 0,8 untuk nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan 1,4 untuk UN bahasa Indonesia jenjang SMA/SMALB/SMK/SMKLB. Tercatat pada tahun 2019 nilai rata-rata UN Bahasa Indonesia jenjang SMP 7,2 sedangkan jenjang menengah 7,5.

Untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia siswa, Badan Bahasa memberikan pelayanan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan kepada siswa melalui **Bengkel Bahasa dan Sastra**. Pada tahun 2017, telah diberikan pelayanan pengembangan, pembinaan dan perlindungan kepada **49.155 orang**.

SS13 Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN

Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia



Jumlah negara Asean yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Jumlah negara Asean yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	7	4	8	200	6	133%
2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia	4.435	2.100	2.982	142	2.500	119%

IKSS 13.1 “Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya” realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan. Sampai dengan tahun 2017 jumlah negara Asean yang mengajarkan bahasa Indonesia di sistem pendidikan nasionalnya ditargetkan sebanyak empat negara. Dari target tersebut berhasil terealisasi 8 negara, dengan persentase capaian kinerja sebesar 200%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan. Selain itu, capaian tahun 2017 juga telah melampaui target akhir renstra 2019. Pada akhir renstra 2019 sendiri ditargetkan sebanyak 6 negara Asean mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya.

Secara kumulatif, hingga tahun 2017 ini Kemendikbud melalui Badan Bahasa melalui sudah berhasil membangun kemitraan strategis dengan 8 negara ASEAN, dengan berdasarkan pencapaian tiap tahun: 2015 sebanyak 3 negara (Singapura, Vietnam, dan Thailand), 2016 sebanyak 4 negara (Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos), dan tahun 2017 sendiri capaiannya bertambah 1 negara yaitu Timor Leste.



Seorang guru sedang mengajar bahasa Indonesia kepada siswa sekolah dasar di salah satu sekolah di luar negeri

Kendati pun pada tahun 2017 hanya bertambah satu negara, Badan Bahasa terus melakukan peningkatan pengajaran BIPA di lima negara lainnya, yaitu Filipina, Laos, Kamboja, Singapura, dan Thailand. Kerja sama dan kemitraan yang dibangun antara Badan Bahasa dan negara-negara ASEAN mengenai pengiriman tenaga pengajar BIPA menjadi bukti upaya peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. Dengan kata lain, sampai dengan 2017 target kinerja sebanyak 4 negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, telah terealisasi. Secara akumulasi, sejak 2015 sampai dengan 2017, Badan Bahasa sudah berhasil mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke delapan negara ASEAN.

Kegiatan-kegiatan penunjang dalam pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa, di antaranya kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Negara ASEAN dan kerja sama dengan lembaga-lembaga kebahasaan di tingkat ASEAN.

Secara umum, tidak ada kendala besar yang menghambat pencapaian target kinerja ini. Namun, dalam proses pelaksanaan kegiatan kerumitan-kerumitan administratif dan teknis sedikit banyaknya mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan, misalnya persoalan administrasi keimigrasian dan perbedaan jadwal perkuliahan antara negara Indonesia dengan negara-negara Asean terkait. Untuk itu, Badan Bahasa ke depannya perlu meningkatkan koordinasi dengan Unit Utama Kemdikbud lain, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara terkait, dan Kementerian terkait lainnya sehingga kendala-kendala administratif dan teknis dapat diantisipasi jauh-jauh hari.

IKSS 13.2 “Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesia”



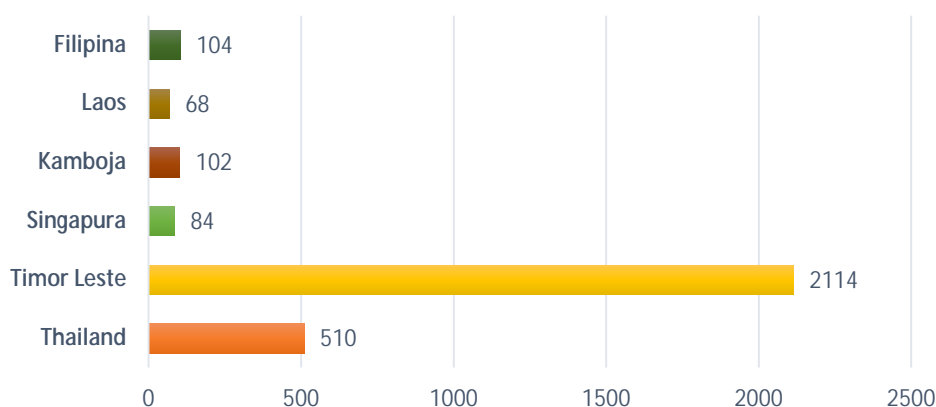
Pengajar sedang melakukan proses pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur non-Indonesia di kawasan Asean

Indikator “Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia” jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, terealisasi dengan baik. Ini dapat dilihat dari target kinerja sebanyak 2.100 orang penutur asing yang menggunakan bahasa Indonesia, dapat terwujud sebanyak 2.982 orang penutur asing, dengan persentase capaian sebesar 142%.

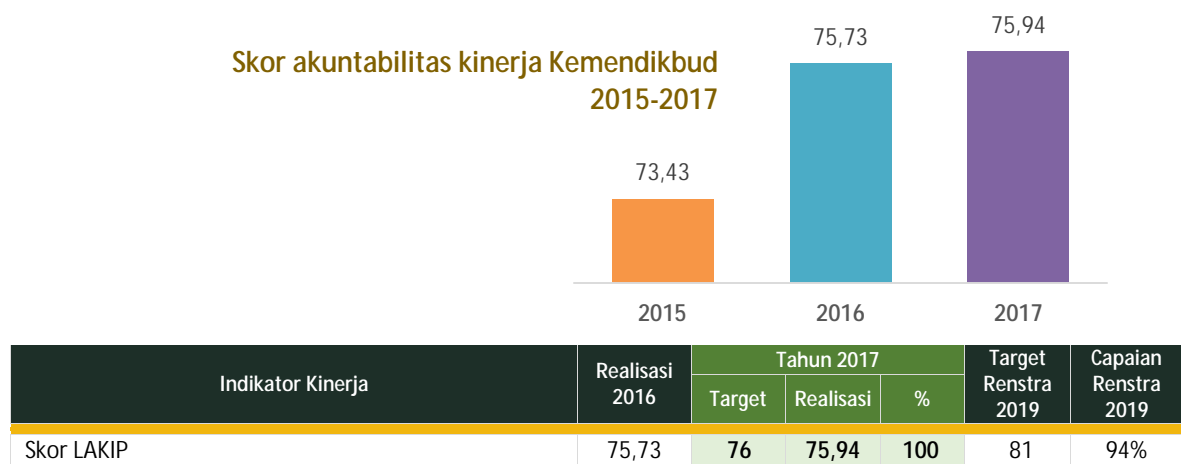
Dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 1013 orang, atau sebesar 103%, capaian 2017 tergolong sangat memuaskan. Pencapaian ini memang sangat masuk akal dengan alasan adanya akselerasi pengiriman pengajar BIPA dari 80 pengajar menjadi 220 pengajar. Kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian target yang dilakukan oleh Badan Bahasa salah satunya adalah fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat uji kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing, dan kerja sama lembaga-lembaga Internasional pengguna bahasa Indonesia.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 2.500 penutur maka capaian sampai dengan tahun 2017 tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Pada akhir periode renstra 2019 sendiri ditargetkan sebanyak 2.500 penutur non Indonesia di kawasan ASEAN menggunakan bahasa Indonesia.

Berikut sebaran jumlah penutur non Indonesia di kawasan ASEAN tahun 2017.



SS14 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud



IKSS 15.1 “Skor LAKIP” untuk tahun 2017 realisasi capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan, dari skor target sebesar 76 berhasil terealisasi 75,49 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin. Pada tahun 2016 sendiri skor Lakip Kemendikbud mencapai nilai 75,73. Nilai sebesar 75,94 masuk dalam predikat “BB”. Predikat BB menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kemendikbud menunjukkan hasil yang baik.

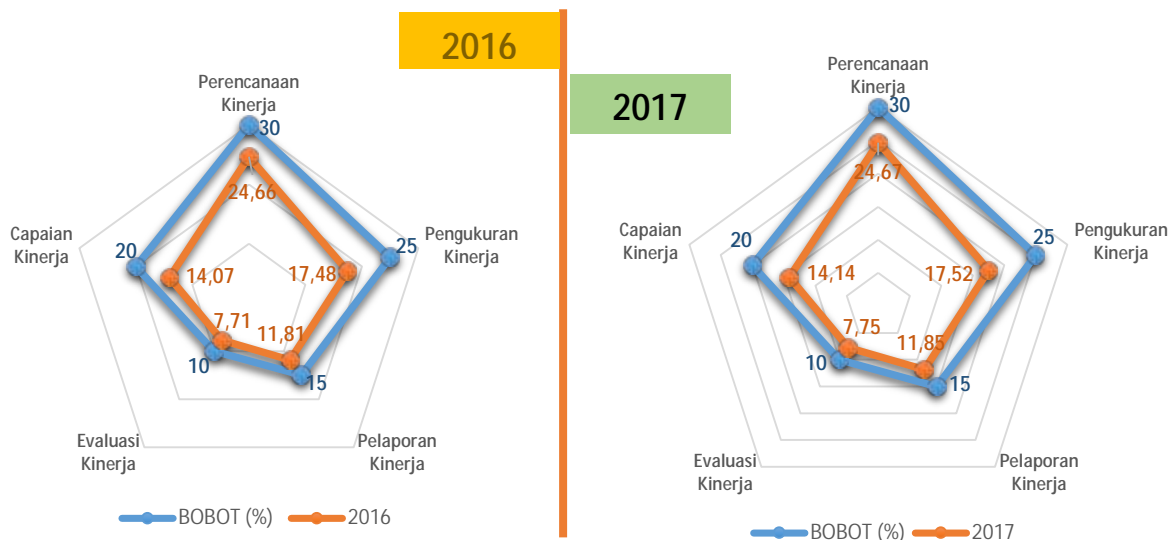
Namun dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 81, maka capaian tahun 2017 masih memiliki selisih cukup besar yaitu 5,06 poin. Perlu kerja keras dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud agar target nilai 81 dapat tercapai di tahun 2019.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud, beberapa upaya yang dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain :

1. Melakukan revisi Renstra 2015-2019 terutama melakukan reviu atas indikator kinerja seluruh satuan kerja;
2. Mewajibkan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi unit kerja yang memberikan dana dekonsentrasi;
3. Pembinaan penerapan SAKIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud;
4. Pendampingan penyusunan laporan kinerja pada UPT yang kualitas laporan kinerjanya masih rendah;
5. Pendampingan pengisian dan pemanfaatan *eperformance.kemdikbud.go.id*;
6. Pemberian penghargaan kepada satuan kerja dengan penerapan SAKIP terbaik.

Skor akuntabilitas kinerja merupakan penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari 80% penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan 20% dari capaian kinerja. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan

evaluasi kinerja. Berikut rincian nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud selama dua tahun terakhir.



Berbeda dengan pelaksanaan evaluasi tahun 2016, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 KemenPAN dan RB tidak mengambil uji petik pada satuan kerja yang berada di pusat namun mengambil uji petik pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.

Beberapa kelemahan/permasalahan yang dihadapi Kemendikbud dalam penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2017 antara lain:

KOMPONEN PERENCANAAN, meliputi :

1. Rumusan kinerja tidak menggambarkan mandat
2. Ketidakselarasan perencanaan dengan Unit kerja dan Satker
3. Tidak sinkron antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

KOMPONEN PENGUKURAN, meliputi :

1. Rumusan indikator kinerja tidak jelas
2. Belum bersifat outcome
3. Aplikasi pengukuran kinerja belum dimanfaatkan

KOMPONEN PELAPORAN, meliputi :

1. Kurang penyajian informasi kinerja
2. Lebih bersifat formalitas
3. Tidak terdapat upaya perbaikan atas capaian kinerja

KOMPONEN EVALUASI INTERNAL, meliputi :

1. Bersifat formalitas
2. Belum mampu memicu perbaikan kinerja

Melihat kelemahan/permasalahan tersebut, Kemendikbud berupaya melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan KemenPAN dan RB, antara lain:

1. Melakukan perbaikan/reviu atas Renstra 2015-2019 di lingkungan Kemendikbud, terutama melakukan reviu atas indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis dengan koordinator Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

2. Melakukan *cascading* indikator kinerja mulai dari tingkat kementerian sampai pada Unit Pelaksana Teknis dengan koordinator Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem pengukuran kinerja (epformance.kemdikbud.go.id) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud;
4. Asistensi dan pendampingan penyusunan laporan kinerja pada seluruh satuan kerja agar laporan kinerja yang dibuat dapat meningkat kualitasnya sehingga dapat dimanfaatkan;
5. Mengoptimalkan sistem evaluasi internal pada seluruh satuan kerja dan meningkatkan kualitas evaluasi sistem kinerja internal dengan meningkatkan kompetensi evaluator dan koordinasi baik antara Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan membangun sistem aplikasi evaluasi SAKIP di lingkungan Kemendikbud.

SS15 Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



**Kemendikbud
memperoleh Opini WTP
empat kali berturut
turut 2013,2014,2015,2016**

23 Mei 2017, Muhadjir Efendy, Mendikbud menerima piagam penghargaan Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016 dari BPK di Auditorium Utama BPK RI

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100%

IKSS 15.1 Laporan Keuangan Kemendikbud untuk tahun 2017 belum dapat diketahui tingkat realisasinya. Hal ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga untuk tahun 2017. BPK baru akan mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2017 sekitar bulan Mei pada tahun 2018.

Namun demikian, pada tahun 2016, Kemendikbud berhasil memperoleh opini WTP kembali. Dengan capaian tersebut, Kemendikbud berhasil mempertahankan opini WTP yang berhasil diperoleh tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, 2014 dan 2013.

Tercapainya opini WTP, tidak terlepas dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendikbud, Inspektorat

Jenderal secara rutin melakukan reviu terhadap laporan Keuangan Kemendikbud termasuk mengawal laporan keuangan dari setiap unit utama.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan untuk penyampaian Laporan Keuangan tahun 2017 Ke Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari 2017.

Beberapa upaya yang dilakukan Kemendikbud dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP antara lain:

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemendikbud mulai dari pimpinan sampai dengan staf;
2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan;
6. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja baik pusat maupun di daerah yang dilakukan oleh Setjen, Itjen dan BPKP;
7. Menyelesaikan revaluasi aset dan meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan aset tetap sehingga penyajian aset tetap memadai;
8. Penertiban BMN melalui inventarisasi, validasi, dan pengklasifikasian BMN;
9. Meningkatkan sistem pengelolaan PNPB. Untuk tahun 2016 telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemendikbud;
10. Meningkatkan sistem pengendalian belanja sehingga permasalahan kegiatan yang terindikasi fiktif dan tidak di dukung bukti yang valid dapat dihindari;
11. Penerapan sistem pembayaran transaksi virtual di lingkungan Kemendikbud, yaitu transaksi keuangan menggunakan transaksi virtual (*cashless*) dengan meminimalkan pembayaran tunai pada seluruh kegiatan;
12. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan terus mendorong untuk lebih terbuka, lebih efektif, lebih akuntabel, serta memberikan ruang bagi pelibatan publik;
13. Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat, audit khusus, temuan internal dan eksternal;
14. Melakukan audit khusus tujuan tertentu untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
15. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
16. Melakukan fasilitasi penyusunan peta resiko unit kerja dan pembinaan tim SPI satuan kerja di lingkungan Kemendikbud.

Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik dari internal seperti Itjen, dan eksternal yaitu BPK dan BPKP menjadi hal penting dalam mempertahankan opini WTP. Berikut jumlah rekomendasi dan kemajuan tindak lanjut yang telah diselesaikan Kemendikbud di tahun 2017.

No	Pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai (Rp)	Progres Tindak Lanjut				Saldo			
				Rekomendasi	%	Nilai (Rp)	%	Rekomendasi	%	Nilai (Rp)	%
1	Itjen	31.998	194.350.491.846	21.969	68,66	166.618.564.080	85,73	10.029	31,34	27.731.927.766	14,27
2	BPK-RI	2.808	621.448.324.645	1.884	67,09	440.700.124.349	70,92	924	32,91	180.748.200.296	29,08
3	BPKP	26.338	456.434.242.773	20.727	78,70	313.245.086.094	68,63	5.611	21,30	143.189.156.679	31,37
Jumlah		61.144	1.272.233.059.264	44.580	72,91	920.563.774.523	72,36	16.564	27,09	351.669.284.741	27,64

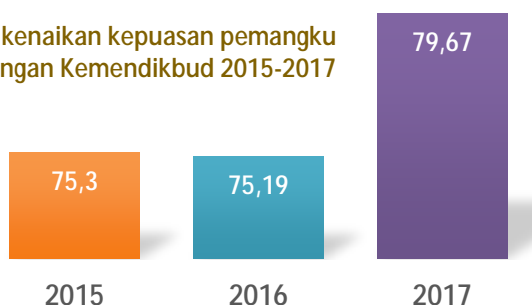
Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam laporan keuangan Kemendikbud tahun 2016 sesuai dengan pemeriksaan BPK antara lain:

1. Pengelolaan PNPB belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepatuhan atas pengelolaan belanja pegawai, yaitu:
 - terdapat pembayaran ganda atas tunjangan profesi guru;
 - terdapat kelebihan pembayaran gaji/tunjangan dan kekurangan pembayaran tunjangan.
3. Kepatuhan atas pengelolaan belanja barang dan jasa, yaitu:
 - kelebihan pembayaran belanja barang perjalanan dinas
 - terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belum lengkap
 - terdapat kekurangan volume pekerjaan ;
 - masalah pekerjaan pengiriman, mekanisme pengadaan, dan adanya kelebihan pembayaran;
 - keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja barang & belum dikenakan denda;
 - Realisasi pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan tidak sesuai Permendiknas No. 48 Tahun 2009 dan PMK No.168/PMK.05/2015
 - Jumlah peserta paket pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran;
4. Kepatuhan atas pengelolaan belanja model, yaitu:
 - terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak paket kegiatan belanja model;
 - pelaksanaan kegiatan belanja model mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda serta proses penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada TA.2016 belum sesuai dengan prosedur
 - Perencanaan RAB atas pekerjaan rehabilitasi gedung laboratorium kurang cermat;
5. Penyajian atas pendapatan dari pengembalian belanja dalam LK TA 2016 belum akurat;
6. Sistem Pengendalian belanja:
 - sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja pegawai pada kemendikbud belum memadai;
 - pembayaran kegiatan yang tidak diatur dalam standar;
 - penggunaan akun belanja barang belum tertib
 - terdapat ketidakseragaman pencatatan atas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat;

- realisasi bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak didukung petunjuk teknis dan tidak sesuai dengan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah;
 - realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat belum sesuai dengan ketentuan;
 - pemberian bantuan pendidikan belum mempertimbangkan indeks kemahalan negara;
 - pengelolaan atas belanja bantuan sosial kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai.
7. Sistem Pengendalian Aset:
- pengelolaan kas atas belanja dengan mekanisme ls-bendahara belum tertib;
 - pengelolaan atas persediaan belum memadai;
 - pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai;
 - terdapat permasalahan keakuratan pencatatan aset tetap yang disajikan dalam aplikasi SIMAK BMN
 - terdapat aset tetap perguruan tinggi yang belum alih status;
 - KDP belum ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada pihak ke-3 dan belum didukung sumber pendanaan yang cukup
 - pengelolaan aset lainnya belum sepenuhnya memadai
 - pengadaan langsung atas aplikasi dan jaringan belum dikapitalisasi;
8. Sistem Pengendalian Kewajiban:
- pengendalian atas penyelesaian utang kepada pihak ketiga tidak tertib;
 - terdapat sisa pekerjaan yang belum disetujui oleh lembaga donor.
9. Masih ada permasalahan dalam penyajian Laporan Keuangan yang disusun.

SS16 Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Tren kenaikan kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud 2015-2017



Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	75,19	75	79.67	106,2	77	103%

IKSS 16.1 “Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud” untuk capaian tahun 2017 realisasinya telah mencapai target, bahkan capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Dari target indeks yang ditargetkan sebesar 75 berhasil terealisasi sebesar 79,67 dengan persentase capaian sebesar 106,2%. Sesuai dengan PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017, Indeks sebesar 79,67 masuk dalam interpretasi Memuaskan/Baik. Indeks sebesar 79,67 merupakan akumulasi dari tiga bidang layanan yaitu layanan pendidikan, layanan kebudayaan dan Unit Layanan Terpadu.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian indeks kepuasan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,48 poin. Tercatat indeks kepuasan Kemendikbud pada tahun 2016 baru mencapai 75,19 meningkat menjadi 79,67 di tahun 2017.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2015-2019, indeks sebesar 79,67 telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat sampai dengan tahun 2019 sendiri indeks kepuasan yang ditargetkan hanya sebesar 77.

Survey kepuasan pemangku kepentingan pada tahun 2017 dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Kemendikbud. Survey digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan implementasi kebijakan Kemendikbud. Responden yang dilakukan survey sebanyak 12.233 orang dengan rincian bidang pendidikan 11.303 orang, bidang kebudayaan 506 orang dan Unit layanan Terpadu 424 orang di 34 propinsi, dengan *sampling error* sebesar $\pm 1,03\%$, pada *interval* kepercayaan 95,0%.

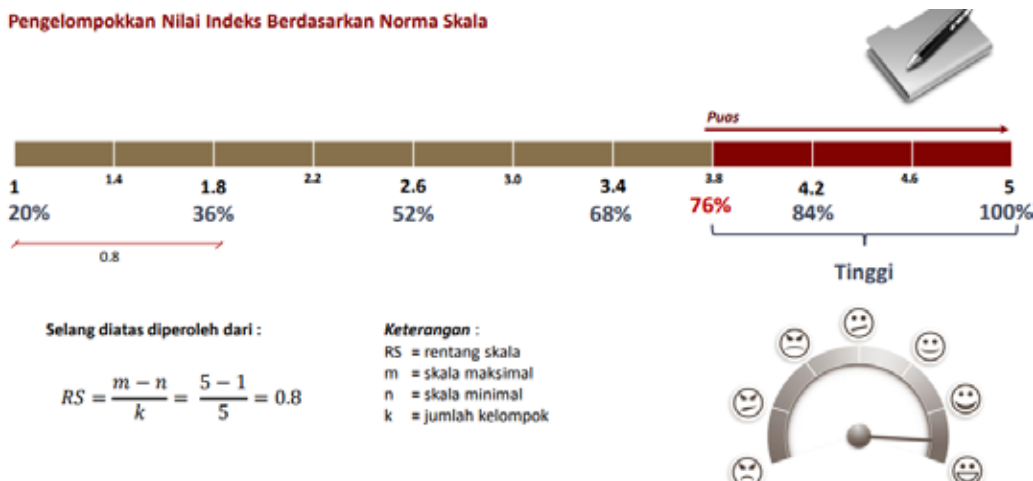
Pemangku kepentingan yang dijadikan *sampling survey* meliputi tiga bidang, yaitu :

1. bidang pendidikan, meliputi :
 - PAUDNI terdiri dari 1) Peserta didik PAUD diwakili orang tua; 2) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI; dan 3) Satuan pendidikan PAUDNI;
 - Pendidikan dasar terdiri dari 1) peserta didik SD/SMP atau diwakili orang tua; 2) pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP; dan 3) satuan pendidikan SD/SMP;
 - Pendidikan SMA terdiri dari 1) Peserta didik SMA; 2) pendidik dan Tendik SMA; dan 3) satuan pendidikan SMA;
 - Pendidikan Kejuruan terdiri dari 1) Peserta didik SMK; 2) pendidik dan Tendik SMK; dan 3) satuan pendidikan SMK;
2. Bidang kebudayaan, meliputi :
 - Pengelola situs dan cagar budaya;
 - pengelola dan pelaku dan seni di taman budaya;
 - Pemuka dan masyarakat desa adat;
 - Komunitas seni;
 - Komunitas budaya;
 - komunitas film;
 - pengurus dan anggota kepercayaan;
 - peserta didik; dan
 - satuan pendidikan dan masyarakat.

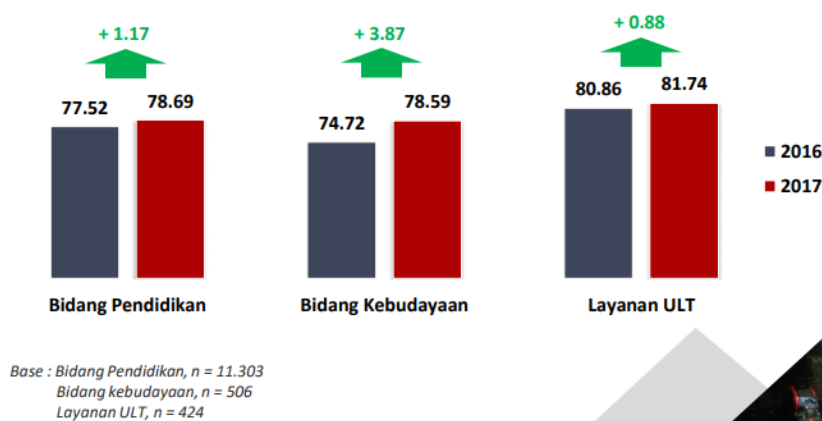
3. Unit Layanan Terpadu, meliputi :

- masyarakat yang pernah berkunjung atau penerima layanan secara langsung di ULT/peminta layanan melalui daring ULT. Indikator kepuasan pemangku kepentingan berdasarkan survey didasarkan 2 norma indeks yaitu Pengelompokan Nilai Indeks Berdasarkan Norma Skala dan Pengelompokan Nilai Indeks Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017.

Pengelompokan Nilai Indeks Berdasarkan Norma Skala



Berikut rincian Indeks kepuasan per bidang dengan perbandingan dengan tahun sebelumnya.



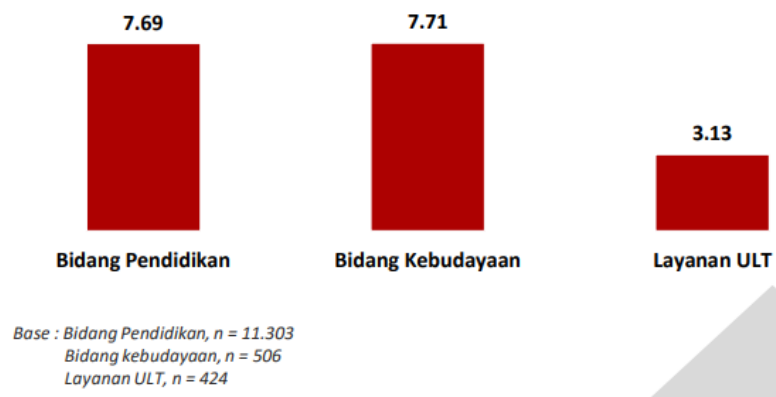
Pengelompokan Nilai Indeks Berdasarkan Permen PAN RB No. 14/2017

No.	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2.	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3.	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4.	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak baik, perlu perbaikan yang tidak mendasar
6.	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan	Bidang Kebudayaan	Layanan ULT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum 2. Ujian Nasional (UN) 3. Program Indonesia Pintar 4. Pendidikan Kecakapan Kerja 5. Pendidikan Kecakapan Wirausaha 6. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 7. Pengembangan Karir Guru 8. Sertifikasi Guru 9. Insentif Guru (3T) 10. Penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi 11. Akreditasi Sekolah 12. Bantuan Operasional Sekolah 13. Buku Teks Pelajaran 14. Block Grant Sarana dan Prasarana 15. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 16. Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) 17. Penyuluhan Bahasa Indonesia 18. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (Ed.5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Cagar Budaya & Permuseuman 2. Revitalisasi Taman Budaya 3. Revitalisasi Desa Adat 4. Fasilitasi Komunitas Budaya 5. Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan kebudayaan 6. Fasilitasi Saranan Kesenian 7. Fasilitasi Bioskop Keliling 8. Fasilitasi Pengembangan Perfilman 9. Fasilitasi Kegiatan Anggoro Kasih. 10. Belajar Belajar Maestro 11. Penghargaan Terhadap Maestro 12. Gerakan Seniman Masuk Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Kualitas Hasil Pelayanan 5. Sikap Petugas Pelayanan 6. Kompetensi Petugas 7. Fasilitas 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <p>Sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017</p>

Indeks ketidakpuasan pemangku kepentingan pada tahun 2017 bidang pendidikan, bidang kebudayaan maupun layanan ULT tergolong rendah dengan grafik per bidang sebagai berikut:



Meskipun target yang ditetapkan telah tercapai, namun beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud antara lain:

1. indeks ketidakpuasan bidang Pendidikan didorong oleh besarnya ketidakpuasan pada guru dan tenaga kependidikan terhadap layanan sertifikasi guru;
2. indeks ketidakpuasan bidang Pendidikan didorong oleh besarnya ketidakpuasan komunitas film terhadap Fasilitasi Pengembangan Perfilman

Ke depan, upaya peningkatan kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan terus lakukan. Beberapa langkah antisipasi/upaya yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai secara lebih maksimal antara lain:

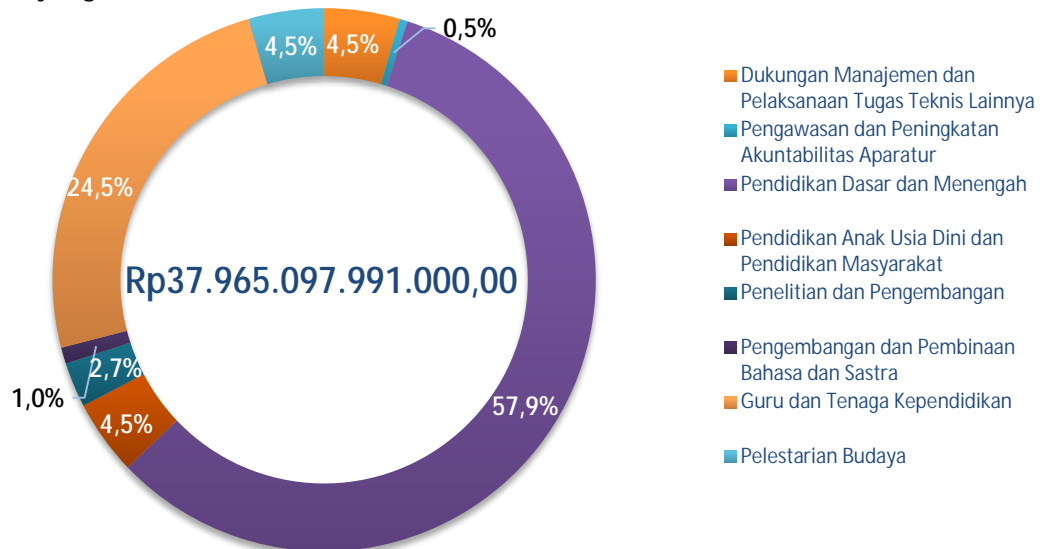
1. Mempertahankan kinerja parameter-parameter yang telah memiliki indeks kepuasan tinggi dan di atas rata-rata indeks.

- a. Bidang Pendidikan
 - Peserta Didik : pendidikan kecakapan wirausaha, Pendidikan kecakapan kerja
 - GTK : penghargaan guru berprestasi
 - Satuan Pendidikan : akreditasi sekolah, pemberian bantuan (*block grant*) sarana prasarana, Ujian Sekolah/Nasional
 - Kebahasaan : UKBI, KBBI daring/online edisi 5, penyuluhan Bahasa Indonesia
 - b. Bidang Kebudayaan : gerakan seniman masuk sekolah, revitalisasi desa adat, fasilitasi komunitas budaya, dan fasilitasi kegiatan anggoro kasih
 - c. Bidang ULT : perilaku petugas, kompetensi petugas, persyaratan permohonan layanan, waktu kecepatan layanan, dan fasilitas.
2. Meningkatkan kinerja parameter-parameter yang telah memiliki indeks kepuasan tinggi, namun masih di bawah rata-rata indeks.
- a. Bidang Pendidikan
 - Peserta Didik : Kurikulum (tidak mudah berubah ubah dan lebih berkualitas), KIP (tepat sasaran, merata dan tepat waktu)
 - GTK : Kurikulum (sosialisasi dan pelatihan, dukungan sarana dan prasarana, diberlakukan secara menyeluruh dan tidak sering berubah), peningkatan kapasitas guru, pengembangan karir dan kepangkatan guru, insentif guru di daerah 3T (pencairan sesuai jadwal, peningkatan besaran tunjangan)
 - Satuan Pendidikan : BOS/BOP (pencairan tepat waktu dan unit cost ditambah), ketersediaan buku teks pelajaran
 - b. Bidang Kebudayaan : revitalisasi cagar budaya dan permuseuman, revitalisasi taman budaya, fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan, fasilitasi sarana kesenian, fasilitasi bioskop keliling, belajar Bersama maestro, penghargaan terhadap maestro.
 - c. Bidang ULT : kemudahan prosedur (aplikasi dipermudah, informasi disampaikan secara jelas, permasalahan dapat diselesaikan), hasil layanan dan penanganan keluhan (setiap keluhan yang ada di daerah segera ditanggapi dan pemberitahuan yang jelas mengenai hasilnya).
3. Memperbaiki kinerja parameter-parameter yang belum memiliki indeks kepuasan tinggi
- a. Bidang Pendidikan : mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi guru serta pencairan tunjangan sertifikasi tepat waktu; pelayanan BIPA.
 - b. Bidang Kebudayaan : fasilitasi pengembangan perfilman (dari segi persyaratan lebih dipermudah untuk pembuatan izin film, lebih merata dalam pengembangan perfilman di universitas dan lembaga perfilman serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat).

B REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kemendikbud tahun 2017 sebesar Rp37.965.097.991.000,00 Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 16 sasaran strategis dengan 45 indikator kinerjanya yang terdistribusi ke dalam delapan program pendidikan dan kebudayaan.

Grafik di bawah ini menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan Kemendikbud.



Anggaran terbesar masing-masing dialokasikan untuk membiayai program pendidikan dasar dan menengah yaitu sebesar 57,9% dan program guru dan tenaga kependidikan sebesar 24,5%. Untuk program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, program pelestarian budaya, dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar 4,5%; program penelitian dan pengembangan mendapat alokasi anggaran 2,7%; program pengembangan dan pembinaan bahasa mendapat alokasi

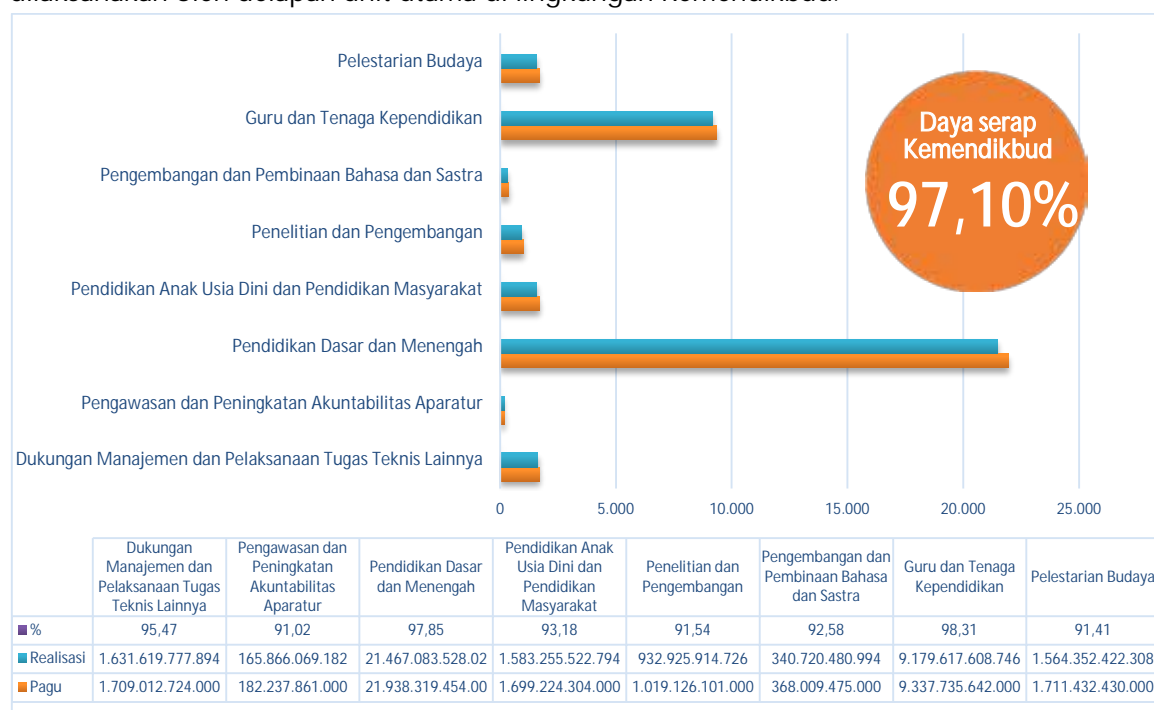


Rincian alokasi anggaran per program tahun 2017

anggaran sebesar 1,0%; dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar 0,5%.

Dari total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp37.965.097.991.000,00 telah berhasil terserap sebesar Rp36.865.441.324.665,00 sehingga persentase daya serap Kemendikbud untuk tahun 2017 adalah sebesar 97,10%.

Berikut grafik daya serap anggaran tahun 2017 pada delapan program yang dilaksanakan oleh delapan unit utama di lingkungan Kemendikbud.



Efisiensi anggaran

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, seluruh Kementerian/lembaga agar melakukan penghematan penggunaan anggaran khususnya belanja barang. Pada tahun 2017, Kemendikbud berhasil melakukan **penghematan sebesar Rp1.882.505.000.000,00**.

Sumber penghematan anggaran terutama berasal dari efisiensi belanja barang yang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Anggaran hasil efisiensi tahun 2017 dialokasikan pada program program prioritas seperti Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter, peningkatan profesionalisme guru, program vokasi, pemberian bantuan siswa miskin, rehabilitasi ruang kelas rusak dan pembangunan sekolah atau kelas baru terutama di daerah 3T.

CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN KEMENDIKBUD 2017



1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Salah satu isi nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Untuk merealisasikan janji tersebut, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, menugaskan Kemendikbud untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Menindaklanjuti tugas tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.

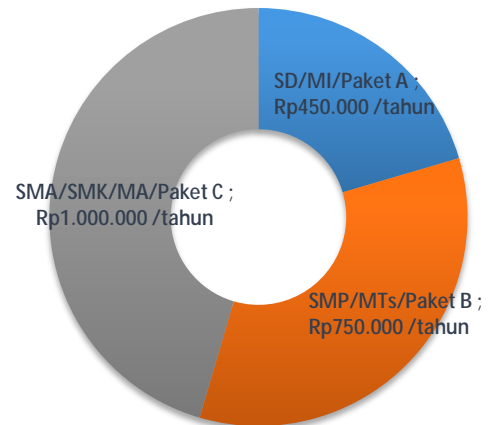
Program PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun. Secara umum, PIP yang dijalankan memiliki empat tujuan:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
3. Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja

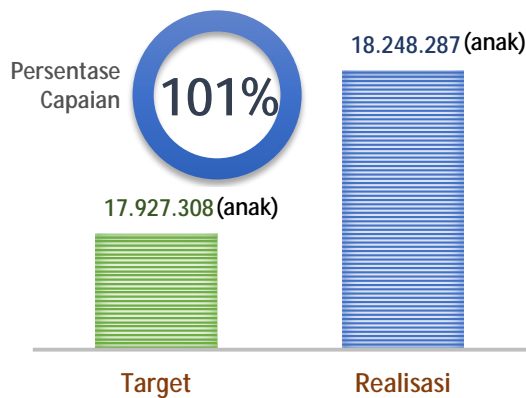
PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6-21 tahun dengan prioritas antara lain:

1. Peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Peserta dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan pertimbangan khusus;
 - Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
 - Peserta didik berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial;
 - Peserta didik terkena dampak bencana alam;
 - Peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah;
 - Peserta didik mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
 - Peserta pada lembaga kursus dan satuan pendidikan nonformal
3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

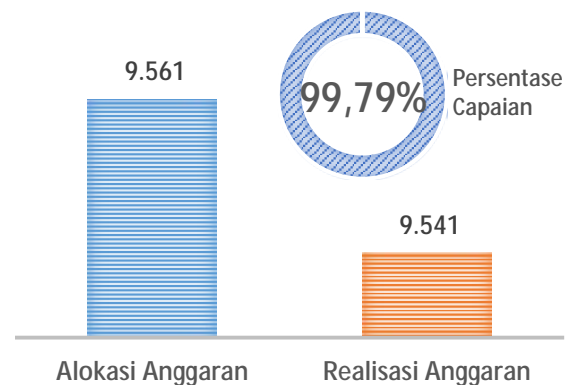
KIP sendiri merupakan kartu penanda identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan PIP apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Besaran dana PIP masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik disamping:



Berikut rincian target dan realisasi fisik dan anggaran siswa penerima PIP tahun anggaran 2017.



Grafik Capaian Fisik PIP 2017
(per 28 Des 2017)



Grafik Capaian anggaran PIP 2017
(per 6 Des 2017)

Berikut rincian penyaluran manfaat KIP pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2017 (per tanggal 8 Januari 2018).

SEKOLAH	ALOKASI	PENYALURAN		PENCAIRAN (DASHBORD BANK)	
		SASARAN	%	SASARAN	%
SD	10.360.614	10.362.746	100	5.572.234	54
SMP	4.369.968	4.485.492	101,9	2.248.975	50
SMA	1.375.458	1.520.422	110,5	859.782	57
SMK	1.879.617	1.879.627	100	1.079.163	57
JUMLAH	17.985.657	18.248.287	101	9,760,154	53

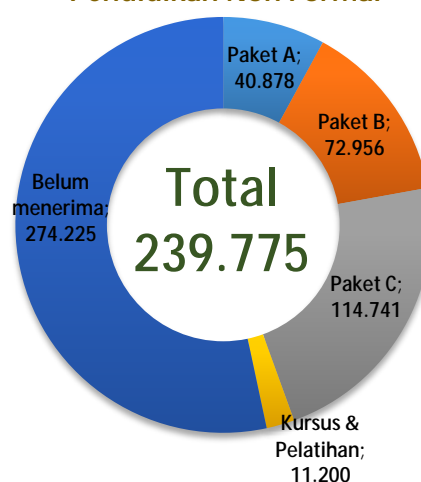
Berikut rincian pencetakan KIP-ATM pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2017 (per tanggal 31 Desember 2017).

SEKOLAH	Alokasi	KIP Reguler - 2016	KIP-ATM – 2017 (Blanko)	KIP-ATM – 2017 (Proses Personalisasi)
SD/SDLB/Paket A	10.360.614	3.874.695	10.000.000	7.424.223
SMP/SMPLB/Paket B	4.369.968	2.199.898	4.000.000	1.878.439
SMA/SMLB/Paket C	1.375.458	624.312	1.500.000	647.496
SMK/Kursus	1.879.617	770.816	1.500.000	829.219
JUMLAH	17.985.657	7.469.721	17.000.000	10.779.377

PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Target capaian PIP program pendidikan kesetaraan untuk tahun 2017 adalah sebesar 514.000 ATS. Dari target tersebut sebanyak 239.775 orang atau 46,65% telah mendapatkan PIP, yang terdiri dari 228.575 orang untuk program pendidikan kesetaraan A, B, dan C serta layanan kursus dan pelatihan. Angka capaian kinerja PIP pendidikan non formal dapat dilihat pada grafik disamping:

Capaian PIP 2017
Pendidikan Non Formal



Beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian target PIP pada pendidikan non formal antara lain: 1) Data yang dijamin melalui aplikasi ATS belum di entry ke DAPODIK; 2) Data kelengkapan ATS di aplikasi ATS yang di-input di DAPODIK, belum sesuai dengan persyaratan data PIP; 3) Warga belajar yang sudah mendapatkan KIP mengalami kendala dalam proses pencairan dana PIP; 4) Motivasi anak dan keluarga yang rendah untuk menyekolahkan anaknya; 5) Sebagian data ATS dari TNP2K sudah tidak *update*; 6) Sebagian data ATS belum *entry* ke DAPODIK (belum menjadi peserta didik) karena lembaga tidak mendapatkan kepastian dana BOP; 7) Penerbitan SK, SPM, dan SP2D, penerima PIP Kesetaraan dan Kursus adalah wewenang Ditjen Dikdasmen; dan (8) Sisa yang tidak di SK-kan dikarenakan kuota PIP sudah habis.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan antara lain: 1) peningkatan sistem aplikasi dapodikmas; 2) mengalokasikan bantuan dana BOP untuk pendidikan kesetaraan; 3) mensosialisasikan proses pencairan dana PIP; 4) Penerbitan SK, SPM, dan SP2D, penerima PIP Kesetaraan dan Kursus di bawah koordinasi langsung Ditjen PAUD dan Dikmas.

Dalam rangka pengiriman dan penyaluran PIP terdapat beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

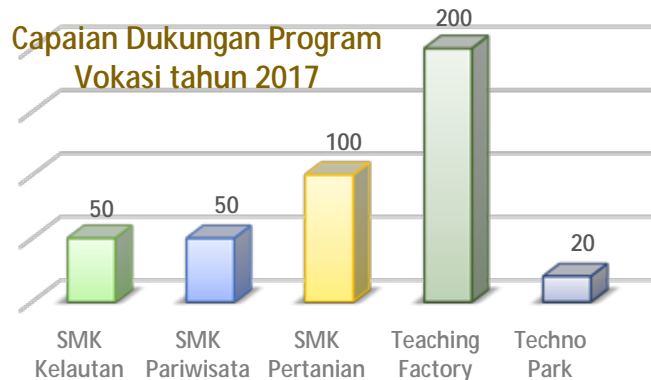
1. Luasnya wilayah dan sulitnya akses untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala utama dalam pengiriman dan penyaluran KIP;
2. Adanya penerima KIP yang pindah alamat atau alamatnya tidak diketahui juga menyulitkan pendistribusian KIP;
3. Tidak sinkronnya data.

2. Program Vokasi (Kejuruan)

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan mengintruksikan agar Kementerian/Lembaga terkait melakukan revitalisasi pendidikan SMK. Revitalisasi SMK diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan regional dan global seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kemendikbud menjadikan Program Vokasi (kejuruan) menjadi program unggulan. Berbagai persiapan baik infrastruktur, kurikulum dan tenaga pengajar disiapkan Kemendikbud.

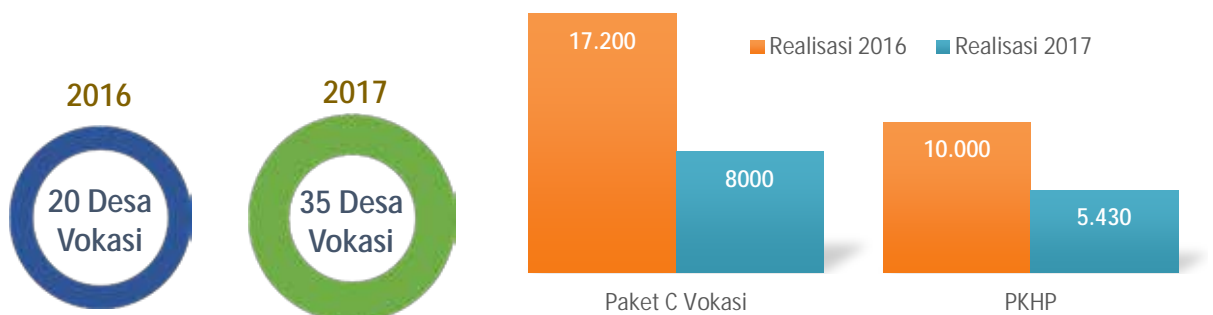
Untuk tahun 2017, Kemendikbud melakukan penguatan vokasi kepada SMK bidang kelautan, pariwisata, pertanian. Selain itu, penguatan dilakukan melalui *teaching Factory*, *Teckno park*, penguatan kerjasama dengan industridan penyaluran kejuruan.



1.540 SMK bekerjasama dengan Industri

1.280 SMK yang melakukan penyaluran Kejuruan

Penguatan vokasi tidak hanya dilakukan pada sekolah formal seperti sekolah SMK, namun dilakukan juga pada pendidikan nonformal dan layanan pelatihan, yaitu Pendidikan paket C Vokasi, Desa Vokasi dan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P). Program Paket C Vokasi dan PKH-P telah berjalan selama tiga tahun, sedangkan Desa Vokasi baru berjalan selama dua tahun. Berikut rincian ketercapaian vokasi pendidikan nonformal.



Program Keahlian Ganda Guru SMK/SMA

Program Keahlian Ganda adalah program pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya dan relevan dengan latar belakang pendidikannya. Pemberian kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA dilakukan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola "ON-1 IN-1 ON-2 dan IN-2" dan diakhiri dengan sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikat keahlian dan sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di LPTK untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Program ini pertama kali dilaksanakan tahun 2016. Pelaksanaannya menggunakan sistem gugur. Pada awalnya sasaran peserta adalah 15.000, tahap pembekalan turun menjadi 12.900. Peserta terus menurun hingga pada tahap UKK menjadi 8.590 dan yang lulus PLPG hanya 3,627 orang.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Program Keahlian Ganda Angkatan 2. Sasaran peserta angkatan 2 sebanyak 5.000 orang, untuk 38 Kompetensi Keahlian dari 25 Program Keahlian yang dikelompokkan dalam bidang teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, serta seni dan industri kreatif.

Program Keahlian Ganda angkatan 2 hanya diikuti 1.231 orang. Dari jumlah peserta yang memenuhi syarat, 1.127 orang. Saat ini peserta sedang melaksanakan kegiatan on service training, yaitu kegiatan belajar mandiri di sekolah masing-masing untuk mempelajari materi program keahlian secara utuh.



Sejumlah peserta PKG keahlian jasa boga sedang melakukan praktek (in service training)

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-2

Lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP.

6 PPPPTK dan LPPPTK berhasil menjadi LPP P2

Pada tahun 2017, terdapat 7 UPT Kemendikbud berhasil mendapatkan lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-2 (LSP P2). LSP-P2 merupakan LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia (SDM) lembaga induknya, SDM dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan BNSP. LSP P2 tersebut

berada di 6 PPPPTK dan 1 LPPPTK KPTK, yaitu: **PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri, PPPPTK Bidang Pertanian, PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata, PPPPTK Bidang Seni dan Budaya, PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika, dan LPPPTK Bidang Kelautan Perikanan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Lisensi LSP P2 bagi ketujuh P4TK menjadikan P4TK tersebut menjadi perpanjangan tangan BNSP. Sehingga LSP P2 tersebut menjadikan P4TK mempunyai hak untuk menyertifikasi keterampilan, dan kompetensi para guru SMK sampai ke level 4.

3. Program Pendidikan Karakter (PPK)

Nawacita Presiden Joko Widodo salah satu diantaranya adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut Kemendikbud melakukan penguatan karakter siswa melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa dan olah raga. Penguatan pendidikan karakter bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa ke secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang akan menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut dalam pendidikan karakter bangsa tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas. Dalam pelaksanaan program PPK, Kemendikbud menfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas**. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

Penguatan karakter diimplementasikan baik di lingkungan Sekolah maupun di keluarga/di lingkungan. Pada lingkungan sekolah PPK dilakukan melalui kegiatan pembiasaan (memulai hari dengan Upacara/Apel, menyanyikan lagu nasional/daerah, doa bersama, membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran), kegiatan Intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.

Berikut rincian jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan karakter di tahun 2017.



Selain pembinaan kepada siswa secara langsung, untuk mendukung keberhasilan program penguatan pendidikan karakter, Kemendikbud melakukan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan komite sekolah terkait program penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar, prinsip implementasi, dan strategi penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Sistem pelatihan PKB Guru melalui PPK dikembangkan dengan pendekatan berjenjang (*cascade*). Pendekatan ini dipilih karena mempertimbangkan pada kondisi jumlah sasaran, luas wilayah, serta biaya yang tersedia. PPK untuk Guru SD dan SMP bertujuan melatih Guru SD dan SMP agar memiliki kemampuan memfasilitasi berkembangnya potensi peserta didik dalam Penguatan Pendidikan Karakter.

Pada tahun 2017 pelatihan PKB penguatan pendidikan karakter telah dilakukan kepada 715 guru SD dan 647 guru SMP dari seluruh propinsi Indonesia. Selain itu, dilakukan juga pendampingan 320 satuan pendidikan percontohan yang tersebar di 89 Kab/kota pada 34 provinsi.

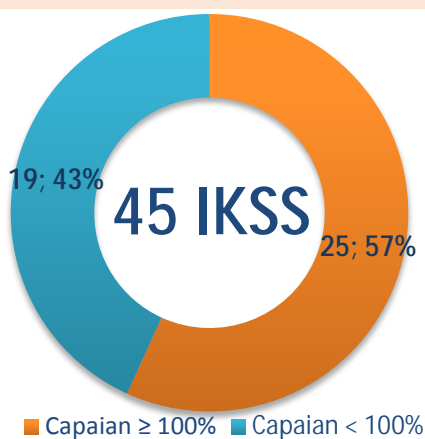
Program PKK bagi Kepala Sekolah SD dan SMP serta Pengawas Sekolah Pembina dilakukan melalui Bimbingan Teknis. Sebanyak 1626 kepala sekolah SD dan SMP seluruh Indonesia telah dilakukan bimtek. Selain itu, bimtek menyasar 718 pengawas pembina sekolah dari sekolah-sekolah yang masuk dalam sasaran bimtek dan ditambah dengan 5 kepala sekolah SD dan 3 kepala sekolah SMP. Selain bimtek, dilaksanakan juga Piloting Program Pengimbasan PPK di 10 Kab/Kota di Pulau Jawa.

Selain melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung, penguatan pendidikan karakter siswa juga dilakukan melalui pendekatan budaya. Program penguatan karakter yang dilakukan melalui budaya di tahun 2017 antara lain:

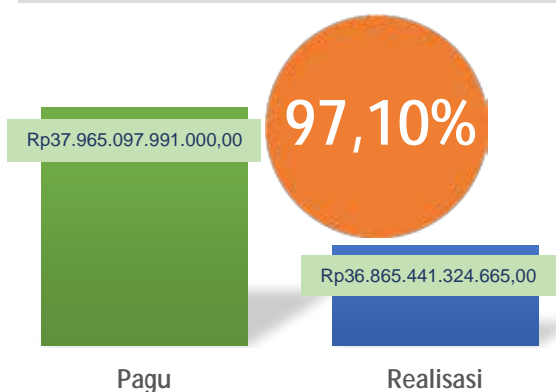
- 1) Persemaian nilai budaya sebagai penguat karakter bangsa sebanyak 25.500 peserta;
- 2) Belajar Bersama Maestro sebanyak 300 peserta;
- 3) Seniman Masuk Sekolah sebanyak 39.600 peserta;
- 4) Lawatan Sejarah Nasional sebanyak 232 peserta;
- 5) Kemah Budaya Nasional sebanyak 935 peserta;
- 6) Jejak Tradisi Nasional sebanyak 250 peserta;
- 7) Workshop Guru Sejarah sebanyak 455 peserta.



Ringkasan Capaian IKSS



Kinerja keuangan Kemendikbud 2017



PRIORITAS PERBAIKAN

Program dan anggaran Kemendikbud diprioritaskan kepada program-program pro rakyat dan dilaksanakan dengan pelibatan publik.

1. Program Indonesia Pintar (PIP) tepat sasaran;
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS); beasiswa, bantuan siswa miskin;
3. Peningkatan kualitas dan tunjangan profesi guru;
4. Rehabilitasi sekolah;
5. Penguatan Pendidikan Karakter siswa;
6. Pendidikan vokasi (kejuruan);
7. Penyediaan sarana prasarana sekolah;
8. Mendorong pemenuhan SPM dan SNP bagi sekolah;
9. Peningkatan layanan di bidang kebudayaan dan kebahasaan.

TANTANGAN KE DEPAN

1. Meningkatkan APM jenjang Dikdas dan Dikmen;
2. Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah;
3. Meningkatkan jumlah sekolah PAUD, Dikdas, Dikmen berakreditasi min B;
4. Pemenuhan dan peningkatan kualitas guru terutama di daerah 3T;
5. Pelestarian Bahasa dan Budaya.

LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Kemendikbud 2017
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017



Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan.

TARGET KINERJA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD 2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB /SMK 3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik 72 dan 74 Baik
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	2.425.000
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	67,7%
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.400.000
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun 2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif 3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi 4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun 5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	74,3% 49% 4.121 96,51% 11%
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A 2. APM SD/SDLB	98,02% 82,88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	82,40%
		4. APM SMP/SMPLB	73,07%
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	82,15%
		6. APM SMA/SMK/SMLB	69,49%
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,88
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,57
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,5 tahun
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	37.851
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi	63,1%
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	72%
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	68%
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	81,83%
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	58,27%
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,35%
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,13%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	60%
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,7
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,7
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,7
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	73%
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	55,7%
		2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	68,24%
		3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	70,5%
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	54.000
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	35
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	*
		2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,6 dan 6,9
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	4
		2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	2.100
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP	76
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	75

Nama Program	Pagu Awal
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp1.868.729.615.000,00
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp194.197.187.000,00
3. Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp22.478.361.054.000,00
4. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Rp1.853.571.781.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan	Rp1.099.443.458.000,00
6. Pengembangan, Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp403.437.274.000,00
7. Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp9.998.328.836.000,00
8. Pelestarian Budaya	Rp1.927.057.813.000,00

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Pengukuran
Kinerja Kemendikbud 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik	Baik	100
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB /SMK	72 dan 74	79,69 dan 73,12 (sma) 67,73 (smk)	111 dan 99 (sma) 92 (smk)
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik	Baik	100
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	2.425.000	2.049.130	84,50
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	67,7%	68,42	101,1
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	1.400.000	1.476.271	105,45
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	74,3%	74,28%	100
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	49%	78,2%	159,6
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	4.121	3.225	78,26
		4. Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,51%	97,93%	101,47
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	11%	8,6%	78
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	98,02%	92,14%	94
		2. APM SD/SDLB	82,88%	80,95%	98
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	82,40%	77,78%	94
		4. APM SMP/SMPLB	73,07%	57,81%	79
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	82,15%	75,90%	92
		6. APM SMA/SMK/SMLB	69,49%	54,59%	79
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,88	0,98	111
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,57	0,98	172
		9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,5 tahun	8,42	99
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	37.851	23.444	61,9
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi	63,1%	68,55%	109
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	72%	76,34%	106
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	68%	67,92%	100
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	81,83%	73,09%	89
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	58,27%	64,81%	111
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,35%	74,13%	121
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,13%	63,80%	85
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	60%	53,11%	89
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,7	6,84	102
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,7	5,45	81
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,7	5,09 (sma) 4,7 (smk)	76(sma) 70(smk)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	73%	99,91%	136,9
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	55,7%	51,55%	92,5
		2. Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai standar	68,24%	78,32%	114,8
		3. Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai standar	70,5%	56,88%	81
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	54.000	55.496	103
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional	35	52,49	150
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	*	*	-
		2. Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,6 dan 6,9	6,4 dan 6,1	95,5 dan 88,4
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya	4	8	200
		2. Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia	2.100	2.982	142
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP	76	75,94	100
15	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	100
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	75	79,67	106,2

*tidak dilakukan pengukuran di tahun 2017, pengukuran skor PISA dilakukan 3 tahun sekali

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2018

Inspektur Jenderal



Daryanto

NIP.19620104 198302 1 002

